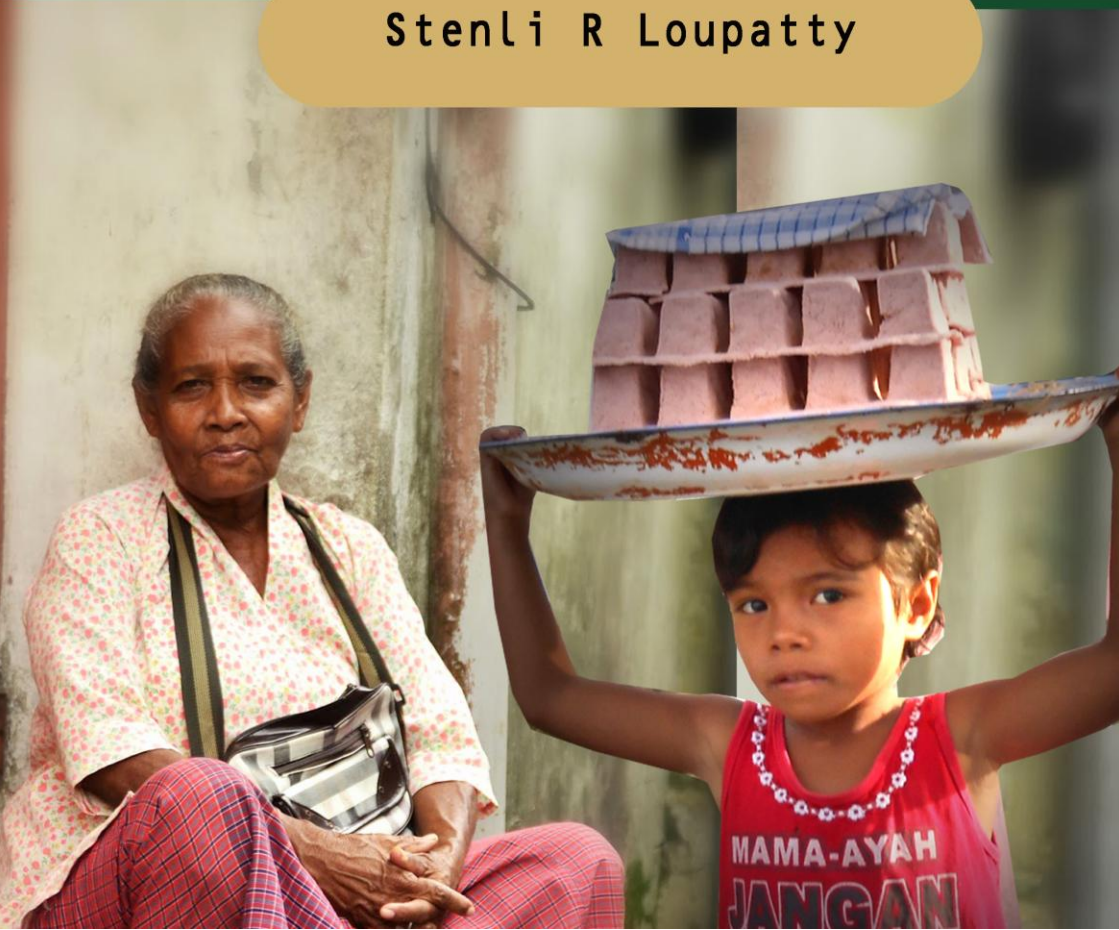




PAPALELE

WAJAH PEREMPUAN SAPARUA
PENJAGA EKONOMI KELUARGA

Stenli R Loupatty



Stenli R Loupatty

PAPALELE

**WAJAH PEREMPUAN SAPARUA
PENJAGA EKONOMI KELUARA**



Balai Pelestarian Nilai Budaya Maluku
Jln Ir. M. Putuhena Wailela Pokarumah Tiga Ambon
E-mail bpsnt amq@yahoo.com

***Papalele : Wajah Perempuan Saparua
Penjaga Ekonomi Keluarga***

copyringht© Balai Pelestarian
Nilai Budaya Maluku

Penulis

Stenli R Loupatty

Tata Letak dan Sampul

Mezak Wakim

Diterbitkan Edisi Ke- Dua oleh

Balai Pelestarian Nilai Budaya Maluku
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Jln Ir M.Putuhena Wailela Poka
Rumahtiga Ambon (0911 322717)

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Papalele ; Wajah Perempuan Saparua
Penjaga Ekonomi Keluarga
i-iv + 179 halaman
Cetakan II :2020

ISBN : 978-623-92863-0-9

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang.
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh
Isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

SAMBUTAN

KEPALA BALAI PELESTARIAN

NILAI BUDAYA MALUKU

Saya menyambut gembira atas diterbitkan buku dengan judul *"Papalele: Potret Perempuan Saparua Dalam Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Gender"* buku ini memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat Maluku dalam melihat konsep Papalele sebagai bagian penting dari budaya masyarakat Saparua dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Kita harus di pahami juga bahwa potret perempuan Saparua membuktikan sebaigian perempuan Maluku yang memiliki keuletan dalam membangun perekonomian keluarga. Kondrat perempuan tidak selalu di pandang lemah karena itu keberadaan perempuan Saparua sebenarnya memberi pengertian penting bagi konsep gender yang di posisikan dalam budaya orang Maluku. Keberadaan buku ini akan mampu melengkapi pustaka budaya Maluku. Inti sari dari buku ini adalah menekankan pada keberadaan perempuan dan tradisi di mana keduanya berjalan dengan baik. Dan karena itu pembelajaran utama yang di petik dari sari buku ini tentunya membenarkan adanya perempuan Papalele di Saparua yang tidak bisa di posisikan sebagai orang yang lemah. Duduk manis dan mendapatkan sokongan laki-laki namun lebih dari pada itu. Perempuan Saparua hendaknya meninsipriasi kita semua.

Sebagai Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Maluku saya sangat mengapresiasi penulisan buku ini, sehingga patutlah saya menyampaikan terima kasih kepada Tim Peneliti/penulis buku ini yang dengan komitmen moral yang tinggi dengan keterbatasan yang ada, namun dapat merampungkan hasil penulisan buku ini.

Demikian sambutan saya atas diterbitkannya buku ini, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu mencerahkan akal pikiran kita bersama dalam membangun masa depan bangsa ini secara lebih baik, lebih bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Than Yang Maha Kuasa, karena atas perlindungan dan penyertaanNya penulis dapat menyelesaikan penulisan ***“Papalele Wajah Perempuan Saparua Penjaga Ekonomi Keluarga”*** yang bertujuan dapat memberikan gambaran dan pencerahan tentang bagaimana peran dan kontribusi kaum perempuan, khususya ibu-ibu *papalele*. hal ini kemudian dapat dijadikan sebagai suatu kritik sosial terhadap berbagai realitas sosial yang timpang akibat konstruksi budaya patriaki. Perempuan selamanya tidak dapat didekatkan dengan ketidak berdayaan, lemah dan bergantung pada kaum laki-laki, melainkan pribadi yang sejajar bahkan lebih dari laki-laki. Masalah gender menjadi salah satu kritik sosial untuk hadir untuk melengkapi berbagai kritik sosial yang telah dibicarakan dalam ilmu sosiologi.

Ketimpangan sosial yang selama ini dikonstruksikan oleh budaya menjadi suatu fenomena yang melahirkan kritik-kritik sosial dan perlawanan dari para pemikir-pemikir yang beraliran gender. terselesainya penulisan ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, untuk itu tidak berlebihan jika disaat ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Kepala BPNB Maluku, Drs Rusli Manorek yang telah memberikan kesempatan kepada bagi penerbitan buku ini, dalam edisi revisi.

2. Camat Saparua yang telah memberikan izin dan dukungan kepada penulis selama melaksanakan penelitian di Lapangan
3. Ibu-Ibu papalele di Saparua yang telah membantu penulis selama melaksanakan penelitian di lapangan dalam proses pengumpulan data.
4. Para iforman yang telah membantu penulis selama melaksanakan pengumpulan data lapangan (wawancara)
5. Semua pihak dan tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu dalam penulisan ini yang telah memberikan bantuan dan dukungan bagi penulis selama penulisan ini berlangsung

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari suatu kesempurnaan untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan, dengan harapan kiranya penulisan ini dapat berguna bagi para pembaca sekalin.

Penulis

DAFTAR ISI

Sambuta Kepala Balai`i

Kata Pengantar`iii

Daftar Isi`v

BAB I PENDAHULUAN`1

- A. Latar Belakang`1
- B. Permasalahan`9
- C. Tujuan`12
- D. Metode Penelitian`13
- E. Ruang Lingkup`14

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN`15

- A. Letak Geografis, Iklim dan Curah Hujan`15
- B. Penduduk dan Mata Pencaharian`16
- C. Agama dan Kepercayaan`20
- D. Sistem Sosial Budaya Orang – Orang Saparua`22

BAB III PAPALELE SEBAGAI POTRET PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA`44

- A. Pasar Sebagai Pusat Aktivitas Ekonomi`44
- B. Pasar Pulu dalam Kebudayaan Masyarakat
Saparua Sebagai Penunjang Perekonomian dan
Pemenuhan Pangan`51
- C. Saparua Sebagai Sentra Ekonomi`63
- D. Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Rakyat`67
- E. Ekonomi Kreatif dan Industri Kreatif Sebagai
Penopang Ekonomi Rakyat`75

- F. Papalele Dalam Presfektif Sejarah dan Budaya Orang Saparua`85
- G. Papalele Dalam Presfektif Ekonomi Rakyat`93
- H. Papalele Sebagai Suatu Aktifitas`95

BAB IV PAPALELE DALAM PRESFEKTIF GENDER`119

- A. Apa Itu Gender`119
- B. Feminisme Suatu Refleksi dan Kritik Sosial`127
- C. Gender dan Sub Ordinasi`152
- D. Gender dan Streotif`153
- E. Gender dan Kekerasan`154
- F. Gender dan Beban Kerja`158
- G. Papalele Sebagai Suatu Tindakan Gender dan Ruang Sosial Baru Perempuan Papalele di Saparua`161

BAB V PENUTUP`166

- A. Kesimpulan`166
- B. Saran`167

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah kemiskinan dan pemenuhan kehidupan ekonomi merupakan suatu masalah yang hangat diperbincangkan oleh berbagai lapisan masyarakat dan pemerintah pada semua aras. Hal ini berkaitan dengan tujuan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Dalam gagasan inilah seluruh komponen dalam bangsa ini terus berpacu untuk mencapai tujuan bersama. Partisipasi dan kontribusi setiap anak bangsa dalam pembangunan dewasa ini sangatlah diperlukan untuk mencapai tujuan yang bersama bangsa ini di masa kini dan masa yang akan datang. Realitas kemiskinan yang menjadi potret kekinian bangsa Indonesia yang sesungguhnya merupakan suatu kegagalan bersama bangsa ini, hingga kini masih berkelanjutan dalam babakan pemerintahan dari masa ke masa. Untuk semuanya itu diperlukannya suatu sinergitas antara pemerintah dan masyarakat dalam konsep pembangunan yang lebih terarah.

Upaya pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan terus diupayakan dalam berbagai program pemberdayaan, namun program-program pemberdayaan tersebut belum secara efektif mampu mengeluarkan masyarakat dari kemiskinan, yang disebabkan oleh berbagai

hal baik secara struktural, kultural maupun alamiah¹. Dalam berbagai perkembangan dan kemajuan ekonomi dunia saat ini memberikan dampak yang sangat besar bagi negara-negara yang sedang berkembang khususnya dalam bidang ekonomi yang pada ahirnya melibatkan campur tangan negara-negara maju untuk mendorong peningkatan ekonomi negara-negara berkembang. Feneomena ini merupakan dampak dari pencapaian kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi internasional yang kemudian memberikan ruang bagi adanya keterlibatan dan partisipasi negara-negara maju dalam sistem ekonomi dunia. Sudah menjadi fenomena yang tak lazim perkembangan suatu negara turut memberikan pengaruh bagi perkembangan ekonomi dunia².

¹Untuk itu lihat M.Mmaswekan, *Papalele Studi Mengenai Perempuan Papalele di Kota Ambon* 2010 hal 52.

² Dimasa yang akan datang, masyarakat kita akan menghadapi banyak perubahan sebagai akibat dari kemajuan yang telah dicapai dalam proses pembangunan sebelumnya, kemajuan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengaruh globalisasi. suatu hal yang tidak mungkin dihindari adalah kegiatan pembangunan nasional akan semakin terkait erat dengan perkembangan internasional. Secara teoritis , kegiatan pembangunan nasional suatu bangsa yang takterpisahkan dari perkembangan internasional akan menumbuhkan apa yang lazim disebut dengan *global governance*. Oleh karena itu, persoalan-persoalan ekonomi dan politik semakin sukar dipecahkan dalam bingkai atau pola pikir negara-bangsa (Nation State). Persoalan-persoalan ekonomi dan politik yang dihadapi oleh suatu negara bukan hanya miliki atau menjadi beban tanggungan negara itu sendi, tetapi juga menjadi bagian dari persoalan-persoalan ekonomi dan politik negara-negara lain. Persoalan-persoalan tersebut menjadi bersifat internasional atau berskala global, kendati tumbuh dan berkembang di tingkat lokal. Suyanto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat* 2012 hal 3-4.

Dalam transformasi ekonomi global yang begitu terbuka memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi setiap individu untuk terlibat secara aktif dalam peningkatan ekonomi nasional melalui peningkatan ekonomi kerakyatan. Kebijakan-kebijakan telah ditempuh di masa orde baru misalnya dengan kebijakan home Industri memberikan dorongan yang begitu kuat bagi setiap individu untuk mengembangkan kreatifitas dan kemampuannya dalam mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat yang lebih baik serta upaya penciptaan lapangan pekerjaan yang baru. Kebijakan ini sesungguhnya memberikan kontribusi yang cukup positif dengan mengurangi orientasi dan ketergantungan masyarakat pada sektor formal (pemerintah) sebagai satu-satunya sarana penghidupan bagi masyarakat. Ditahun 1990-an upaya ini mampu menekan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran dalam masyarakat Indonesia, namun kondisi ini tidak bertahan lama akibat pengaruh ekonomi global yang mengakibatkan krisis moneter melanda negara-negara yang sedang berkembang khususnya di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Dampak krisis ekonomi dunia tersebut melumpuhkan kembali kekuatan-kekuatan ekonomi nasional mulai dari industri kecil hingga sektor usaha yang lebih besar.

Untuk membangun perekonomian bangsa menuju arah yang lebih baik dalam konsep pembangunan dewasa ini sangatlah diperlukan perhatian dan kebijakan pemerintah

yang lebih baik dan terarah untuk merangsang pertumbuhan pembangunan ekonomi bangsa³. Dalam merekonstruksi pertumbuhan ekonomi bangsa saat ini diperlukannya suatu kajian yang bersifat multidisipliner (sejarah, ekonomi, sosiologi, budaya) dan lainnya untuk merangkai berbagai partisipasi individu dan kelompok dalam realitas pembangunan ekonomi bangsa yang sesungguhnya bertumbuh pada ekonomi kerakyatan. Dalam perspektif sejarah tercatat Kekuasaan dan kebudayaan di Nusantara selama ini mengungkung berbagai partisipasi dan kontribusi individu maupun kelompok dalam konstruksi ekonomi kerakyatan pada berbagai lapisan dan tingkatan (lokal dan nasional).

Bangunan deskriminasi sesungguhnya telah hidup dalam kurun waktu yang begitu lama dalam kebijakan-kebijakan pemerintah maupun kebudayaan masyarakat Indonesia. Realitas ini muncul dalam tatanan kehidupan pada berbagai aspek kehidupan baik antar etnis, agama maupun dominasi laki-laki terhadap perempuan dalam praktek-praktek

³ Pertanyaan ketiga berkisar pada persoalan peran pemerintah dalam kegiatan perencanaan dan implementasi program-program pembangunan. Seberapa jauh pemerintah dapat melaksanakan fungsi-fungsinya yang memacu dan meluruskan perjalanan pembangunan masyarakat? Ketika prioritas pembangunan adalah memacu pertumbuhan negara sendiri, pemerintah dapat mempatkan posisinya antara lain: 1Sebagai pelaksana kebijakan ekonomi, 2sebagai konsumen, produsen sekaligus investor, 3sebagai pengelola perusahaan (negara), 4sebagai pengatur masyarakat (*regulator*). Sunyoto Usman dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat 2012 hal 4-5.

hidup tiap hari⁴. Munculnya konsep mayoritas dan minoritas menunnjuk pada segregasi dan upaya dominasi satu terhadap yang lain. Pada sisi yang lain segala tata peraturan kenegaran telah diletakan oleh pendiri negara ini dalam berbagai perundang-undangan yang mengatur dan mengikat setiap warga bangsa sehingga tercipta keselarasan hidup antar individu maupun kelompok dalam konteks berbangsa dan bermasyarakat.

Dalam konstruksi budaya patriaki yang begitu kuat di Maluku muncul suatu pola kehidupan kaum perempuan Maluku untuk memenuhi kehidupan keluarga yang bergerak dalam satu kegiatan usaha dalam sektor informal lewak aktifitas papalele. Dalam perjalanan sejarah sektor informal dalam bidang perekonomian merupakan sektor usaha yang tertua serta memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam pertumbuhan perekonomian kerakyatan dan bangsa dimasa itu sebagaimana yang diungkap oleh Revrisond Baswir⁵. Walaupun Dalam kurun waktu yang cukup lama

⁴ Argumentasi ini di dasarkan tulisan Lim Sing Meij, Ruang Sosial Perempuan Tionghoa *Sebuah Kajian Paca Kolonial* 2009 hal 1, pada masa pemerintahan orde Baru, telah dikeluarkan berbagai kebijakan terhadap orang Tionghoa yang bersifat operatif dan diskriminatif. Dengan ditutupnya sekolah Tionghoa, media berbahasa Tionghoa dan dilarangnya organisasi Tionghoa, berbagai strategi terus menerus dilakukan oleh orang Tionghoa agar identitas mereka tetap eksis. Mengirim anak-anak mereka untuk bersekolah di sekolah Indonesia, merupakan salah satu strategi yang kemudian melahirkan perempuan Tionghoa yang profesional.

⁵ Pada hal dilihat dalam konteks asli dan pendatang justru sektor informal inilah sebenasrnya yang merupakan anak kandung perekonomian Indonesia. Jauh sebelum pemerintah Hindia Belanda memperkenalkan konsep ekonomi moderen di negeri

sektor informal telah membentuk perilaku hidup umat manusia untuk mempertahankan eksistensinya yang cukup penting dalam perekonomian namun sektor ini baru diperkenalkan oleh Keith Hart pada tahun 1971 yang kemudian dipopulerkan oleh ILO. Namun pada sisi yang lain Loekman Soetrisno menganggap bahwa sektor informal yang merupakan sektor tertua di dunia dan saat itu merupakan bagian dari sektor formal⁶.

Dari penjelasan diatas dapat kita pahami sungguh bahwa sesungguhnya bahwa sektor informal merupakan sektor usaha tertua dalam perekonomian yang sesungguhnya memiliki perananan dan andil yang cukup besar dalam membangun perekonomian suatu bangsa. Namun pada konteks saat ini sektor informal dalam kehidupan masyarakat Maluku dan Masyarakat Saparua secara khusus dipandang sebelah mata atau dengan kata lain hanyalah pelengkap saja jika tidak memperoleh kesempatan pada sektor formal

ini kegiatan ekonomi yang kini disebut sebagai sektor informal itu, sudah terselenggara dengan mapan. Lingkup kegiatan pun tidak hanya terbatas pada sektor perdagangan di desa, tetapi sudah meluas sampai pada sektor industri dan jasa-jasa angkutan di Kota, Revrison Baswir, Agenda Ekonomi Kerakyatan 1997 hal 41.

⁶ Apa yang kita sebut sebagai sektor informal bukanlah suatu fenomena baru, sebab sektor informal ini ada ditengah kita sejak manusia berada di dunia. Sejak manusia ada di dunia mereka menunjang hidup mereka dengan cara menciptakan kerja sensiri self- employed. Sampai dengan munculna revolusi industri organisasi produksi yang berdasarkan hubungan kerja majikan dann pekerja tidak dikenal oleh manusia. Dengan kata lain self employed pada umumnya adalah organisasi yang formal, Loekman Soetrisno, Kemiskinan Perempuan dan Pemberdayaan 1997 hal 44.

(pemerintah)⁷. Kondisi ini kemudian menimbulkan peningkatan angka pengangguran serta peningkatan angka kemiskinan yang kemudian bermuara pada munculnya berbagai penyakit sosial dalam masyarakat. Dalam konteks inilah perempuan-perempuan papale⁸ di Saparua tampil sebagai agen pembaruan untuk merekonstruksi serta mengkritisi pola pikir masyarakat yang bergantung pada sektor pemerintahan (sektor formal) dengan menciptakan lapangan pekerjaan baru tanpa bergantung pada orang lain dan pemerintah.

Peran perempuan papalele di Saparua sesungguhnya merupakan wujud (pilaku) budaya masa lalu dalam bidang perekonomian rakyat yang mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan dalam kungkungan budaya patriaki yang sangat mendiskriminasi kaum perempuan. Dalam tradisi papalele perempuan merupakan objek sekaligus subjek

⁷ Untuk itu lihat Stenli Loupatty, *Saparua Dalam Dimensi Masa Lalu dan Konteks Masa Kini* 2012 hal 47-48

⁸ Papalele merupakan suatu bentuk aktifitas berdagang dengan cara tradisional yang dilakukan oleh perempuan Maluku dengan cara menjajakan (mengkeku) barang dagangannya atau menjualnya di depan toko, pasar atau tempat lain yang dianggap layak untuk dijual dengan menggunakan kain dan kabaya sebagai busana. Senada dengan itu M. Wekan dalam tulisannya *Papalele (Studi Terhadap Perempuan Papalele di Kota Ambon)* 2010 hal 57-58 menjelaskan papalele adalah aktivitas dagang tradisional sebagai salah satu jenis sektor yang dilakukan oleh perempuan atau wanita yang telah kawin maupun belum kawin dengan menjajah (mengkeku) dengan berjalan sambil membawa barang dagangan di dalam dulang (papan atau loyang) berupa ikan asar, ikan mentah, buah-buahan, makanan kering, sayur-sayuran atau kebutuhan pangan lain yang diproduksi sendiri atau diambil dari produsen dengan modal sendiri.

dalam upaya pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Aktivitas papalele merupakan suatu upaya perempuan Saparua untuk menjauhkan diri dari kemiskinan, kekerasan dan keterbelakangan serta mengungkap suatu bentuk kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam upaya pemenuhan hidup ekonomi keluarga.

Bentuk-bentuk ketidakadilan terhadap kaum perempuan sesungguhnya telah ada sejak lama dalam bentukan kebudayaan yang lebih didominasi oleh peran-peran laki-laki. Proses ini hampir merata dalam kehidupan setiap bangsa dalam berbagai perjalanannya sejarah dan budaya yang dibentuk dalam lintasan waktu. Perempuan selalu dipahami dalam pandangan yang lemah, rendah, pelengkap dan hanya terbatas pada bagaimana mengatur hal-hal yang berkaitan dengan keperluan rumah tangga serta dibatasi dalam berbagai bentuk pengambilan keputusan keluarga. Kondisi ini diperparah dengan sikap apatis dan kepasrahan kaum perempuan terhadap realitas sosial yang dialami. Pada sisi inilah posisi perempuan lebih diperlemah dan dipojokkan dalam lingkaran kebudayaan patriarki.

Dalam berbagai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dicapai saat ini sudah saatnya diberikan ruang sosial baru bagi kaum perempuan untuk turut berpartisipasi dan berekspresi sehingga tercipta suatu kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam praktek kehidupan manusia. Perbincangan mengenai isu kemiskinan dan gender makin

marak diperdebatkan dalam berbagai diskusi ilmiah diruangan-ruang publik. Bangkitnya eksistensi kaum perempuan untuk mendapat pengakuan yang sama dengan laki-laki mulai marak diperdebatkan, hal ini bukan saja dikalangan ilmuan melainkan juga dikalangan pemuka agama yang selama ini mengabaikan peran-peran strategis kaum perempuan. Hal inilah yang kemudian mendorong penulis untuk menngungkap suatu fakta peran perempuan Saparua yang sesungguhnya telah menyatakan kesetaraannya dengan kaum laki-laki khususnya dalam upaya mencukupi kebutuhan keluarag dengan aktifitas papale. Aktifitas papalele yang dilakukan perempuan Saparua sesungguhnya merupakan bukti yang sangat nyata bahwa kaum perempuan tidak hanya memiliki tanggung jawab untuk mengurus hal-hal rumah tangga (masak, cuci, mendidik anak dan melayani suami) melainkan memiliki tanggung jawab serta kemampuan yang sama dengan kaum laki-laki dalam upaya memenuhi kehidupan ekonomi keluarga.

B. Permasalahan

Identitas perempuan sepanjang masa telah dibentuk dan ditentukan oleh berbagai pihak. Identitas tersebut seringkali dikonstruksikan melalui kekuasaan yang timpang, sehingga melahirkan berbagai bentuk ketidakadilan terhadap perempuan. Maraknya perbincangan mengenai masalah gender dan kemiskinan sebagai topik menarik yang diperbincangkan dalam ruang-ruang publik dan tulisan-tulisan ilmiah membuka tabir keterungkungan dan keterbelakangan

perempuan terhadap laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan yang dibentuk dalam bangunan kebudayaan patriaki. Kaum perempuan cenderung dipahami sebagai kelompok yang lemah dan terbatas dan kaum laki-laki selalu dipahami sebagai kelompok yang selalu menguasai dan mengatur kaum perempuan dalam segala hal. Prilaku yang mengskreditkan kaum perempuan tidak hanya datang dari kehidupan budaya masyarakat maupun pikiran masyarakat jelata, melainkan muncul dari berbagai pikiran-pikiran kritis yang dikemukakan oleh para filsuf laki-laki yang sering membeikan pernyataan yang bersifat misogini⁹. Pernyataan seperti itu dapat ditemukan dalam antara lain dalam konsep Aritoteles yang menyatakan bahwa laki-laki secara alamiah superior dan pemimpin, sedangkan perempuan, inferior dan objek. Sementara itu, Schopenhauer mengatakan bahwa perempuan lebih cocok untuk mejadi perawat dan mengajar anak-anak, karena pada dasarnya mereka adalah anak-anak. Mereka mempunyai panndangan sempit. Singkat kata, mereka selama hidupnya adalah anak-anak yang berbadan besar¹⁰.

Dalam konteks kehidupan ekonomi masyarakat Saparua dari dulu hingga sekarang, kontribusi kaum

⁹ Misogini menurut ensiklopedia feminis adalah kebencian terhadap perempuan. Psikonalisis femiinis menyatakan bahwa misogini, kemarahan anak terhadap ibunya karena masyarakat membebankan pemeliharaan anak pada perempuan. Hanya dengan peran penuh laki-laki dalam memelihara anaklah, kata mereka bisa menghapus akar misogini. Humm, *Ensiklopedia Feminis 2007*.

¹⁰ Untuk itu lihat Lim Sung Meij, Ruang Sosial Baru Perempuan Tionghoa *Sebuah Kajian Pasca Kolonial*, 2009 hal 2.

perempuan menjadi sesuatu yang penting. Papalele sebagai suatu bentuk perekonomian dalam sektor informal menjadi suatu solusi terhadap kebutuhan ekonomi kerakyatan yang selama ini bergantung pada sektor formal (pemerintahan). Perempuan papalele telah menunjukkan eksistensi dan kontribusinya yang sangat besar dalam menunjang perekonomian keluarga serta merubah orientasi berfikir dan ketergantungan terhadap sektor formal. Dengan sedikit modal dan keterampilan yang terbatas perempuan papalele telah mampu menyelamatkan ekonomi keluarga dari berbagai keterpurukan dan kemiskinan. Berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan yang dapat dibahas lebih mendalam dan spesifik dalam penulisan ini antara lain:

1. Bagaimana peran perempuan papalele di Saparua mempertahankan eksistensinya dalam memenuhi kehidupan ekonomi keluarga?
2. Mengapa perempuan papalele di Saparua lebih cenderung melakukan profesi sebagai seorang pedagang (papalele)?
3. Bagaimana kehidupan perekonomian keluarga perempuan papalele dengan keluarga-keluarga yang lain di Saparua?
4. Jenis-jenis barang apa saja yang diperdagangkan oleh perempuan papalele di Saparua?

5. Bagaimana perhatian dan dukungan pemerintah terhadap perempuan papalele di Saparua dalam meningkatkan perekonomian masyarakat serta bagaimana upaya mendorong peningkatan ekonomi masyarakat?
6. Bagaimana kedudukan perempuan-perempuan papalele di Saparua dalam konteks kebudayaan lokal?
7. Bagaimana keberadaan perempuan papalele dalam perspektif gender?

C. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Mengetahui peran perempuan papalele di Saparua mempertahankan eksistensinya dalam memenuhi kehidupan ekonomi keluarga.
2. Mengetahui latar belakang perempuan papalele di Saparua lebih cenderung melakoni profesi sebagai seorang pedagang (papalele).
3. Mengetahui kehidupan perekonomian keluarga perempuan papalele dengan keluarga-keluarga yang lain di Saparua.
4. Mengetahui Jenis-jenis barang apa saja yang diperdagangkan oleh perempuan papalele di Saparua.
5. Mengetahui perhatian dan dukungan pemerintah terhadap perempuan papalele di Saparua dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dalam mendorong peningkatan ekonomi masyarakat.

6. Mengetahui kedudukan perempuan-perempuan papalele di Saparua dalam konteks kebudayaan lokal.
7. Mengetahui keberadaan perempuan papalele dalam perspektif gender.

D. Metode Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang akan dicapai dalam penulisan ini maka penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Untuk memperoleh data yang akurat dan valid penulis menggunakan teknik pengumpulan dengan menggunakan beberapa cara antara lain:

- a. wawancara mendalam dengan perempuan-perempuan yang berprofesi sebagai papalele dan para anggota keluarga (suami) yang memiliki hubungan secara langsung serta merasakan dampak dari kegiatan papalele tersebut dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan.
- b. observasi, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara turun secara langsung mengamati berbagai aktifitas papalele yang dilakukan oleh kaum perempuan khususnya aktifitas yang dilakukan tiap hari.
- c. studi kepustakaan, teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sebagai referensi pendukung

dalam penulisan ini sehingga mempermudah penulisan.

E. Ruang Lingkup

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami penulisan ini maka penulisan ini dibagi dalam dua ruang lingkup yaitu, ruang lingkup materi dan ruang lingkup operasional. Ruang lingkup operasional mencakup wilayah kajian penelitian ini yang difokuskan pada kecamatan Saparua. Sedangkan ruang lingkup materi mencakup aspek kajian Papalele, Partisipasi perempuan Saparua Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis, Iklim dan Curah Hujan

Secara geografis Kecamatan Saparua mempunyai luas wilayah 207 Km² dan termasuk dalam gugusan Pulau-Pulau Lease dimana secara astronomis berada dalam posisi 3°30'-3°50° Lintang Selatan dan 127°50'-128°10' Bujur Timur dengan ketinggian 200 m diatas permukaan laut serta memiliki topografi yang berbukit dan bergunung serta terletak pada kemiringan 15-40%. Dengan kondisi geografis yang dimiliki maka Kecamatan Saparua memiliki batas-batas wilayah yang dapat dilihat sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan : Selat Seramm
Sebelah Selatan Berbatasan dengan : Laut Banda
Sebelah Timur berbatasan dengan : Laut Seram
Sebelah Barat Berbatasan dengan : Selat Sirsawoni

Temperatur dan suhu di Kecamatan Saparua berkisar pada suhu 23°C-30°C disertai dengan curah hujan rata-rata 2731mm/tahun. Biasanya musim yang berlaku di Kecamatan Saparua tidak berbeda dengan daerah-daerah di Maluku yaitu musim Barat/Utdara (panas) dari Bulan Oktober sampai dengan Bulan Maret sehingga laut disebelah Utara Pulau Saparua biasanya bergelombang sedangkan Musim Timur mulai dari

Bulan April sampai dengan Bulan September menyebabkan laut disebelah Selatan dan Tenggara Pulau Saparua biasanya bergelombang tetapi disebelah Utara Biasanya tenang¹¹.

B. Penduduk dan Mata Pencaharian

Seperti yang telah dijelaskan pada bahagian awal dalam penuturan sejarah oleh tua-tua adat dan tokoh-tokoh masyarakat diyakini bahwa asal mula penduduk di Pulau Saparua berasal dari Nunusaku¹² (Pulau Seram). Selain penduduk dari Pulau Seram, penduduk Pulau Saparua diyakini juga berasal dari daerah-daerah lain diluar Maluku yang datang untuk mencari daerah yang baru untuk bermukim akibat perang saudara yang terjadi ditempat asalnya. Perpindahan penduduk dari Pulau Seram dan daerah-daerah lain di luar Maluku dan menempati Pulau Saparua pada mulanya menempati wilayah-wilayah pegunungan. Tempat mula mereka berdiam inilah yang di sebut dengan istilah Negeri Lama. Tempat-tempat ini dianggap sebagai tempat yang keramat atau sakral. Dalam pemahaman masyarakat arwah

¹¹ Untuk ini lihat profil Kecamatan Saparua tahun 2007 Hal 5

¹² Nunusaku adalah suatu tempat yang dianggap suci dan sakral bagi masyarakat Maluku Khususnya di daerah Seram, Ambon, Lease dan sekitarnya. Tempat ini diyakini sebagai asal-muasal manusia pertama di Pulau Seram yang kemudian bermigrasi menempati daerah-daerah sekitar Pulau Seram yang masih kosong. Dalam pemahaman masyarakat di Nunusaku terdapat suatu pohon beringin yang besar dan dialiri oleh tiga buah batang air yaitu Tala, Eti dan Sapalewa. Ketiga sungai ini yang kemudian diyakini sebagai sarana untuk melakukan migrasi ke tempat yang baru, wawancara dengan Bapak Maks Aipassa, Bapak M. Pattipeilohy dan Bapak Husen Taribuka 28 April dan 5 Mei 2012.

leluhur (nenek moyang) mereka berdiam di tempat ini, sehingga mmuncul berbagai larangan untuk melakukan aktifitas yang bertentangan dengan tradisi yang berlaku dalam kehidupan masyarakat setempat. Keyakinan ini masih tetap hidup dalam kehidupan masyarakat di di Pulau Saparua walaupun saat ini telah memeluk ajaran agama Kristen dan Islam.

Setelah masuknya bangsa Belanda di Saparua abad ke-17 mendatangkan perubahan sosial yang begitu besar dalam kehidupan masyarakat adat di Saparua dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Belanda dengan tujuan politik untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dalam perdagangan rempah-rempah. salah satu kebijakan yang diambil oleh Belanda pada masa pemerintahan Gubernur Arnold de Vlaming ialah dengan memerintahkan masyarakat yang ada di pegunungan untuk turun dan membentuk pemukiman didaerah pesisir (negeri-negeri yang sekarang di tempati). Kebijakan Arnold de Vlaming itu untuk memudahkan pengawasan perdagangan rempah-rempah dan mengontrol penduduk dengan cara yang lebih efektif dalam penerapan sistim tanam paksa yang dilakukan oleh Belanda.namun dengan melaksanakan pemindahan penduduk dari daerah pegunungan ke daerah pesisir membawa dampak psikologis yang besar bagi tatanan kehidupan adatis masyarakat Saparua. Berbagai dampak yang ditimbulkan ialah terjadinya perubahan dalam struktur pemerintahan Negeri

sebagai suatu wilayah teritorial masyarakat adat. Pusat-pusat adat di Negeri lama yang sakral dan magis dipindahkan. Hal ini turut mempengaruhi sistem kepercayaan masyarakat.

Perubahan sosial dapat dibayangkan sebagai perubahan yang terjadi didalam atau mencakup sitem sosial. Lebih tepatnya, terdapat perbedaan antara keadaan sistem tertentu dalam jangka waktu berlainan. Farley menjelaskan bahwa perubahan sosial ialah perubahan pola prilaku, hubungan sosial, lembaga dan struktur sosial pada waktu tertentu¹³. Perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat Saparua dimasa lalu, menjadi fakta sejarah dimasa sekarang dan terus dijalani sebagai suatu realitas dalam bentangan waktu yang terus bejalan. Perubahan-perubahan dalam ruang dan waktu inilah yang kemudian membentuk tujuh belas (17) negeri di Pulau Saparua dengan keadan penduduk serta karekter yang terbentuk dalam prilaku-prilaku kehidupan tiap hari. dalam pengelompokan masyarakat, penduduk Saparua dapat dikelompokan dalam kelompok masyarakat yang homogen. Hal ini didasarkan penduduk yang menempati daerah ini adalah penduduk asli. Penduduk pendatang hanya dapat dijumpai pada negeri-negeri tertentu yang dikarenakan tugas sebagai pegawai negeri sipil (PNS), TNI, POLRI dan proses kawin campuran. Jumlah ini jauh dibandingkan dengan jumlah penduduk asli. Dari data penduduk yang diiperoleh, dapat dirinci persebaran penduduk di negeri-negeri dalam

¹³ Untuk ini lihat Piotr Sztompka Sosiologi Perubahan Sosial 2008 hal 5.

Kecamatan Saparua berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut.

jumlah kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Negeri Haria dan jumlah kepadatan penduduk terendah berada di Negeri Iha. Dari jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Saparua terdapat sejumlah mata pencaharian yang dilakukan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan hidup tiap-tiap hari. Mata pencaharian masyarakat di Saparua sangat beragam dan variatif seperti, nelayan, petani, wiraswasta, PNS, TNI, POLRI, tukang bangunan, pengojek, papalele, sopir angkot dan mata pencaharian lainnya yang digeluti masyarakat. Dalam melokoni profesi tiap hari dapat dijumpai penduduk yang memiliki profesi ganda, fenomena ini dapat dilihat pada setiap Negeri. Dengan mata pencaharian yang digeluti mampu mencukupi kebutuhan hidup dan pendidikan anak-anak pada setiap jenjang pendidikan, namun masih ada penduduk yang masih hidup dalam kondisi ekonomi yang lemah. Dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat diperlukannya upaya pemerintah untuk memberikan rangsangan dan motivasi. Hingga kini masih kurangnya perhatian dan dukungan pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan hidup khususnya bagi masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan, pada hal sektor perikanan dan kelautan masih memberikan harapan dan jaminan bagi masyarakat.

C. Agama dan Kepercayaan

Kepercayaan dan Agama, merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Agama menjadi salah satu faktor penentu pembentukan karakter dan kepribadian manusia. Agama dan kepercayaan memberikan gambaran hidup kearah yang lebih baik untuk menata hidup saat ini maupun dimasa yang akan datang. Jauh sebelum agama Kristen dan Islam masuk ke Maluku abad ke-15-17 masyarakat di Maluku telah memiliki suatu kepercayaan yang disebut dengan istilah agama asli¹⁴. Kepercayaan ini merupakan suatu tradisi yang dibawah dari tempat asal mereka di Pulau Seram. Masyarakat di Saparua pada umumnya masih meyakini bahwa hingga sekarang roh leluhur mereka masih menempati daerah-daerah yang dianggap keramat seperti, negeri lama, baileo, rumah tua, dan tanjung-tanjung. hubungan dengan leluhur sering dipraktekan ketika akan dilaksanakannya ritual adat dan berbagai masalah yang dihadapi oleh setiap pemanngku kebudayaan atau tradisi tersebut.

Selain sebagai pelindung dan sarana untuk mendamaikan manusia dengan alam sekitar, roh-roh leluhur dipahami sebagai suatu kejayaan dimasa lalu yang tetap hidup dalam kebatinan setiap anak-anak negeri. Setelah masuknya

¹⁴ Agama asli ialah suatu kepercayaan kepada roh-roh leluhur yang diyakini masih hidup serta dapat mendamaikan manusia dengan alam sekitar.

pendatang-pendatang dari luar munculah berbagai kebudayaan-kebudayaan yang kemudian mempengaruhi konstruksi berfikir dan cara pandang masyarakat tentang sistim kepercayaannya. Kehadiran pendatang-pendatang luar ini kemudian mampu menembusi entitas kelokalan masyarakat Saparua dengan menyebarkan ajaran agama Islam dan Krite. Kedua ajaran agama inilah yang kemudian menjadi ajaran agama yang dianut oleh masyarakat di Saparua hingga sekarang ini. Dengan kata lain ajaran agama yang dianut oleh masyarakat Saparua dan Maluku pada umumnya merupakan suatu warisan budaya yang lahir dari akulturasi budaya luar yang dintrudusir melalui kehadiran para pendatang di daerah ini.

Ajaran agama yang dianut oleh masyarakat saat ini menjadi suatu hal yang sangat penting dan memiliki sensitifitas yang kuat dalam dinamika kehidupan masyarakat di Maluku. Sensitifitas inilah yang menimbulkan berbagai hal dalam dinamika sosial masyarakat seperti melemahnya ikatan-ikatan adat yang menimbulkan renggangnya rasa solidaritas diantara negeri-negeri yang berbeda ajaran agama, bahkan dapat menimbulkan terjadinya gesekan yang memicu konflik. Sejarah masa lalu masuknya ajaran agama di Maluku sesungguhnya telah melahirkan konflik agama yang begitu lama diantara orang Maluku, walaupun eskalasi konflik yang terjadi tidak terlalu besar dan menimbulkan dampak yang begitu kuat. Dengan demikian masuknya orang-orang luar ke

Maluku telah mempengaruhi tatanan kehidupan masyarakat lokal. Sehingga agama yang dianut masyarakat di Maluku saat ini merupakan suatu warisan masa lalu yang dibawah oleh para pendatang yang hingga kini tetap hidup dalam dokma-dokma agama yang dianut oleh masyarakat.

D. Sistem Sosial Budaya Orang-Orang Saparua

Berbicara mengenai sistem sosial budaya, maka tidak dapat dilepas pisakan dengan masyarakat sebagai subjek sekaligus objek dari sistem sosial budaya itu sendiri. Untuk itu akan muncul pertanyaan awal yang perlu dibahas untuk menguraikan sistem sosial budaya dalam suatu masyarakat. menurut Ralp Linton mengemukakan masyarakat, merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerjasama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan mennganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas. Pada sisi lain Selo Soemardjan menjelaskan masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama, dan menghasilkan kebudayaan. Walaupun secara teori para sarjana tersebut berbeda namun pada dasarnya memiliki kesamaan yang mencakup beberapa unsur sebagai berikut¹⁵ :

¹⁵ Untuk itu lihat Jacobus Ranjabar Sistem Soaial Budaya Indonesia 2006 hal 10-11.
Id. 9

- a. Manusia hidup bersama
- b. Bercampur untuk waktu yang cukup lama
- c. Memiliki kesadaran sebagai suatu kesatuan
- d. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat inilah yang kemudian menciptakan suatu sistem sosial budaya yang terbentuk melalui pola-pola interaksi yang terwujud dalam kebudayaan masyarakat setempat.

Menurut Jacobus Ranjabar sistem sosial budaya ialah, merupakan suatu keseluruhan dari unsur-unsur tata nilai, tata sosial dan tata laku manusia yang saling berkaitan dengan masing-masing unsur bekerja secara mandiri serta bersam-sama satu sama lain saling mendukung untuk mencapai tujuan hidup manusia dalam bermasyarakat. Senada dengan itu Talcot Parson merumuskan karakteristik dari sistem sosial sebagai berikut;

1. Dua orang atau lebih saling mempengaruhi
2. Dalam tindakannya mereka memperhitungkan bagaimana orang lain bertindak
3. Kadang-kadang mereka bertindak bersama-sama untuk mengejar tujuan bersama

Dari uraian-uraian diatas dapat dilihat bagaimana suatu masyarakat berada dan beraktifitas untuk menciptakan suatu sistem sosial budayanya sendiri sebagai suatu perwujudan hidup bersama untuk mencapai tujuan bersama. Sistem sosial

budaya merupakan suatu fakta sejarah masa lalu yang terurai dalam perilaku hidup masyarakat termasuk masyarakat di Pulau Saparua yang telah hidup dengan kebudayaannya sejak lama. Sistem sosial budaya inilah yang kemudian menggambarkan peradaban masyarakat Saparua dalam ikatan-ikatan persekutuan negeri-negeri¹⁶ (kampung) sebagai suatu sistem yang otonom dengan berbagai sistem sosial budayanya. Sistem sosial budaya itu sendiri terwujud dalam bentuk sistem nilai (norma), benda, hubungan-hubungan kekerabatan dan berbagai hasil karsa, karya dan cipta manusia yang akan dijelaskan dalam penelitian ini sebagai berikut.

a. Pela Gandong

Pela dan gandong¹⁷ merupakan dua bentuk hubungan kekerabatan yang terjalin antara negeri-negeri di Ambon,

¹⁶ Negeri dipakai dalam penulisan ini untuk menjelaskan eksistensi sistem pemerintahan adat yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat pada suatu wilayah (teritorial) di Maluku sejak dulu kala. Negeri merupakan pengembangan dari beberapa hena yang merupakan suatu pengistilaan secara lokal untuk menjelaskan suatu wilayah yang pada mulanya ditempati oleh satu atau beberapa marga (clean) dan kemudian berkembang menjadi aman; kumpulan beberapa soa. Soa yang dimaksud dalam kebudayaan Maluku menurut Colley, soa merupakan satu kelompok kekerabatan yang hampir sama dengan mata rumah atau kelompok unilateral yang dibangun dalam kurun waktu tertentu yang membesar bila terjadi penambahan mata rumah baru, atau mengecil bila ada mata rumah yang punah. untuk itu lihat makalah Mezak Wakim, Maluku; Negeri Raja-Raja Inspirasi Kelokalan Dalam Sistem Pemerintahan Adat, disampaikan dalam seminar musyawarah Latu Pati tahun 2012.

¹⁷ Pela ialah hubungan kekerabatan yang terjalin antara dua Negeri atau lebih yang dilatar belakangi suatu peristiwa (momen) seperti perkawinan, perang, tolong menolong dan peristiwa-peristiwa lainnya, sedangkan Gandong ialah suatu hubungan kekerabatan yang terjalin antara dua negeri atau lebih yang didasarkan pada ikatan geonoloogis (pertalian darah), senada dengan itu pela menuurut

Lease dan Seram. Hubungan kekerabatan ini hanya dapat dijumpai di Maluku dan tidak dapat dijumpai didaerah manapun di muka bumi ini. Hubungan ini biasanya terjadi pada dua Negeri atau lebih yang memiliki ajaran agama yang sama maupun juga pada negeri-negeri yang memiliki ajaran agama yang berbeda. Pela dan gandong menjadi suatu simbolisasi ikatan persaudaraan yang sangat kuat dalam kehidupan orang Maluku dan tidak dapat dibatasi dalam sekat-sekat apapun. Ikatan-ikatan ini memiliki nilai kesakralan yang begitu tinggi dan menjadi junjungan dalam kehidupan masyarakat Maluku pada umumnya. Negeri-Negeri di Pulau Saparua pada umumnya memiliki ikatan tersebut, misalnya Negeri Tuhaha memiliki ikatan gandong dengan Negeri Iha dan Negeri Ulath, serta memiliki ikatan Pela dengan lima Negeri di Pulau Haruku yaitu Kabau, Kailolo, Rohomoni, Pelau dan Hulaliu.

Dari jenisnya pela dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis seperti pela karas atau tuni, dan pela tanpa sirih. Dalam ikatan ini terdapat berbagai larangan dan janji yang dipahami sebagai sesuatu yang mesti dipatuhi sebagai suatu bentuk ketaatan terhadap apa yang telah dibuat oleh leluhur dimasa lalu. Hubungan-hubungan ini menggambarkan betapa kuatnya kesadaran dan kematangan berfikir leluhur dimasa lalu untuk membanguan suatu tatanan kehidupan yang beradab.

Cooley pela ialah ikatan persahabatan atau persaudaraan yang dilembagakan antara seluruh penduduk dari dua desa atau lebih, untuk itu lihat Cooley, Mimbar dan Tahta 1987 hal 183.

Kesadaran ini merujuk pada suatu pemahaman bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Lebih lanjut yang mesti dipahami ialah, peristiwa-peristiwa bersejarah ini terjalin dalam konteks kehidupan yang masih bersifat tradisional dan jauh dari sentuhan-sentuhan ilmu pengetahuan.

Bila dipahami dan dicerna secara baik budaya pela gandong merupakan suatu modal dasar dalam membangun Maluku. Pada titik ini memori kolektif anak negeri harus diarahkan pada sejarah dan budaya leluhur dimasa lalu untuk membentuk cara pandang orang Maluku dalam menata masa depan negeri ini. Untuk mengingat kembali momentum sejarah yang telah dibuat oleh leluhur dimasa lalu, hubungan ini sering kali dihangatkan (diperingati) melalui momen panas pela atau panas gandong dalam kurun waktu yang telah disepakati antar negeri berpela atau gandong.

b. Masohi (Gotong Royong)

Gotong royong merupakan corak kehidupan masyarakat Nusantara yang telah dipraktekkan sejak masa lampau. Praktek hidup gotong royong seringkali didasarkan pada tujuan bersama maupun perorangan. Masohi merupakan suatu istilah yang dipakai untuk menjelaskan suatu bentuk hidup gotong royong dalam kehidupan masyarakat Maluku. Budaya masohi sering kali tampak dalam bentuk kerja bakti, membangun rumah/rumah adat/rumah ibadah, acara perkawinan dan kematian.

Dalam praktek budaya masohi aspek yang paling menonjol ialah kebersamaan serta persatuan dan kesatuan yang tergambar dari pola perilaku individu yang terlibat dalam aktifitas tersebut. lebih lanjut mengenai sistem gotong royong juga dilakukan dalam aktivitas ekonomi sebagai upaya pemenuhan kebutuhan hidup. Dalam bentuk ini budaya masohi sering diistilakan dalam bentuk yang lain seperti maano, badati. Tindakan-tindakan inilah yang kemudian mendorong solidaritas diantara sesama anggota kelompok yang terlibat didalamnya. Sejalan dengan lajunya perkembangan zaman yang dicapai saat ini, budaya masohi mulai mengalami pergeseran yang begitu besar dalam kehidupan masyarakat Saparua. Pengaruh uang sebagai alat tukar yang sah, turut memperlemah budaya masohi.

c. Sistem Pemerintahan Tradisional

Pada umumnya negeri-negeri di Maluku Tengah dan Pulau Ambon mengenal suatu pemerintahan adat yang dikenal dengan sebutan saniri negeri¹⁸. Keanggotaan Saniri Negeri terdiri dari Kapitan, Maweng (pendeta Adat), Kepala Soa. Jabatan raja dalam sistem pemerintahan tradisional yang dianut merupakan suatu sistem pemerintahan yang berasal dari garis keturunan (soa parentah). Mekanisme pengangkatan raja dalam suatu negeri adat biasanya diawali

¹⁸ Saniri negeri merupakan suatu sistem pemerintahan adat yang di pimpin oleh seorang raja (Upu Latu) yang dibantu oleh badan-badan pembantu dalam fungsinya masing-masing.

dengan musyawarah mata rumah/soa parentah (clean) untuk menentukan calon yang akan diangkat. Jika dalam pelaksanaan musyawara soa parentah terdapat dua calon atau lebih maka akan dilaksanakan pemilihan secara demokratis terhadap calon-calon yang telah ditetapkan oleh soa parentah tersebut. Proses ini sesungguhnya menunjukkan kesadaran dan kedewasaan leluhur dimasa lalu dalam membentuk pola-pola hidup yang berdemokrasi dalam merumuskan suatu kepemimpinan tradisional yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi yang hingga kini masih menjadi perdebatan dalam kehidupan masyarakat moderen di Maluku. Seorang raja (Upu Latu) akan mendapat suatu pengakuan secara adat jika telah dilantik dan disahkan oleh Tua adat (maweng/tuan tanah) melalui proses pengukuhan adat yang dalam tradisi masyarakat Di Maluku biasanya dilakukan di Baileo (rumah adat).

Dalam melaksanakan tugasnya seorang Raja (Upu Latu) dibantu oleh Kapitan (panglima Perang). Kapitan bertugas untuk membantu raja dalam mengkoordinir pasukan dalam menghadapi peperangann. Dalam melaksanakan tugasnya seorang Kapitan dibantu oleh Malesy (pembantu Kapitan). Jabatan kapitan merupakan suatu jabatan yang dimiliki berdasarkan garis keturunan, tradisi ini berkaitan dengan keperkasaan dan kemahiran leluhur dimasa lalu. Seorang yang diangkat menjadi Kapitan dalam sistem pemerintahan adat diyakini memiliki kekuatan dan keperkasaan untuk

melindungi rakyat dari berbagai ancaman yang datang dari luar (perang). Dalam melaksanakan tugas untuk menjaga wilayah (petuanan) Kapitan biasanya dibantu oleh para kewan yang terdiri dari kewan laut dan kewan darat.

Selain Kapitan kepemimpinan Raja dalam sistem pemerintahan adat dibantu oleh kepala-kepala soa (dewan penasihat/pertimbangan). Kepala soa merupakan keputusan masing-masing Soa/mata rumah (clean) yang bertugas memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada raja dalam melaksanakan tugas kepemimpinan dalam negeri. Dalam melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan ritual adat raja dibantu oleh seorang pendeta adat. Dalam fungsi yang lain maweng dapat dijadikan sebagai dukun. Maweng dalam kehidupan masyarakat adat di Maluku selalu dikaitkan dengan kekuatan-kekuatan supranatural (arwa-arwa leluhur). Jabatan maweng ini biasanya dijabat oleh tuan tanah. Dalam tradisi masyarakat, tuan tanah dipahami sebagai orang (clean) yang pertama kali menginjakkan kaki di negeri asal mereka.

Jika ditelaah lebih dalam, pemerintahan tradisional di Maluku sesungguhnya telah menggambarkan suatu manajemen pembagian tugas dalam lembaga-lembaga pemerintahan tradisional secara moderen dan sempurana. Tugas-tugas pemerintahan tidak bertumpuh pada suatu titik (raja sebagai pemimpin) melainkan terdistribusi secara dinamis dalam peran-peran strategis yang dimainkan oleh

seluruh komponen yang ada dalam sistem pemerintahan tradisional itu sendiri.

E. Pembangunan di Saparua Dalam Konteks Kekinian

Semangat perjuangan untuk melepaskan diri dari berbagai rong-rongan penjajahan merupakan suatu upaya untuk menata dan mengatur tatanan kehidupan masyarakat Indonesia yang aman, damai, sejahterah dan mandiri. Perjuangan bangsa Indonesia tidak hanya berhenti ketika mencapai kemerdekaan, namun lebih dari pada itu perjuangan bangsa ini masih terus berlanjut seiring perjalanan bangsa ini dalam pusaran waktu yang terus berjalan. Konteks perjuangan yang dikehendaki sesungguhnya bukanlah perjuangan dengan mengikat bambu runcing dan senjata seperti yang dilakoni para pahlawan bangsa ini, melainkan perjuangan untuk mengisi kemerdekaan itu dengan pembangunan disegala aspek kehidupan. Proses inilah yang dijalani bangsa Indonesia semenjak mengijakan kaki di alam kemerdekaan. Proses perubahan dan penataan ke arah yang lebih baik dilakukan berdasarkan konsep pembangunan nasional.

Pembangunan sesungguhnya tidak dapat dipahami dalam pandangan mengenai sesuatu yang berkaitan dengan perubahan-perubahan secara fisik (infrastruktur) semata, melainkan perubahan moraliitas dan kepribadian bangsa yang tercermin dalam kehidupan anak-anak bangsa itu sendiri. Jika dipahami secara mendalam sesungguhnya pembangunan

merupakan suatu proses budaya yang terjadi dalam rencana dan rekayasa manusia untuk kepentingan bersama. Sehingga dengan kata lain pembangunan itu harus disesuaikan dengan budaya masyarakat dan bukan menngabaikan budaya itu sendiri¹⁹. Pembangunann yang menyeluruh sesungguhnya bertumpuh pada aspek fisik dan nonfisik sehingga tercipta sinergitas yang utuh.

Sejalan dengan perjalanan waktu, Saparua merupakan nama yang sejak dulu dikenal dalam panggung sejarah bangsa Indonesia juga panggung sejarah dunia. Hal ini berkaitan dengan sejarah masa lalu Pulau Saparua dalam masa higemoni perdagangan rempah-rempah yang dilakoni bangsa-bangsa Eropa khususnya bangsa Belanda. Dengan berbagai hal yang dihasilkan dan diperoleh masa lalu sesungguhnya harus menjadikan Saparua menjadi suatu daerah yang maju dan memikiki prospek yang lebih baik. Sejarah dapat di jadikan sebagai cerminan dimasa lalu untuk menata masa kini dan menjemput masa depan, sejalan dengan itu penulisan ini,

¹⁹ Sulit membayangkan sebuah proses, hasil maupun implikasi pembangunan yang berada diluar sebuah tatanan kebudayaan (setting of cultture). Alasanya, pembangunan itu sendiri merupakan tugas budaya yang harus dapat dipertanggungjawabkan pula dari sisi norma-norma kebudayaan itu sendiri. Pembangunan secara hakiki adalah dari dan untuk manusia, dan karenanya berdimensi operatif (praktis, metodis dan mekanistik) tetapi lebih bersifat substantif pada manusia berbudaya sebagai subjek dan objek pembangunan itu sendiri. Konsekwensinya pembangun it sendiri hanya dapat dilaksanakan dalam sebuah tatanan kebudayaan dan riil dnn kontekstual, serta sekaligus mendapat nilai kepenuhan nilai didalamnya, A. Watloly 2005 Maluku Baru, Bangkitnya Mesin Eksistensi Anak Negeri hal 127.

mencoba melihat Saparua dalam tiga ruang waktu yang menjadi fokus dalam percakapan ilmu sejarah dengan mengulas berbagai fakta pembangunan di Kecamatan Saparua dalam konteks kekinian.

a. Pemerintahan dan Infrastruktur

Pemrintahan merupakan suatu hal yang tidak dapat dilepas pisahkan dalam suatu kehidupan masyarakat, dimana ada pola pengorganisasian secara sistematis dan terstruktur untuk mencapai tujuan bersama. Menyangkut pemerintahan di Kecamatan Saparua tidak dapat dilepas pisahkan dengan keberadaan bangsa Belanda yang sejak dulu telah menaruh pengaruh dan kekuasaannya dalam kehidupan masyarakat di Saparua. Sejak tahun 1945 hingga kini telah tercatat beberapa nama yang menjabat sebagai kepala pemerintahan di Saparua dalam kurun waktu kepemimpinan yang dijalani pada tabel berikut ini antara lain;

Tabel 01
Nama-nama Camat Saparua

No	Nama Kepala Wilayah/Camat	Tahun Kepemimpinan
1	Stoclecha Holmen	1945-1951
2	J. Manuuhuttu	-
3	M.Waas	-
4	C.L. Muskita	-
5	Bahtiar Rahman	-
6	F. Nanlohy	-

7	Suryatin, BA	-
8	I.Wairata	-
9	A.W.Sialana	-
10	A.Pelupwssy	-
11	R.S. Anakota	-
12	W.Sinanu,BA	-
13	Drs. J. Parera	-
14	Drs.S.M.A Latuihamalo	1981
15	Drs. Hitipeuw	1981-9182
16	Drs. J.Alfons	1982-1986
17	Drs. J. Labetubun	1986-1991
18	J. Nanlohy, BA	1991-1993
19	Drs.J.Ferdiinandus	1993-1999
20	Drs.F.Y.Leunura	1999-2001
21	J.Siahaya, BA	2001-2003
22	F. Siahaya,S.sos, MA	2003 sampai sekarang

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Maluku tengah

Sebagai suatu Kecamatan yang dapat dikatakan cukup tua (lama) sesungguhnya Kecamatan Saparua mesti memiliki konsep dan sistem pemerintahan yang lebih baik dan teratur dalam rangka melaksanakan fungsi-fungsi pelayanan publik kepada masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Jika dilihat dari hasil pembangunan yang dicapai pada kecamatan Saparua saat ini, terdapat banyak hal yang mesti menjadi

bahan untuk di evalwasi dan di Kritisi sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih baik.

Upaya untuk membenahi pemyelenggaraan pemerintahan sesungguhnya telah dilakukukan dengan dikeluarkannya berbagai regulasi oleh pemerintah. Rumuusan kebijakan Otonomi daerah yang dianut dalam UU Nomor 32 tahun 2004 secara eksplisit memberikan ruang kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Secara umum hal ini memberikan dampak yang positif bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan fungsi-fungsi aparatur pemerintah yang sesungguhnya lebih leluasa untuk melakukan berbagai kebijakan berdasarkan kondisi riil di lapangan. Namu hingga kini belum banyak hal yang dibuat oleh Pemrintah Daerah (Maluku Tengah) dalam upaya untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan sinergis. Pendapat ini bukanlah sesuatu yang tidak beralasan, hal ini dapat dilihat pada hasil-hasil pembangunan yang dicapai hingga kini.

Disisi yang lain, perubahan sistem perpolitikan di negara ini turut memberikan dampak yang kurang baik bagi penyelenggaraan pemrintahan di Darah. Kewenangan Kepala Daerah yang tidak terbatas dalam penyelenggaraan pemerintahan sering kali disalah artikan, sehingga dperlukannya regulasi yang membatasi kewanangan Kepala Daerah dalam mengatur sistem kepagawaian sebagai dampak

dari proses politik yang dijalani. Kebijakan-kebijakan dalam pemerintahan cenderung didekatkan pada aspek politik, seperti yang terjadi pada beberapa negeri yang ada di kecamatan Saparua. Selain itu diperlukannya peningkatan kualitas sumber daya aparatur Pemerintah baik ditingkat Kabupaten maupun di Kecamatan Saparua secara khusus. Perlunya rumusan-rumusan program kerja yang terencana dan sistimatis berdasarkan kebutuhan masyarakat serta berorientasi kepada pencapaian hasil dan bukan berorientasi pada pencapaian program.

Sejalan dengan potret pemerintahan yang dialami saat ini di Kecamatan Saparua, terdapat sejumlah instansi dan fasilitas Pemerintah dalam rangka menunjang layanan publik kepada masyarakat, antara lain;

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 1. UPT Dispenda | 8. UPTD Diknas |
| 2. UPTD Perhubungan | 9. RSUD dan Puskesmas |
| 3. UPTD Pekerjaan Umum | 10. Statistik |
| 4. UPTD Pertanian | 11. Ratelda |
| 5. UPTD Perikanan dan Kelautan | 12. Syahbandar |
| 6. UPTB KKBB dan Capil | 13. KUA |
| 7. UPTD Infokom | 14. Badan Pertanahan Nasional |

Selain itu terdapat pula sejumlah instansi vertikal dan BUMN serta Bank swasta yang ada di Kecamatan Saparua antara lain yang dirasakan cukup memberikan dukungan untuk kepentingan umum;

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| 1. POLSEK Saparua | 7. PT Telkom |
| Saparua | |
| 2. Koramil 1503-04 | 8. PT PLN |
| Ranting Saparua | |
| 3. Kantor Kejaksaan Negeri Ambon | 9. PT Pos |
| dan Giro Kecamatan Saparua | |
| Cabang Saparua | 10. Bank |
| Danamon | |
| 4. PT BRI Ranting Saparua | |
| 5. Kantor Rutan Ambon Cabang Saparua | |
| 6. PT Bank Maluku | |

Untuk membuka akses transportasi di darat sebagai transportasi utama yang menghubungkan negeri-negeri di Kecamatan Saparua tersedia jalan dengan panjang kurang lebih 54,4 KM²⁰ yang didanai oleh pemerintah Provinsi dan kabupaten. Akses jalan ini memberikan kemudahan bagi interaksi diantara negeri-negeri di Kecamatan Saparua dan turut menunjang peningkatan ekonomi masyarakat dengan menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat. Sedangkan untuk transportasi laut yang menghubungkan Kecamatan Saparua dengan Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Provinsi serta pulau-pulau lain lebih banyak dikelola oleh pihak swasta. Peran sektor swasta untuk mengerakan perekonomian melalui akses transportasi laut turut memberikan dampak yang positif. Untuk pelayanan kesehatan

²⁰ Untuk itu lihat Profil Kecamatan Saparua tahun 2007, hal 16

terdapat satu buah rumah sakit Umum yang dilengkapi ruangan rawat Nginap dan lima buah puskesmas serta enam buah pukesmas pembantu. Untuk melayani kepentingan umum dibidang kesehatan terdapat sejumlah tenaga Medis dan para medis yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 02
Jumlah Tenaga Medis dan Para
Medis di Kecamatan Saparua

TENAGA MEDIS/KESEHA TAN	STATUS		JUMLAH	KET
	PNS	PTT/Honor		
DOKTER :				
-Dokter Umum	6	4	10	-
-Dokter Gigi	-	1	1	-
Bidan	33	3	36	-
Perawat	49	1	50	-
Petugas Gizi	2	1	3	-
Petugas Sanitasi	-	-	7	-
Petugas	-	-	4	-
Imunisasi	16	2	18	-
Pekarya				
JUMLAH	106	12	129	

Sumber : RSU dan Puskesmas di Kec. Saparua

b. Pendidikan

Pendidikan sebagai salah satu tujuan nasional yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea Ke empat merupakan agenda nasional dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia dalam menghadapi era globalisasi. Tanggung jawab pemerintah terkait dengan sektor pendidikan yaitu dengan mendirikan dan sarana prasarana lainnya serta menyediakan tenaga pengajar yang cukup. Dalam realitas dunia pendidikan di Indonesia sesungguhnya secara umum belum merata. Pendidikan yang berada pada pusat-pusat pemerintahan jauh memperoleh perhatian dan fasilitas yang lebih baik jika dibandingkan dengan kecamatan dan daerah-daerah yang terpencil.

Masalah pendidikan di Kecamatan Saparua lebih cenderung ada pada distribusi guru mata pelajaran pada sekolah-sekolah yang belum merata serta terbatasnya sarana dan prasarana penunjang belajar mengajar (laboratorium), keterbatasan tenaga guru mata pelajaran eksata dan bahasa asing (Fisika, Kimia, Matematika, Bahasa Inggris dan Bahasa Jerman) buku-buku, kurangnya kreatifitas guru untuk menciptakan media-media mengajar dan lain-lain²¹. Selain itu seringkali dalam penataan birokrasi dalam dunia pendidikan tidak didasarkan pada aspek kualitas melainkan atas pertimbangan-pertimbangan yang cenderung subjektif, yang

²¹ Wawancara dengan Kepala UPTD Pendidikan Kec. Saparua Bapak C.M.G. Tamaela, S.Pd tanggal 29 April 2012

pada akhirnya berdampak pada kebijakan dan mutu pendidikan itu sendiri.

Sehingga untuk menghindari kebijakan-kebijakan yang subjektif tersebut diperluukannya pengujian kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) untuk menentukan jabatan-jabatanstrategis ddalam lingkungan pendidikan secara khusus dan lingkup pemerintah Kabupaten Malukuu Tenngah secara umum. Di Kecamatan Saparua terdapat sejumlah sarana prasarana, tenaga pengajar dan siswa yang dapat dilihat pada tabel berikut ini;

Dengan masalah yang ada dalam dunia pendidikan di Kecamatan Saparua, masih terus dilakukan pembenahan dan peningkatan mutu dengan jalan meningkatkan kemampuan tenaga-tenaga pengajar terus di upayakan oleh UPTD Pendidikan Kecamatan Saparua dengan melaukukan pembekalan dan pelatihan bagi guru-guru mata pelajaran serta melakukan studi banding ke luar daerah sebagai upaya untuk mensejajarkan pendidikan di Saparua dengan daerah-daerah lain di Maluku maupun di Luar Maluku. Dari problematika pendidikan yang dikemukakan diatas perlu dikemmukakan suatu solusi untuk mendorong peningkatan sumber daya manusia melalui sektor pendidikan di Kecamatan Saparua dengan jalan melakukan pemerataan tenaga pengajar serta pemerataan pendidikan dalam berbagai kebijakan sehingga tidak terjadi kesenjangan. Perlunya penerapan program yang terarah, sistimatis dan berkelanjutan serta

mampu menjawab berbagai masalah pendidikan yang dihadapi.

c. Ekonomi

Pertumbuhan perekonomian masyarakat di Saparua lebih cenderung di bertumpu pada sektor pertanian dan perikanan, walaupun disadari sungguh masih ada sebagian kecil masyarakat yang memiliki profesi yang bervariasi seperti PNS, TNI/POLRI/Pensiunan, tukang, pedagang, suwasta, buruh dan berbagai profesi yang digeluti oleh masyarakat sebagai upaya pemenuhan hidup tiap-tiap hari. Kehadiran tiga buah Bank di Kecamatan Saparua, sesungguhnya memiliki dampak yang positif dalam upaya mendorong peningkatan ekonomi masyarakat melalui bantuan-bantuan modal untuk pengembangan usaha dan meningkatkan sirkulasi uang di Kecamatan Saparua.

Namun pada sisi lain akan berdampak yang kurang baik, jika bantuan-bantuan modal tersebut tidak dikelola secara optimal, untuk itu diperlukannya pemahaman dan sosialisasi mengenai kewirausahaan dari Pemerintah dan instansi terkait sehingga mampu memberikan kontribusi yang positif dalam mendorong perekonomian masyarakat. Dari data yang diperoleh tingkat penggunaan modal dari Bank untuk usaha kecil dan menengah terus mengalami peningkatan walau jumlahnya masih relatif sedikit jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Saparua, selain itu

peningkatan juga terjadi pada keinginan masyarakat untuk menyimpan uang di Bank.

Dari data yang diperoleh Kecamatan Saaparua Memiliki lahan potensial seluas 9935,5 Ha, dari jumla tersebut lahan yang sudah diolah 7779 Ha sedangkan yang belum terolah 1600,5 Ha. Dalam bidanng peternakan umumnya masyarakat masih mengembangkan peternakan yang bersifat tradisional sehingga beleum mampu memberikan kontribusi yang terlalu signifikan bagi peningkatan ekonomi kerakyatan. Dari sektor perkebuanan lebih didominasi pada tanaman cengkih dan pala yang telah dikembangkan oleh sejak dulu. Orientasi masyarakat lebih cenderung mempertahankan pola-pola tradisional baik dalam pengelolaan maupun pemanfaatan hasilnya.

Sektor perikanan merupakan salah satu sektor yang menjadi andalan dalam menopang perekonomian masyarakat khususnya yang masyarakat dengan profesi sebagai nelayan. Potensi perikanan dan kelauatan di Maluku secara umum masih memberikan jaminan yang begitu besar. Potensi yang begitu besar dari sektor perikanan sesungguhnya akan bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah jika dikelola secara optimal dengan cara-cara yang profesional seperti penyediaan kolstor sebagai tempat penampung ikan yang melibatkan infestor. Realitas kehidupan masyarakat nelayan di Saparua kurang berkembang dikarenakan tigkat pemasaran hasil tangkapan yang hanya dijadikan sebagai

pemenuhan konsumsi masyarakat tiap hari. Pada sisi lain bantuan-bantuan pemberdayaan bagi masyarakat nelayan dari Pemerintah Daerah sangat dirasakan kurang dan terkadang salah sasaran karena faktor subjektifitas dalam memberikan bantuan. Untuk itu diperlukannya perhatian dan partisipasi semua pihak dalam mendorong peningkatan ekonomi kerakyatan dari sektor perikanan.

d. Sosial

Kehidupan masyarakat Saparua tidak terlepas dari upaya pemenuhan hidup sehari-hari. Tingkat kehidupan masyarakat sangat tergantung dari profesi yang dijalani, sebagaimana yang telah dijelaskan awal untuk pemenuhan kehidupan tiap hari. Dari data yang diperoleh masih dapat dijumpai masyarakat yang hidup dalam kategori pra sejahtera dalam tabel berikut ini;

jumlah penduduk yang masih hidup dalam kategori pra sejahtera, hal ini mesti menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintah dan instansi terkait untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Saparua. Berbagai hal yang dapat dijadikan sebagai argumentasi tingginya kehidupan masyarakat yang hidup dalam kategori pra sejahtera yang coba diuraikan dalam penulisan ini antara lain;

1. Orientasi kehidupan masyarakat masih banyak bergantung pada alam tanpa ada upaya untuk keluar dari berbagai bentuk kehidupan (tradisi masa lalu),

sehingga untuk itu perlu dilakukan upaya untuk merubah pola hidup dan orientasi hidup masyarakat.

2. Pengelolaan potensi alam yang belum maksimal. Kecenderungan ini menimbulkan rasa malas serta kebiasaan hidup yang cenderung berfoya-foya (budaya amtenar).
3. Masih kurangnya perhatian dan partisipasi pemerintah untuk mendorong peningkatan kesejahteraan yang disesuaikan dengan potensi yang dimiliki.

BAB III

PAPALELE SEBAGAI POTRET PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUAGA

A. Pasar Sebagai Pusat Aktivitas Ekonomi

Manusia adalah makhluk yang diciptakan Tuhan dengan memiliki kelebihan yang lebih dibandingkan dengan makhluk lainnya. Perbedaan itu terutama karena manusia mempunyai akal dan pemikiran untuk melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh makhluk yang lain. Hal yang paling mendasar yang dapat dilakukan manusia itu adalah menciptakan suatu kebudayaan. Kebudayaan inilah yang menyebabkan manusia dapat disebut sebagai makhluk yang paling mulia karena diciptakan melalui hasil karsa dan cipta manusia dengan menggunakan otak (rasionalitas) yang pada dasarnya tidak dimiliki oleh makhluk manapun di muka bumi ini. Dalam konteks yang lain menyangkut kebudayaan yang merupakan hasil karya dan cipta manusia itu sendiri, kebudayaan dapat membedakan manusia itu berbeda satu dengan lainnya dalam konteks teritorial (kewilayahan).

Kebudayaan sebagai suatu konsep yang menyatu dalam kehidupan manusia selalu berhubungan dengan kebutuhan hidupnya. Kebudayaan yang merupakan seperangkat sistem pengetahuan atau sistem gagasan yang berfungsi menjadi *blue print* bagi sikap dan perilaku manusia sebagai anggota atau warga dari kesatuan sosialnya, tumbuh,

berkembang, dan berubah sesuai dengan kebutuhan hidupnya²². Untuk mempertahankan hidup dan keberadaanya manusia terus mengupayakan berbagai hal yang dapat dijadikan sebagai pegangan sandaran hidup dengan berbagai kegiatan dan aktifitas yang kemudian dapat ditermahkan sebagai budaya. Kebutuhan hidup manusia bisa saja diperoleh dengan cara memproduksi sendiri kebutuhan-kebutuhannya namun hal ini dapat diperoleh dengan jumlah atau keperluan yang terbatas. Untuk mencukupi kebutuhan yang tidak dapat diproduksi sendiri, setia individu memerlukan orang lain untuk melengkapinya. Pada proses ini muncullah suatu bentuk interaksi sosial.

Hasil interaksi sosial inilah yang kemudian melahirkan suatu sistem yang salaing berkorelasi satu dengan yang lain dan memiliki ketergantungan dan salaing melengkapi. Sebagai suatu contoh menarik yang dapat diambil dari pola kehidupan masyarakat tradisional dimasa lalu dimana terjadi proses tukar menukar barang dengan barang (barter) antara kelompok masyarakat dalam berbagai aktifitas mata pencaharian dimana hasil pertanian (kebun) ditukarkan dengan hasil laut (ikan). Pada fase ini kita dapat melihat interaksi antar masyarakat yang berlainan mata pencaharian (petani dan nelayan). Fenomena ini pula dapat dijumpai dalam kehidupan saat ini dengan cara yang lebih moderen dimana terjadi suatu

²² Untuk itu Lihat Sjafrin Sairin, dkk, Pengantar Antropologi Ekonomi 2002 hal 1.

proses transaksi antara kelompok-kelompok maupun individu dalam masyarakat pada suatu tempat yang dalam istilah ekonomi dikenal sebagai pasar²³. Uraian diatas menunjuk pada suatu pernyataan bahwa sesungguhnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat menjalani kehidupannya tanpa bantuan dan partisipasi orang lain. Pola ini kemudian menjadi mata rantai kehidupan yang tidak dapat dilepas pisahkan dalam kehidupan manusia akibat terjalannya interaksi antar personal maupun kelompok yang tersistematis dalam kontruksi budaya menyangkut pemenuhan kebutuhan hidup manusia itu sendiri.

Berawal dari sitem perekonomian subsitem kemudian mengalami perkembangan ketingkat lanjut dengan bentuk bentuk yang lebih maju, dalam hal ini apa yang disebut dengan pasar yang lebih menitik beratkan pada sisi komersil. Pasar merupakan sesuatu hal yang tidak asing bagi manusia, termasuk masyarakat Saparua. Namun dalam berbagai realitas sosial yang dijalani manusia. Pasar dapat dibedakan dan dikelompokan dalam beberapa jenis dan bentuk serta waktu tergantung pada aktiifitas yang ditimbulkan (dilakoni) berdasarkan kondisi-kondisi sosial, budaya, dan geografis suatu masyarakat. Di Indonesia dapat kita jumpai berbgagai jenis pasar pada setiap kelompok dalam setiap suku bangsa di

²³ Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli dengan menjadikan uang sebagai alat tukar yang sah.

nusantara mulai dari pasar yang masih bersifat tradisional sampai pada pasar yang sudah moderen.

Dalam perspektif sejarah peradaban kehidupan masyarakat di nusantara khususnya dalam bidang perdagangan dan perekonomian pasar sebagai pusat aktifitas (transaksi) telah terbentuk dalam kurun waktu yang cukup lama²⁴. Hal ini memberikan suatu gambaran yang sangat jelas kepada kita bahwa sesungguhnya pasar merupakan suatu tempat yang sangat penting dalam kehidupan manusia untuk menciptakan suatu kenyamanan dan keselarasan hidup diantara sesama manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan yang lain. Dalam aktifitas yang dilakoni pada suatu pasar tergambar dengan sangat jelasnya betapa manusia yang memiliki berbagai latar belakang yang berbeda saling membutuhkan satu dengan yang lain. Gambaran ini terungkap dalam perilaku ekonomi untuk saling melengkapi

²⁴ Hal ini sebagaimana yang diungkap dalam penulisan Agung Suryo.S yang menyatakan bahwa, Berdasarkan penelitian arkeologis, ternyata sistem sudah ada pada abad 8—11 Masehi dalam bentuk yang sangat sederhana. Bukti fisik adalah dengan ditemukannya prasasti yang didalamnya menyebutkan pada masa itu telah dikenal pejabat—pejabat yang mengurus pasar. Sejak zaman dulu pasar telah terbentuk. Ia terbentuk sebagai bagian dari usaha manusia memenuhi kebutuhannya. Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai kebutuhan agar tetap bisa survive. Kebutuhan itu mencakup kebutuhan primer dan sekunder. Kelebihan produksi setelah kebutuhan terpenuhi memerlukan tempat untuk penyaluran untuk dijual. Pasar adalah tempat penyaluran barang-barang tersebut. Pemenuhan untuk pemenuhan barang-barang memerlukan tempat yang praktis untuk mendapatkan barang baik dengan cara menukar maupun membeli. adanya kebutuhan dan kelebihan inilah yang mendorong timbulnya arena perdagangan tempat menukar barang dan jasa, yang disebut pasar, Agung Suryo S, Uroe Gantooe Pada Masyarakat Aceh 2007 hal 2-3.

antara penjual dan pembeli, dimana penjual memerlukan pembeli untuk menjual hasil dagangan (produksinya) maupun sebaliknya pembeli memerlukan penjual untuk memperoleh barang yang dibutuhkan (kebutuhannya). Dalam konteks ini akan tercipta suatu keseimbangan yang harmonis antara pembeli dan penjual dalam suatu proses transaksi yang diakhiri dengan proses tukar menukar barang dimana pembeli (konsumen) memberikan uang kepada penjual, sedangkan penjual (produsen) memberikan barang dagangan (hasil produksi) kepada pembeli.

Interaksi antara produsen dan konsumen akan terus berlanjut dalam kurun waktu yang tidak terbatas sepanjang saling membutuhkan satu dengan yang lain sebagai suatu realitas yang tidak dapat dihindari oleh manusia. Proses keseimbangan dalam interaksi seperti ini menimbulkan kepuasan yang kemudian mengikat satu dengan yang lainnya dalam suatu konsensus bersama antara penjual dan pembeli. Untuk mencapai suatu proses transaksi yang dilakukan oleh para pembeli dan para penjual sesungguhnya telah terbangun suatu kegiatan (aktifitas) yang terlebih dahulu memfasilitasi transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli di pasar melalui aktifitas jasa yang dilakoni oleh orang lain, baik kepada pembeli maupun penjual berupa jasa produksi, transportasi²⁵.

²⁵ Sebagaimana yang dijelaskan oleh Agung Suryo S, Uroe Gantoe Pada Masyarakat Aceh 2007 hal 3 berikut ini, Selain itu, pasar dapat dilihat sebagai suatu sistem yang

Pada prinsipnya pasar merupakan tempat para penjual dan pembeli bertemu. Apa bila proses dipasar telah terselenggara (dalam artian bahwa penjual dan pembeli telah bertemu serta barang-barang kebutuhan telah terdisbusikan) maka peran pasar akan tampak bukan hanya sebagai pusat ekonomi, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial budaya. Dengan kata lain pasar dapat dijadikan sebagai suatu laboratorium ilmu-ilmu sosial yang memiliki kemampuan untuk menguji berabagai teori maupun argumentasi serta melakukan berbagai kajian yang terjadi menyangkut pasar dan semua kejadian yang terjadi didalamnya. Hal inilah yang kemudian menjadi menarik untuk diteliti dan dikaji secara mendalam oleh para ilmuwan untuk merumuskan berbagai kajian-kajiann baru dalam prilaku manusia denngan mennjadikan pasar sebagai objek kajiannya. Dari berbagai uraian diatas tergambar dengan sanngat jelasnya bahwa betapa pentingnya pasar dalam kehidupan manusia, tidak hanya sebagai suatu tempat yang mendorong terjalinya transaksi jual beli antara penjual dan pembeli melainkan pasar dapat membentuk suatu solidaritas timbal balik yang bersifat mengikat semua orang yang ada

merupakan suatu kesatuan dari komponen-komponen yang memiliki fungsi untuk mendukung fungsi utama secara keseluruhan. Dengan demikian, sistem pasar akan tampak sebagai suatu kesatuan yang *koheren* sehingga terjadi suatu ketergantungan diantara masing-masing komponen/unsurnya (produksi, distribusi, transportasi, transaksi dan sebagainya).

didalamnya dan tidak terbatas pada pembeli dan penjual semata.

B. Pasar Pulu Dalam Kebudayaan Masyarakat Saparua Sebagai Penunjang Perekonomian dan Pemenuhan Pangan

Seperti telah dijelaskan pada bahagian awal bahwa sesungguhnya pasar merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat dan telah ada dalam kehidupan masyarakat di nusantara sejak dulu kala dengan berbagai tinggalan-tinggalan arkeologis sebagaimana yang telah dijelaskan awal. Namun yang mesti dipahami secara baik ialah keberadaan pasar dan waktu pada setiap kelompok masyarakat di nusantara adalah berbeda. Hal ini dikarenakan keberadaan pasar pada dasarnya terbentuk dalam suatu kehidupan masyarakat yang masih bersifat tradisional. Sehingga pertumbuhan pasar dalam kehidupan masyarakat setempat merupakan suatu bagian yang masih terikat dalam pola dan aktifitas tradisional itu sendiri. Dengan kata lain pasar yang dapat kita jumpai dalam kehidupan masyarakat tersebut adalah pasar tradisional. Jika dilihat dari fungsinya pasar tradisional memiliki kesamaan dengan pasar moderen, dimana merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Namun pada sisi yang lain pasar moderen dan pasar tradisional memiliki perbedaan pada beberapa hal yang sangat mendasar dalam ciri-ciri pasar itu sendiri antara lain:

a. Pasar Tradisional

Proses munculnya pada umumnya tidak dalam suatu perencanaan (tidak direncanakan).

Lokasi pasar tidak beraturan dan tidak tertata (bisa disembarang tempat) serta tidak ada pengawasan yang jelas.

Kondisi pasar biasanya terbuka, dan bukan hanya fisiknya tetapi juga dalam artian sosial (bagi orang lain yang ingin berjualan tanpa harus mengikuti suatu mekanisme yang telah ditentukan).

Aktivitas pasar biasanya dilakukan dalam kurun waktu tertentu saja (hari-hari tertentu)

Biasanya aktivitasnya berlangsung dengan tingkat keramaian pada waktu-waktu tertentu.

Pelaku Pasar terdiri dari komunitas tertentu (homogen)

b. Pasar moderen

Terbentuknya dilakukan dengan cara yang direncanakan secara baik dan benar baik oleh pemerintah maupun dalam melibatkan masyarakat setempat.

Lokasinya teratur dan tertata serta mendapat pengawasan yang jelas.

Kondisi pasar tertutup baik secara fisik maupun sosialnya yang membatasi dan tidak menerima orang lain untuk melakukan aktivitas yang sama.

Aktifitasnya pasar biasanya dilakukan setiap hari (permanen).

Tingkat keramaian berlangsung setiap waktu (permanen).

Pelaku pasar terdiri dari berbagai komunitas (heterogen).

Dilihat dari cirinya maka dalam interaksi sosial yang dilakukan oleh pelaku-pelaku pasar tradisional dan pasar moderen memiliki ciri terbuka dan tertutup, dimana pasar tradisional hanya mengakomodir suatu masyarakat (suku) tertentu sedangkan pasar moderen mengakomodir berbagai lapisan masyarakat (berbagai suku). Dengan demikian interaksi sosial pada pasar-pasar moderen tak jarang menimbulkan perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat tertentu. Hal ini ditimbulkan oleh pertemuan kebudayaan-kebudayaan yang berbeda yang kemudian dapat mempengaruhi satu terhadap yang lain. Pada kondisi ini masyarakat (individu) yang memiliki ketahanan akar budaya yang kuatlah yang mampu mempertahankan identitas sosialnya. Namun perilaku ini jarang dijumpai dalam kehidupan masyarakat perkotaan yang pada dasarnya telah dipengaruhi oleh budaya moderen sehingga wujud kebudayaan aslinya sukar untuk dijumpai²⁶.

²⁶ Sebagaimana yang di ungkap dalam tulisan Agung. Suryo. S dalam Ureo Gantoe Pada Masyarakat Aceh 2007 hal 3 yang menjelaskan bahwa, pasar dilambangkan

Terbentuknya suatu pasar pada suatu komunitas atau lokasi pada dasarnya memiliki berbagai latar belakang yang cukup kuat. Salah satu hal yang sama juga dijumpai pada masyarakat di Kepulauan Lease²⁷ dan Saparua secara khusus. Secara umum interaksi perdagangan (jual dan beli) antara pedagang dan penjual di Kepulauan Lease terjadi pada waktu-waktu tertentu yang dalam pengistilaan masyarakat disebut dengan istilah ***pasar pulu***²⁸. Namun pada sisi lain hampir di setiap negeri di telah terdapat pasarnya masing-masing dengan intensitas perdagangan dalam skop yang kecil (terbatas pada interaksi jual beli barang-barang pemenuhan hidup untuk dikonsumsi tiap hari seperti ikan, sayur, sugu

sebagai pintu gerbang yang menghubungkan suatu kelompok masyarakat dengan kebudayaan tertentu dengan kelompok masyarakat lain dengan kebudayaan yang berbeda-beda. Di kota-kota besar yang komposisi penduduknya cenderung heterogen, pasar merupakan arena interaksi yang menunjukkan ciri heterogenitas tersebut. Tanpa disadari disitu telah terjadi kontak-kontak budaya yang berbeda. Besar kemungkinan kontak budaya tersebut membawa perubahan-perubahan kebudayaan beserta nilai-nilai budaya yang terkandung didalamnya.

²⁷ Lease adalah nama yang diberikan untuk menamai ketiga buah pulau yaitu Pulau Haruku, Pulau Saparua dan Pulau Nusalaut yang pada mulanya disebut dengan istilah uliase. Sedangkan istilah Saparua merupakan nama yang diberikan untuk menamai salah satu pulau yang ada dalam gugusan Kepulauan Lease. Istilah ini berkaitan dengan bentuk pulau tersebut yang mirip dengan dua uah perahu yang terapung sehingga disebut sampanrua. Namun istilah ini mengalami perubahan dalam dialektika setempat menjadi Saparua yang hingga kini dipakai untuk menamai pulau tersebut. untuk itu lihat Stenli.R Loupatty, Saparua Dalam Dimensi Masa Lalu dan Konteks Masa Kini 2012 hal 3.

²⁸ Pasar pulu merupakan suatu aktifitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat Lease (para penjual dan pembeli) di kepulauan Lease pada waktu-waktu tertentu biasanya pada hari rabu dan sabtu yang dikenal dengan istilah hari pasar bagi masyarakat di Kepulauan Lease.

manta dan bahan lainya yang diperlukan). Sedangkan untuk mendapatkan keperluan yang lebih umum untuk keperluan rumah tangga lainya bisanya dipenuhi pada saat hari pasar (Rabu dan Sabtu).

Pasar pulu yang terbentuk hingga sekarang ini merupakan suatu warisan masa lalu yang diperkirakan telah ada sejak masa pemerintahan Belanda menanamkan kekuasaannya di Kepulauan Lease²⁹, walau sesungguhnya sejak dulu (sebelum kedatangan bangsa Belanda) telah ada transaksi barter antar masyarakat yang dilakukan antar pulau maupun negeri. Namun transaksi ini berlangsung berpindah-pindah tempat dan tidak berlaku permanen seperti yang di tetapkan pada masa Belanda. Pasar pulu awalnya dijadikan sebagai tempat dan waktu untuk rakyat menjual hasil-hasil alamnya kepada Belanda berupa rempah-rempah (cengkih dan pala), sehingga dapat diawasi dengan mudah oleh pihak penjajah, disisi lain rakyat di Kepulauan Lease dapat membelanjakan barang-barang yang diperlukan untuk keperluan rumah tangga dan perlengkapan lainya yang diperlukan sebagai penunjang kebutuhan hidup.

Secara geografis ketiga pulau di Kepulauan Lease dihubungkan dengan laut, sehingga untuk menjangkau tempat atau pusat aktifitas pasar pulu di Saparua, masyarakat yang ada di pulau lain (Haruku, Nusalaut dan Seram) harus

²⁹ Wawancara dengan Bapak Tjia Pattinasarany 87 tahun, salah satu pelaku pasar pulu yang hendak mengantar hasil produksi (pencahariannya) untuk di jual pada saat hari pasar , 4 Mei 2012.

menggunakan transportasi laut (perahu, orambai, ruruhe dan alat transportasi lainnya). Sedangkan bagi masyarakat yang ada di negeri-negeri di Pulau Saparua lebih banyak menempuh perjalanan dengan menggunakan cara berjalan.

Sebelum menggunakan transportasi moderen waktu yang digunakan untuk menempuh perjalanan biasanya memakan waktu dua hingga tiga jam, tergantung barang yang dibawah untuk diijakan. Sedangkan untuk masyarakat di pulau-pulau yang lain (Haruku dan Nusalaut menempuh perjalanan dengan waktu tempuh tiga hingga empat jam. dan Pada aspek ini sesungguhnya laut dijadikan sebagai medium yang pemersatu (penghubung) Kepulauan Lease.

Hal ini kemudian mempertautkan antara dua corak kebudayaan laut yang berbeda yaitu corak kebudayaan agraris (pertanian) dan corak kebudayaan maritim yang sesungguhnya bermuara pada perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini menunjukan suatu keunikan yang dimiliki oleh masyarakat di Kepulauan Lease dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Aktifitas ini sesungguhnya dapat dipahami sebagai suatu perilaku ekonomi namun pada sisi lain dapat dipahami sebagai suatu perilaku budaya yang lahir dari panggilan untuk mempertahankan eksistensinya sebagai makhluk yang beradap dan berakal.

Untuk melakukan kegiatan pemenuhan hidup baik di laut maupun didarat masyarakat di Kepulauan Lease pada

awalnya cenderung menggunakan alat-alat yang masih bersifat tradisional serta berasal dari alam.

Mekanisme inilah yang hingga kini masih dapat dijumpai dalam kehidupan masyarakat Lease dalam upaya mempertahankan kehidupannya, namun dalam dimensi yang lain telah terjadi perubahan sosial yang cukup mendasar dalam berbagai pola perilaku baik untuk corak kehidupan agraris maupun corak kehidupan maritim yang sesungguhnya masih berda dalam suatu tujuan dan fungsi yang sama, namun dibedakan melalui suatu perilaku manusia dengan menggunakan berbagai alat produksi dan transportasi yang berbeda (alat-alat yang lebih moderen dan dianggap memberikan kemudahan, memperpendek waktu kerja serta menunjang hasil produksi. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai perkembangan dan kemajuan yang di capai saat ini, Senada dengan itu berikut pemikiran perkembangan konsep kemajuan oleh Lasch 1991:43 dan Robert Nisbet (1980:10-46)³⁰. Perubahan sosial yang diakibatkan oleh kemujan

³⁰ Dalam Pieotr Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial 2010 hal 23-23 yang menyatakan bahwa, menurut pendapat umum (*common sence*), konsep kemajuan membuktikan kebenaran diirinya sendiri. Konsep ini biasanya kita annggap benar karena pemakaiannya sudah sedemikian meluas dan mempunyai arti yang jelas pula. Tapi kenyataanannya, konsep kemajuan ini telah dikembangkan selama berabad-abad. Isinya telah diperkaya secara bertahap dan baru belakangan ini saja mendapatkan maknanya yang kompleks. Konsep ini berasal dari masa silam dan sejak lahir sudah sangat besar pengaruhnya. Christopher Dawson menyebutnya sebagai “keyakinan berfikir peradaban kita”. Pada sisi lain Robert Nisbet mengatakan dalam peradaban barat selama hampir tiga ribu tahun belum pernah ada pemikiiran yang lebih penting dari pada pemikiran tentang kemajuan.(1980:4). Penjelasan tentang riwayat peran konsep kemajuan ini terlihat

seyogiyanya menuju pada suatu kesempurnaan hidup manusia itu sendiri. Hal ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk lebih banyak melakukan hal-hal yang bermanfaat dengan folome dan jumlah yang lebih besar.

Pasar pulu dijadikan sebagai sarana untuk memperoleh bahan-bahan dasar keperluan maupun bahan-bahan penunjang kehidupan rumah tangga lainnya serta sarana untuk mendistribusiakan hasil produksi dan pencaharian yang diperoleh. Sejalan dengan keberadaannya pasar pulu di

dalam ciri-ciri fundamental kondisi kehidupan manusia: adanya jurang abadi antara kenyataan dan harapan, antara kehidupan nyata dan mimpi-mimpi. Ketegangan abadi antara apa yang dimiliki dan apa yang ingin dimiliki, antara apa yang ada dan apa yang diinginkan manusia, tampaknya merupakan motif utama dari upaya dan perjuangan yang tak pernah selesai. Konsep kemajuan meredakan ketegangan abadi ini dengan memproyeksikan harapan kehidupan yang lebih baik ke masa depan dan menegaskan bahwa kehidupan yang lebih baik itu pasti akan tiba atau sekuurangnya ada kemungkinan akan tiba. Dalam hal ini konsep kemajuan memenuhi sebagai kebutuhan universal manusia dan karena itu meski semua orang meragukan dan bersikap skeptis, namun agaknya sudah ditakdirkan mempengaruhi alam pemikiran kita sejak lama. Seperti dikatakan Sidney Pollart yang menyatakan *kini dua yakin terhadap kemajuan karena ia adalah satu-satunya peluang keyakinan ditengah-tengah keputusan*. Akar pertama konsep kemajuan ini terdapat di zaman Yunani kuno yang membayangkan dunia dalam proses pertumbuhan; potensinya berkembang secara bertahap melalui tahap-tahap (epos) tertentu dan menghasilkan kemajuan serta keadaan yang semakin baik. Plato (427-347SM) dalam karyanya, *Laws* membuat analisis tentang peningkatan organisasi sosial yang berasal dari bibit awal lalu berkembang menuju bentuk yang semakin sempurna. Aristoteles (384-322 SM) dalam karyanya *politics* merunut perkembangan politik sejak Yunani (polis) yang digambarkannya sebagai tatanan politik yang ideal. Protagoras (481-411SM) menyediakan uraian rinci tentang kemajuan kultur mulai dari keadaan Barbar hingga peradaban maju. Dalam ketiga karya pemikir Yunani di atas terdapat asumsi kuat tentang kemampuan manusia untuk semakin menyempurnakan kehidupan di dunia ini termasuk aspek sosial, politik dan kulturenya (Nisbet 1980:10-46)

Saparua dapat digolongkan dalam bentuk pasar tradisional berdasarkan kondisi riilnya. Pelaku pasar tradisional adalah para pedagang yang biasanya juga menjadi pemilik dan pekerja. Pada pedagang umumnya belum memiliki pekerja yang khusus dibayar untuk menjadi penunggu barang dagangannya. Biasanya dalam melakoni pekerjaan dipasar para pelaku pasar (penjual) menggunakan keluarga atau kerabatnya untuk membantu (anak, Istri, ponakan maupun suami dan orang lain yang masih memiliki ikatan pertalian darah). Pelaku-pelaku dalam pasar tradisional termasuk pedagangnya juga tidak selalu tetap karena sebagian dari mereka memang bukan orang-orang yang hidup sepenuhnya berdagang. Mereka ini kadang-kadang muncul berjualan, kadang-kadang tidak karena pada dasarnya mereka memiliki pekerjaan lain sebagai petani, nelayan, ibu rumah tangga, sehingga waktu untuk melaksanakan aktifitas di pasar disesuaikan dengan hasil yang diperoleh.

Dengan motivasi menjual hasil yang diperoleh melalui mata pencaharian (petani dan nelayan) maupun hasil-hasil produksi lainnya masyarakat kemudian membelanjakan barang-barang yang diperlukan untuk kepentingan rumah tangga seperti membelanjakan beras, ikan minyak tanah, minyak kelapa, terigu, semen, besi dan berbagai peralatan maupun kebutuhan rumah tangga lainnya. Dalam aktifitas yang dilakukan pada hari pasar, biasanya para petani dan nelayan membawa barang-barang yang dapat dijual, bahkan tidak

hanya bahan-bahan yang dikonsumsi tiap hari semata tetapi juga barang-barang yang memiliki nilai ekspor seperti cengkih, pala, kopra, lola, teripang dan hasil-hasil alam lainnya. Biasanya untuk menjual barang-barang yang memiliki nilai ekspor masyarakat menjualnya pada pengusaha-pengusaha yang bermodal (etnis Tionghoa) dengan harga yang telah ditetapkan. Biasanya penjualan barang-barang yang akan diekspor tersebut dibeli dengan harga dibawah pasaran dengan mempertimbangkan perongkosan untuk mengekspor hasil-hasil alam tersebut, masa waktu pengiriman (ditampung) yang cukup lama sehingga menghindari penyusutan dan berdampak pada penurunan nilai jual di pasaran oleh pengusaha serta faktor keuntungan yang ingin dicapai pengusaha tersebut.

Proses transaksi jual beli antara masyarakat dengan pengusaha yang membelikan hasil alam tersebut biasanya terjadi pada hari pasar (hari Rabu dan hari Sabtu) dengan tujuan seperti yang dijelaskan awal. Fenomena ini menjadi suatu realitas yang hingga kini masih dijumpai dalam kehidupan masyarakat di Kepulauan Lease. Walaupun disadari sungguh telah banyak terjadi perubahan sosial sebagai dampak dari suatu perkembangan (modernisasi). Pada konteks inilah pasar pulu menjadi setidaknya untuk menjembatani pemenuhan kebutuhan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan pangan bagi kehidupan masyarakat di Kepulauan Lease dan sekitarnya sebagai suatu upaya manusia

yang memiliki hakekat hidup serta tingkat ekonomi yang lebih baik dengan memanfaatkan berbagai potensi yang ada dilingkungan sekitar. Sama halnya dengan keberadaan pasar tradisional lainnya di nusantara pasar pulu di Saparua sebagai suatu pasar tradisional turut menampilkan berbagai unsur kebudayaan yang cenderung menonjolkan aspek kebudayaan lokal dengan menngedepankan aspek ekonomi sebagai sesuatu yang sangat diprioritaskan³¹.

Sebagai suatu pasar tradisional, pasar pulu di Saparua memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan dengan pasar tradisional yang ada di Kecamatan Teon Nila Serua (TNS) sebagaimana yang diungkapkan oleh J. Pattikayhattu dkk³², sesungguhnya intensitas waktu pelaksanaan hari pasar tersebut berlangsung dua kali dalam seminggu, dimana pada

³¹ Sebagai bagian dari kebudayaan, pasar tradisional dengan sendirinya mencerminkan atau memperlihatkan budaya-budaya tertentu dari masyarakatnya. Salah satunya adalah bagian dari ekonomi rakyat dimana proses produksi, distribusi dan konsumsi berbagai jenis komoditi, tidak ditujukan untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya tetapi lebih ditujukan untuk sekedar dapat memenuhi kebutuhan dasar bagi hidup layak, Heddy Shri Ahimsa Putar, Eksistensi dan Fungsi Pasar tradisional di Tengah Globalisasi, Sketsa Pemikiran Antropologis, makalah pada seminar pasar tradisional di Ambon September 2005:5.

³² Hari pasar pada di pasar TNS dilakukan dua kali seminggu pada hari Selasa dan Kamis. Hampir semua pedagang kaki lima menjual hasil-hasil kebun mereka seperti kasbi (singkong), pepaya, jantung pisang dan sebagainya. Aktivitas dimulai pukul 06.30 pagi hingga pukul 12.00 siang. Para pedagang umumnya telah mempersiapkan barang dagangannya sejak sore hari. Hasil-hasil kebun yang akan dijual dimasukkan kedalam karung atau baskom plastik yang besar; selanjutnya didistribusikan ke pasar dengan menggunakan angkot dan motor. Demikian pula dengan para pedagang makanan jadi atau kue-kue tradisional. J. Pattikayhattu dkk, Pasar Tradisional Masyarakat Pulau Seram di Kecamatan TNS dan Amahei Kabupaten Maluku Tengah 2005 hal 28-29.

pasar pulu di Saparua hari berlangsungnya pasar biasanya pada hari Rabu dan hari Sabtu sedangkan untuk hari pasar di pasar tradisional di TNS biasanya dilaksanakan pada hari Selasa dan Kamis barang-barang yang di perjual belikan merupakan hasil pertanian dan hasil produksi dalam rumah tangga, waktu berlangsungnya pasar pada waktu pagi dan siang hari.

Sedangkan perbedaannya terletak pada bagaimana proses transportasi dimana pasar pulu di pulau Saparua menggunakan transportasi laut dan darat karena melibatkan pulau-pulau yang ada di Kepulauan Lease, serta lokasinya yang tidak berada pada satu lokasi yang ada melainkan tersebar pada setiap emperan pertokoan dan jalan. Sedangkan pasar tradisional di TNS hanya menggunakan transportasi darat, hal ini dikarenakan oleh kondisi geografis serta pelaku pasar yang hanya berada di dalam teritorial yang masih satu pulau (Pulau Sesaram) serta terpusat pada lokasi pasar yang telah disediakan oleh pemerintah. Hal yang berbeda dengan pasar tradisional di Kecamatan Amahei dimana kegiatan perbelanjaan berlangsung setiap hari mulai dari pagi hingga siang hari. Namun hampir sebagian besar hasil yang di jual belikan diperoleh dari tempat lain (bukan hasil pertanian rakyat).

C. Saparua Sebagai Sentra Ekonomi

Berbicara mengenai pasar pulu di Kepulauan Lease tidak dapat dilepas pisahkan dengan eksistensi Pulau Saparua sebagai tempat terselenggaranya kegiatan pasar pulu

tersebut. Hal ini berkaitan dengan sejarah masa lalu, yang diawali dengan kehadiran bangsa Belanda di Maluku. Dalam melaksanakan berbagai kebijakan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya di Maluku, Belanda membentuk berbagai pusat-pusat pemerintahan untuk melaksanakan kebijakan politik monopoli terhadap berbagai hasil alam yang ada di Maluku (khususnya cengkih dan pala). Dalam sejarah pendudukan Bangsa Belanda di Maluku, nama Pulau Saparua merupakan sesuatu yang tidak dapat dilepaspisahkan.

Pulau ini dijadikan sebagai salah satu pusat pemerintahan Belanda dalam melakukan berbagai kebijakan ekonomi, politik dan militernya. Selain sebagai pusat pemerintahan Saparua dijadikan sebagai suatu pusat perdagangan rempah-rempah dan lumbung (tempat penampungan rempah-rempah). Setiap penyerahan wajib (upetih) dari setiap negeri di Lease dan Seram biasanya diserahkan pada perwakilan pemerintah Belanda yang pada saat itu berkedudukan di Saparua. Selain penyerahan wajib (upetih) yang diserahkan kepada Belanda terdapat pula sejumlah kewajiban-kewajiban yang wajib diikuti rakyat diantaranya penjualan rempah-rempah hanya kepada pemerintah Belanda dan bukan pada saudagar-saudagar (pedagang-pedagang) nusantara (dari Timur Asia) dan Saparua dijadikan sebagai pusat dari berbagai transaksi perdagangan dalam kebijakan-kebijakan Belanda.

Kebijakan Pemerintah Hindia Belanda di Kepulauan Lease dan sebagian wilayah Pulau Seram saat itu turut membentuk Pulau Saparua sebagai suatu pusat pemerintahan dan eksistensinya sebagai suatu pusat perdagangan. Kebijakan Pemerintah Belanda saat itu turut memberikan andil dalam meletakkan dasar-dasar perdagangan dan perekonomian saat itu bagi masyarakat di Kepulauan Lease. Sesungguhnya bukan pihak Belanda saja yang memperoleh keuntungan melainkan dengan sendirinya terbentuk suatu pusat perdagangan dan perekonomian yang turut memberikan kontribusi bagi perekonomian rakyat Lease. Dengan kebijakan transaksi jual beli rempah-rempah dua kali dalam seminggu dengan hari yang telah ditetapkan (Rabu dan Sabtu) maka dengan sendirinya terbentuklah suatu pusat perdagangan yang dibawah pengawasan Pemerintah Hindia Belanda. Sejak itulah pasar pulu mulai terbentuk, dengan aktifitas awalnya ialah penjualan rempah-rempah (cengkih dan pala) milik perkebunan rakyat yang lambat laun juga terjadi interaksi perdagangan berupa hasil-hasil pertanian dan hasil laut (alam) yang tidak terbatas pada jual beli rempah-rempah semata (cengkih dan pala). Aktifitas ini terus berjalan dalam putaran waktu dan menjadikan Pulau Saparua sebagai suatu sentra ekonomi masyarakat di Kepulauan Lease dan sebagian di Pulau Seram yang turut terlibat dalam perdagangan lokal tersebut hingga sekarang ini.

Perdagangan yang diawali dengan kebijakan Pihak Kolonial untuk memperoleh keuntungan lewat kebijakan-kebijakan monopoli perdagangan rempah-rempah melahirkan suatu interaksi perdagangan lokal dengan menjadikan Saparua sebagai basis (pusat) aktifitas perdagangan tersebut. Saparua dijadikan masyarakat sebagai tempat untuk menjual dan membeli keperluan bahan-bahan pokok rumah tangga juga kebutuhan-kebutuhan lain yang tidak dapat dijangkau di tempat asal mereka (negerinya). Pada konteks ini Saparua dapat dikatakan sebagai sentra ekonomi masyarakat Lease pada saat itu. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan yang patut dijawab ialah bagaimana kedudukan Pulau Saparua sebagai pusat perdagangan di Kepulauan Lease setelah rempah-rempah (cengkih dan pala) tidak menjadi perhatian dalam perdagangan dunia dan konteks masyarakat saat ini?. Terbentuk atas kebijakan Belanda tidak semata-merta aktifitas perdagangan yang terbentuk lewat kebijakan Kolonial tersebut hilang dalam perilaku masyarakat.

Setelah rempah-rempah tidak lagi menjadi komoditi andalan dalam perdagangan lokal yang terjadi di Kepulauan Lease terus berjalan sebagai suatu upaya masyarakat Lease dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dinamika pasar kemudian lebih didominasi oleh kegiatan-kegiatan produksi dan transaksi jual beli kebutuhan-kebutuhan pokok dan hasil-hasil pertanian, perikanan, perkebunan dan hasil alam lainnya. Proses ini (Perdagangan) terus berjalan hingga sekarang ini

walaupun tidak seperti sediaan kala, dimana sebagai besar negeri-negeri di Pulau Haruku lebih banyak memilih untuk melakukan transaksi perdagangan dengan pusat-pusat modernisasi (Ibu Kota Provinsi/Kota Ambon).

Hal ini dikarenakan akses transportasi yang lebih mudah dan harga beli yang murah. Pada sisi lain tingkat penyerapan hasil-hasil pertanian dan perikanan jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan pasar pulu di Saparua yang hanya melibatkan masyarakat dalam tiga Kecamatan di kepulauan Lease yang hampir semuanya memiliki mata pencaharian yang sama (petani dan nelayan). Namun pada sisi lain fungsi Saparua sebagai sentra ekonomi masih dirasakan bagi sebagian Negeri di Pulau Haruku dan Pulau Nusalaut secara umum dan sebagaimana di Pulau Seram yang hingga kini masih memiliki ketergantungan dengan aktifitas hari pasar di Saparua untuk memperoleh kebutuhan pokok dan kebutuhan-kebutuhan rumah tangga lainnya yang tidak dapat dijangkau dengan potensi alam yang dimiliki (tidak dapat diproduksi). Dengan kata lain Saparua menjadi pusat interaksi jual beli para pedagang lokal yang hampir mencakup seluruh masyarakat di Kepulauan Lease.

Dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup tiap hari Interaksi pada pasar tradisional sesungguhnya berlangsung tiap hari, namun dalam intensitas yang sangat terbatas jika dibandingkan dengan pelaksanaan hari pasar (pasar pulu). Pada konteks ini pasar tetap memainkan fungsi dan perannya

sebagai sarana transaksi jual beli yang terus diupayakan oleh manusia dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup rumah tangga. Dalam dimensi inilah pasar tradisional di Saparua memiliki dua fungsi yang sesungguhnya sama dalam ruang dan skop yang berbeda, dimana fungsi pasar sebagai tempat pertemuan penjual dan pembeli hanya untuk masyarakat Saparua (antar negeri di Saparua) dan pasar sebagai tempat pertemuan antara penjual dan pembeli yang terjadi antar kelompok masyarakat yang berbeda wilayah atau antar pulau (Saparua, Nusalau, Haruku dan Seram).

D. Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Rakyat

Ekonomi kerakyatan dan ekonomi rakyat akhir-akhir ini semakin sering diperbincangkan. Perbincangan tidak hanya berlangsung di media masa atau ruang-ruang diskusi dan seminar, tetapi berlangsung pula diberbagai forum lainnya ditengah-tengah masyarakat. Dalam keberadaan perekonomian dunia yang kian terus diperbincangkan dalam ruang-ruang publik saat ini, terselip perdebatan yang menarik dalam perekonomian Indonesia apa yang disebut dengan kedua hal diatas (ekonomi kerakyatan dan ekonomi rakyat). Walau sering kali dipercakapkan namun jika dipahami secara baik perbincangan tersebut masih dijumpai kesalahpahaman dalam memahami apa yang dimaksud dengan ekonomi kerakyatan³³.

³³ Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Revrisond Baswir dalam bukunya Manifesto Ekonomi Kerakyatan 2009, hal 2, yang mengungkap tiga hal yang

Pada umumnya jenis-jenis usaha produktif yang dikembangkan oleh masyarakat memiliki korelasi yang erat dengan potensi ekonomi yang ada di sekelilingnya³⁴. pertumbuhan usaha produktif yang diupayakan oleh masyarakat sesungguhnya berlangsung secara alamiah, berdasarkan prinsip-prinsip kemandirian serta bergantung kepada potensi alam, sumber daya manusia dan bermuara pada peluang atau pasar. Kondisi ini akan mengantarkan pandangan kita untuk menyatakan bahwa sesungguhnya usaha produktif yang diupayakan oleh masyarakat kecil dan menengah memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan apa

menimbulkan kesalahpahaman terhadap ekonomi kerakyatan yaitu, 1. Ekonomi kerakyatan cenderung dipandang sebagai gagasan baru dalam pentas ekonomi dan politik di Indonesia. 2. Ekonomi kerakyatan sering diperbincangkan tanpa mengkaitkannya secara langsung dengan cita-cita Proklamasi dan amanat konstitusi. 3. Ekonomi kerakyatan cenderung dimaknai secara tumpang tindih dengan ekonomi rakyat dan ekonomi pro rakyat.

³⁴ Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Djunedri Suripurnawan (20010) dalam Benedikta Juliantri Widi Wulandari, Penguatan Potensi Ekonomi Budaya Lokal *Studi Terhadap Petani Madu di Desa Nanga Lebayon Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat* 2008, hal 1, menyatakan bahwa potensi lokal bisa menjadi modal dan mendukung kapasitas ekonomi yang dikembangkan oleh masyarakat supaya menjadi lebih progresif, sehingga kualitas hidup menjadi lebih baik. Potensi lookal tersebut meliputi : potensi sumber daya alam, oraganisasi atau lembaga kemasyarakatan, dan modal sosio kulturral berupa hubungan dan jaringan kemasyarakatan yang mengedepankan kerukunan dan keharmonisan hidup bersama.

Menurut Laica Marzuki (1999), yang menyebutkan bahwa ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat. Sedannngan ekonomi rakyat adalah kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan, yang secara mansiri mengelola sumber daya ekonomi apapun yang dapat diusahakan atau diupayakan. Selanjutnya kegiatan atau usaha ini disebut dengan usaha kesil dan menengah (UKM) yang dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, ibid hal 1.

yang disebut dengan ekonomi kerakyatan dan ekonomi rakyat. Sehingga dapat dipahami secara baik bahwa sesungguhnya ekonomi kerakyatan merupakan suatu sistem ekonomi yang dianut oleh Bangsa Indonesia sedangkan ekonomi rakyat merupakan upaya (usaha) masyarakat (warga negara) untuk memperoleh penghidupan yang lebih baik (layak) dengan berbagai tindakan-tindakan yang memiliki tujuan ekonomis (nilai guna).

Untuk lebih memahami kedua hal ini maka kedua konsep ini perlu dirinci lebih mendalam dengan menggunakan berbagai pendekatan. Sejalan dengan itu maka penulis mencoba untuk menguraikannya secara terpisah yang diawali dengan penjelasan mengenai ekonomi kerakyatan sebagai basis penguatan ekonomi bangsa dalam skop yang lebih luas. Bila ditelusuri ke belakang, akan segera diketahui bahwa perbincangan mengenai ekonomi kerakyatan samasekali bukan hal baru bagi bangsa Indonesia. Bahkan jika dibandingkan dengan keberadaan Indonesia sebagai sebuah bangsa, perbincangan mengenai ekonomi kerakyatan ternyata sudah hadir jauh sebelum Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya sebagai suatu negara yang berdaulat serta memiliki kebebasan untuk mengatur dirinya sendiri termasuk mengatur sistem ekonominya³⁵.

³⁵ Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Rivrisond Baswir dalam Manifesto Ekonomi Kerakyatan, 2009 hal 3, yang menjelaskan bahwa latar belakang ekonomi kerakyatan tidak mungkin dapat dipisahkan dari perjuangan

Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagai bangsa yang terjajah sesungguhnya bangsa Indonesia pernah menganut watak ekonomi Kolonial sebagaimana yang diungkapkan oleh WeinStein³⁶. Pada sisi yang lain Bung Hatta lebih memusatkan perhatiannya pada struktur sosial ekonomi yang diwarisi Indonesia³⁷.

kemerdekaann yang dilakukan oleh para pendiri bangsa. Artinya walaupun perjuangan kemerdekaan dilakukan melalui perjuangan politik dan militer, tujuan utamanya secara substansial adalah untuk memerdekakan bangsa Indonesia dari penghisapan ekonomi yang dilakukan oleh pihak Kolonial. Selain ditopang oleh fakta historis bahwa yang pertama kali menjajah bangsa Indonesia adalah sebuah serikat dagang bangsa Belanda yang bernama *Verenigging Overseas Company* (VOC), hal itu juga sejalan dengan penjelasan Bung Karno mengenai hakekat kolonialisme sebagai sebuah kegiatan yang bermotif ekonomi sebagai berikut: sebagaimana tulisanya di *Harian Suluh Indonesia* (1928), *soal jajahan adalah soal rugi atau soal untung; soal ini bukan soal keseopanan atau soal kewajiban; soal ini adalah soal mencari hidup, soal buisness. Semua teori soal jajahan, baik yang mengatakan bahwa penjajahan itu terjadinya ialah oleh karena rakyat yang menjajah itu ingin melihat negeri asing,, maupun yang menngatakann bbahwa rakyat pertuanan hanya ingin mendapat kamasyuran,.....senua teori itu tak dapat mempertahankan diiri terhadap kebenaran teori yang mengajarkan bahwa soal rejeki, soal yang berdasar ekonomi, soal mencari hidup* (dalam Soekarno 1964).

³⁶ Tiga ciri watak Kolonial yang pernah dianut bangsa indoneisa, 1. Perekonomian Indonesia hanya diposisikan sebagai pemasok bahan mentah bagi industri negara-negara maju. 2. Perekonomian Indonesia cenderung dimanfaatkan sebagai pasar barang-barang jadi yang diibuat oleh negara-negara industri maju itu. 3. Perekonomian Indoneisa diandikan sebagai tempat untuk memutar kelebihan kapital yang terdapat dinegara-negara industri maju tersebut Wein Stein 1976 hal 213.

³⁷ Menurut Bung Hatta, struktur sosial ekonomii Hindia Belanda ditandai oleh terbaginya masyarakat indonesia atas tiga strata sebagai berikut, pertama, kelas atas yang makmur dihuni oleh bangsa eropa. Kedua, lapisan tengah yang menguasai perdagangan dihuni oleh warga Timur Asing dan ketiga, kelas bawah yang dihuni oleh kaum pribumi atau penduduk asli Indonesia. Sebab itu, sebagai

Dalam konstruksi sejarah yang begitu panjang sistem ekonomi kerakyatan menjadi pilihan yang idel dan tepat bagi pelaksanaan sistem ekonomi Indonesia sebagaimana yang diletakan oleh pendiri neegara ini sebagai upaya untuk menata perekonomian bangsa indonesia yang bermuara dalam pasal 33 UUD 1945, sebagaimana yang dikemukakan dalam paragraf pertama penjelasan tersebut³⁸. Berbagai ketetapan hukum yang dirumuskan oleh negara untuk membentuk suatu sistem ekonomi kerakyatan merupakan suatu koreksi terhadap berbagai ketimpangan dalam pelaksanaan sistem ekonomi dimasa Kolonial yang dianggap tidak berpihak pada rakyat pribumi (rakyat kecil).

Secara historis perbincangan mengenai ekonomi kerakyatan tidak dapat dilepas pisahkan dengan Bung Hatta sebagai seorang proklamator dan juga seorang ekonom pejuang. Bung Hatta tidak hanya meletakan dasar-dasar penyelenggaraan sebuah negara merdeka dan berdaulat berdasarkan konstitusi, melainkan turut memberikan andil yang cukup besar dalam meletakan dasar-dasar penyelenggaraan perekonomian nasional berdasarkan

koreksi terhadap struktur ekonomi Kolonial, Ekonomi Indonesia merdeka harus ditandai oleh bangkitnya rakyat banyak sebagai tuan di negeri mereka sendiri, Revrisond Baswir dalam bukunya Manifesto Ekonomi Kerakyatan 2009 hal 8-9.

³⁸ Produksi dikerjakan oleh semua dan untuk semua dibawah pimpinan atau pemilik anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Bangunan perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi, penjelasan pasal 33 UUD 1945 Republik Indoneisa sebelum dihapus..

ekonomi kerakyatan atau berdemokrasi ekonomi. Bahkan sebagai Bapak koperasi Indonesia Bung Hatta yang secara konsisten memperjuangkan tegaknya kedaulatan ekonomi rakyat dalam penyelenggaraan perekonomian Indonesia. karya-karya Bung Hatta sesungguhnya tidak semata ditunjukan lewat konsistensinya sebagai seorang Negarawan namun lebih dari pada itu ia menunjukan keberpihakannya kepada pembangunan ekonomi kerakyatan dengan berbagai buku yang ditulisnya³⁹. Upaya ini sesungguhnya merupakan bentuk keberpihakan terhadap berbagai penderitaan rakyat yang muncul pada masa penjajahan. Refleksi terhadap keberadaan perekonomian masyarakat kecil inilah yang sesungguhnya lahir dari panggilan hati untuk menolak berbagai bentuk sikap monopoli dan eksploitasi terhadap masyarakat kecil dimasa pemberlakuan sistem ekonomi Kolonial yang hanya mengejar keuntungan orang perorang maupun golongan.

Pilihan untuk membentuk ekonomi kerakyatan bukan merupakan sesuatu yang tidak beralasan melainkan didasarkan pada suatu realitas kehidupan berbangsa yang terjajah dan tereksplorasi dalam aspek ekonomi. Sehingga ekonomi kerakyatan merupakan suatu rumusan yang menghendaki perkonomian bangsa bertumpu pada kedaulatan rakyat (kedaulatan ekonomi rakyat). Peletakan sistem ekonomi kerakyatan sebagai fondasi dalam

³⁹ Untuk itu lihat Revrisond Baswir dalam Manifesto Ekonomi Kerakyatan hal 19.

membangun perekonomian bangsa sesungguhnya merupakan hal yang tepat, namun proses implementasi terhadap berbagai kebijakan kenegaraan inilah yang kemudian menimbulkan ketimpangan dan berujung pada kesenjangan sosial yang begitu besar dalam kehidupan masyarakat. Fakta kekinian membuktikan ekonomi kerakyatan merupakan suatu konsep yang ideal tanpa dibarengi dengan berbagai kebijakan yang nyata dan strategis. Hal ini kemudian menimbulkan suatu fakta kekinian terhadap perekonomian bangsa yang cenderung mengeksploitasi dan dieksploitasi.

Pada sisi lain muncul perdebatan yang cukup menarik diantara para ahli mengenai istilah ekonomi rakyat. Istilah ekonomi rakyat sesungguhnya bermuara pada suatu sikap (ektifitas) dari masyarakat untuk mempertahankan kehidupannya dengan berbagai hal yang diupayakan. Hal ini kemudian menimbulkan berbagai macam tafsiran dan pemaknaan terhadap kedua hal ini⁴⁰. Namun untuk lebih

⁴⁰ Menurut Mubyanto (2002) memilih untuk menggunakan istilah ekonomi rakyat. Menurutnya istilah ekonomi kerakyatan berkonotasi politis, karena istilah tersebut dikenalkan kembali oleh seorang konglomerat yang sangat berkuasa ditahun 1997 untuk mennggati istilah ekonomi rakyat yang tidak disukainya. Justru istilah ekonomi kerakyatan inilah yang kemudian diakomodir dalam TAP MPR, khususya TAP ekonomi kerakyatan nomor XVI/1998 dan semakin dimantapkan didalam instrumen perundang-undangan, seperti UU nomor.25/2000 tentang Propenas. Oleh karena itu, bagi Mubyarto konsep ekonomi kerakyatan menjadi seperti konsep politik yang dipaksakan dan penggunaan konsepnya punsemakin simpang siur. Dalam tulisan yang berbeda Mubyarto (2004) mengatakan bahwa istilah dan konsep yang sering didengar adalah ekonomi kerakyatan, ukan ekonomi rakyat.bahkan program pemberdayaan ditujukan untuk ekonomi kerakyatan yang sesungguhnya merupakan sistem ekonomi (seperti yang tercantum dalam

jelasnya ekonomi rakyat memiliki karakteristik yang sangat mendasar⁴¹.

Propenas, UU nomor 25/2000). Sebagai sebuah sistem ekonomi, ekonomi kerakyatan bukan untuk diberdayakan, melainkan untuk dikembangkan dandilaksanakan. Pemberdayaan seharusnya ditujukan kepada para pelaku ekonomi atau orangnya, yaitu ekonomi rakyat. Selain tokoh-tokoh diatas Dainytara (dalam fredik benu, 2002) membuat perbedaan tegas antara ekonomi rakyat dan ekonomi kerakyatan. Ekonomi rakyat adalah satuan usaha yang mendominasi ragaan perekonomian rakyat. Sedangak ekonomi kerakyatan berupa upaya memberdayakan kelompok atau satuan ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha, Benedikta Yuliantri Widi Wulandari, Penguatan Potensi Ekonomi budaya Lokal *Studi Terhadap Petani Madu Hutan di Desa Nanga Leboyan Kecamatan Selimbau, Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat* 2008 hal 5-6.

⁴¹ Ciri ekonomi rakyat sebagaimana yang diungkap oleh Bambang Ismawan, Ekonomi Rakyat: Sebuah Pengantar, Dalam Jurnanl Ekonomi Rakyat, 2002 hal 17, sebagai berikut 1. Infomalitas, artinya sebagian besar ekonomi rakyat bekerja diluar kerangka legal dan pengaturan yang ada. Kondisi ini ternyata memberi ruang bagi pengembangan ekonomi rakyat, karena upaya interfensi pemerintah kedalam sektor ekonomi rakyat justru mematikan ekonomi rakyat. Namun, informalitas ini pun menyebabkan para pelakunaya tidak dapat mengakses lembaga keuangan formal, misalnya untuk memperoleh bnatuan atau pinjaman untuk modal dan pengembangan usaha.2. mobilitas, sektor ekonomi rakyat relatif mudah dimasuki dan ditinggalkan. Apabila jenis usaha dibidang tertentu dianggap berpeluang bear, maka akan banyak yang mencoba untuk terjun kedalamnya. Sebaliknya, apabila jenis usaha tertentu diketahui terncam keberlangsungannya, maka para pelakunya akan segera berpindah kejenis usaha lain. 3. Beberapa pekerjaan dilakukan oleh satu keluarga, biasanya dalam satu keluarga, terutama yang menempati strata bawah dalam struktur sosial masyarakat akan terlibat dalam lebih dari satu jenis usaha ekonomi rakyat. Hal ini dilakuka untuk mengantisipasi ketidakpastian dan keberlanjutan jenis-jenis usaha ekonomi rakyat yang sulit diramalkan. Disisi lain, akumulasi keuntungan dari berbagai jenis usaha yang dilakukan oleh satu keluarga tersebut sangat dibuhkan untuk memenuhi berbgai kebutuhan dasar. 4. Kemandirian, sektor ekonomi rakyat yang sering dianggap “*unbankable*” dan “*high risk*” cenderung membuat berbagai pihak membatasi interaksi dengan sektor ekonomi rakyat termasuk lembaga-lembaga keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian. 5. Hubungan dengan sektor formal, sektor ekonomi rakyat memiliki hubungan yang sangat erat dengan sektor formal bahkan mendukung

E. Ekonomi Kreatif dan Industri Kreatif Sebagai Penopang Ekonomi Rakyat

Bernicara mengenai ekonomi rakyat tidak terlepas dari perilaku tiap-tiap hari dari manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan (sandang, pangan dan papan). Hal ini menjadi suatu potret sosial yang akan terus dijumpai dalam kehidupan manusia selama ia masih ada dalam usia yang produktif (masih mampu bekerja). Untuk memenuhi semuanya itu muncul berbagai perilaku yang digeluti oleh seseorang maupun kelompok yang dalam hal ini dapat disebut sebagai profesi (pekerjaan). Untuk melakukan suatu pekerjaan tentunya seseorang atau kelompok tertentu memiliki suatu alasan yang begitu kuat untuk dijalani, ada yang didasarkan pada kondisi ekonomi, ada yang didasarkan pada kondisi alam dan ada yang didasarkan pada kemampuan, keahlian atau pengetahuan serta berbagai hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menjalani pekerjaan tertentu. Namun semuanya itu merupakan upaya manusia yang bermuara pada pemenuhan kebutuhan hidup tiap-tiap hari. Hal inilah yang kemudian membentuk seseorang terhadap dunia dimana dia berada.

Tindakan dan perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menggunakan melakukan suatu pekerjaan dengan menggunakan kemampuan dan pemikirannya dengan menyesuaikan pada alam sekitar

sektor formal tersebut, meskipun hubungan diantara keduanya sering kali tidak diakui.

(lingkungan) dapat dikategorikan sebagai tindakan ekonomi kreatif serta lebih lanjut dapat dikategorikan sebagai industri kreatif jika pekerjaan atau profesi tersebut turut melibatkan alat-alat produksi yang terbuat dari mesin. Percakapan menyangkut ekonomi kreatif dan industri kreatif merupakan masalah yang akan terus diperdebatkan dan dikaji, hal ini berkaitan dengan kondisi kedua masalah ini yang masih berada diseperti kehidupan manusia dan memiliki hubungan sebab akibat dengan kehidupan manusia itu sendiri.

Untuk itu lebih lanjut akan dijelaskan mengenai ekonomi kreatif dan industri kreatif sebagai suatu kompleksitas masalah disekitar kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Ekonomi kreatif merupakan suatu upaya yang sejak dulu dilakukan dan kembangkan oleh manusia dengan berbagai tahapan yang terus mengalami perubahan (perkembangan). Tindakan ini sesungguhnya merupakan suatu bentuk kesadaran sebagai makhluk ekonomi yang membutuhkan berbagai hal untuk menjalani hidup dengan berbagai kebutuhan yang diperlukan. Untuk memahami hal ini lebih jauh muncul beberapa pemikiran yang dapat dijadikan sebagai bandingan untuk memahami ekonomi kreatif dan industri kreatif secara mendasar⁴².

⁴² Wacana tentang ekonomi kreatif sebagai gelombang keempat peradaban umat manusia, didasarkan pada pemikiran Alvin Toffler yang menyebutkan adanya tiga gelombang peradaban manusia, yaitu: Abad pertanian (gelombang pertama), abad industri (gelombang kedua) dan abad informasi (gelombang ketiga). Pendapat yang berkembang kemudian mengatakan bahwa kini manusia telah memasuki pada

Namun sesungguhnya kedua masalah ini memiliki keterkaitan

era peradaban baru, yaitu Knowl-edge-based economy (ekonomi yang berorientasi pada kreatifitas, atau era kreative economy, atau era conceptual age (bdk. Andrie Trisaksono, 2007; Rahandre Ramelan 2007). Jadi secara sederhana ekonomi kreatif ini dapat diartikan sebagai kegiatan ekonomi dimana input dan outputnya adalah gagasan (Jhon Houkins dalam Andre Triaksono 2007). Konsep tentang ekonomi kreatif semakin menggellinding sejak Presiden Republik Indonesia mengajak seluruh masyarakat untuk mengembangkan sektor ekonomi kreatif, melalui sambutannya pada acara peresmian pembukaan pekan produk budaya Indonesia di Jakarta, pada tanggal 11 Juli 2007. Presiden mengatakan bahwa di zaman dahulu modal yang penting dalam kehidupan gelombang pertama adalah tanah untuk bercocok tanam dan bertani. Di gelombang kedua modalnya adalah mesin, pabrik dan industri. Digelombang ketiga modalnya adalah minds, informations, dan high tets. Sementara digelombang keempat yang menjadi orientasi adalah kreatifitas, budaya dan warisan budaya, serta lingkungan dan alam semesta. Dalam pidatonya, Presiden juga menekankan beberapa hal penrting seperti: 1. Ajakan untuk mengembangkana ekonomi kreatif dengan memadukan ide, seni dan teknologi; 2.ajakan untuk mengembangkan keunggulna produk ekonomi yang berbasis seni, budaya dan kerajinan; 3. Ajakan untuk mengembnagkan ekonomi warisan (heritage economy); 4. Ajakan untuk mengembangkan ekonomi kepariwisataan yang berbasis keindahan alam. Sedangkan yang dimaksud dengan industri kreatif merupakan bagian dari ekonomi kreatif dapat diartikan sebagai industri yang mengandalkan kreatifitas individu, ketrampilan, serta talenta yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan taraf hidup dan penciptaan tenaga kerja melalui penciptaan gagasan dan eksploitasi hak kekayaan intelektual (menurut Uka Departemen of Culture 1999 dalam Andrie Trisaksono 2007). Defenisi lain mengatakan bahwa industri kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreatifitas, ketrampilan serta bakat individu untuk mencapai kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploritasi daya kreasi dan daya cipta individu tersebut (menurut UK DCMS Task Force 1998, dalam industrikratif-depdag.blogspot.com/2007). Dari beberapa referensi diperoleh informasi, industri reatif ini memiliki berbagai kelompok atau subsektor, yaitu perikanan, arsitektur, pasar seni dan barang antik, kerajinan, desain, desain fasion, penerbitan dan percetakan, pelayanan komputer, dan piranti lunak, televisi dan radio, riset dan pengembangan, Benedikta Juliantri Widi Wulandari dalam *Penguatan Potensi Ekonomi Budaya Lokal studi terhadap petani madu hutan di desa Nanga Lebayon Kecamatan Selimbau, Kabupaten Kapuas Hullu Provinsi Kalimantan Barat*. Tahun 2008; hal 7-8.

yang sangat erat bahkan dengan kata lain dapat dikatakan dimana ada industri kreatif disitu terdapat ekonomi kreatif namun pada sisi yang lain tidak semua ekonomi kreatif terdapat industri kreatif. Industri kreatif merupakan bagian dari ekonomi kreatif. Hal ini berkaitan dengan tujuan untuk mengembangkan industri kreatif itu sendiri yang sesungguhnya bermuara pada peningkatan ekonomi kreatif.

Sejalan dengan itu keseriusan Pemerintah untuk menopang kemandirian ekonomi kreatif dalam kehidupan masyarakat yang sesungguhnya telah ada dan berakar dalam tatanan kehidupan masyarakat yang bersumber pada budaya dan berbagai kreatifitas masyarakat dengan hasil karya dan cipta telah ditunjukkan dengan suatu langkah yang cukup strategis dan efektif melalui pembentukan suatu struktur pemerintahan yang mengakomodir ekonomi kreatif dalam jajaran pemerintahan (kabinet Indonesia bersatu jilid II) dalam masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudoyono pada akhir tahun 2011.

Hal ini sesungguhnya menunjukkan konsistensi dan keberpihakan pemerintah untuk melaksanakan suatu pemberdayaan yang bermuara pada peningkatan ekonomi kerakyatan lewat bidang usaha ekonomi kreatif yang sesungguhnya telah ada dan berkembang sejak dulu namun belum mendapat perhatian yang serius oleh Pemerintah. Lewat suatu kebijakan yang mungkin menimbulkan kontrafersi dalam sistem perpolitikan dan pemerintahan,

namun sejujurnya menunjukkan keberpihakan pada ekonomi kreatif dengan mengakomodir ekonomi kreatif kedalam struktur kabinet pemerintahan yang baru bersama dengan kementerian pariwisata dengan nama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Perombakan kabinet yang disertai dengan perubahan nomen klatur beberapa struktur dalam kabinet pada masa pemerintahan khususnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini sesungguhnya membawa angin segar bagi seluruh komponen anak bangsa yang bergerak dalam bidang ekonomi kreatif yang selama ini menjadi anak tiri dalam mengembangkan ekonomi rakyat dan kurang mendapat perhatian yang serius Pemerintah. Jika dipahami secara mendasar jumlah masyarakat yang mengembangkan ekonomi rakyat darii sektor ekonomi kerakyatan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan penyerapann tenaga kerja pada sektor pemerintah (formal) dan suaata. Pada titik inilah ekonomi kreatif menjadi tumpuan perkonomian bangsa dalam konteks memperkuat ekonomi rakyat.

Pencapaian pembangunan sesungguhnya bukan ditujukan pada pembangunan fisik yang megah melainkan pembangunan kehidupan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Kesalahan pahaman dalam memahami konsep pembangunan inilah yang neimbulkan kesenjangan dalam berbagai kebijakan-kebijakan pembanguanan itu sendiri yang pada ahirnya tidak menyentuh kebutuhan ekonomi rakyat

dengan menimbulkan berbagai masalah-masalah dan kesenjangan sosial.

Salah satu hal yang menjadi masalah dalam pembangunan di Indonesia ialah penempatan pembangunan yang berorientasi dari kota ke desa yang sesungguhnya menimbulkan kesenjangan dan runang sosial yang begitu jauh antara kota dan desa. Selama ini tampak perjalanan pembangunan daerah masih didominasi oleh strategi yang menempatkan pembangunan pedesaan pada posisi yang terpisah dari pembangunan perkotaan baik dari rencana perkotaan. Baik dari rencana pembangunan yang disusun maupun dari bentuk implementasi yang diterapkan, pemerintah daerah masih diilhami dan dipandu oleh pemikiran bahwa pembangunan pedesaan memiliki karakteristik, regulasi, perkembangan dan perubahan yang berlainan dengan pembangunan perkotaan. Namun sesungguhnya pembangunan memiliki sinergitas yang utuh antara kota dan desa sehingga tidak tercipta kesenjangan antara kota dan desa⁴³.

⁴³ Kaitan resiprokal itu, antara lain, tercermin pada tiga macam hubungan. Pertama, ada hubungan yang signifikan antara diversifikasi dan peningkatan hasil produksi pertanian di pedesaan dengan pertumbuhan kota. Telah ditunjukkan oleh beberapa studi bahwa kota-kota yang tumbuh dengan cepat pada umumnya berada di kawasan yang daerah pedesaan ataupun pinggirannya (*the hinterland of city*) merupakan daerah pertanian yang subur. Kedua, ada hubungan antara diverifikasi dan peningkatan hasil produksi pertanian di pedesaan dengan tumbuhnya pusat-pusat perdagangan di perkotaan. Hal ini terjadi karena semakin meningkat dan beragamnya hasil produksi pertanian, akan semakin banyak dibutuhkan pasar baik sebagai tempat menjual hasil produksi maupun menjadi

Strategi pembangunan daerah yang menempatkan pembangunan pedesaan pada posisi yang terpisah dari pertumbuhan kota, dalam jangka panjang kurang mendatangkan hasil maksimal. Strategi pembangunan semacam itu mengingkari eksistensi segi-segi krusial yang melekat pada keterkaitan desa-kota, dan konsukuensinya melahirkan kebijaksanaan yang kurang tepat dalam menafsirkan dinamika pembangunan pedesaan maupun dinamika pembangunan perkotaan. Dalam upaya untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dengan tidak mengesampingkan wilayah pedesaan diperlukan suatu rekayasa pembangunan yang tuntas untuk menghindari kesenjangan. Salah satu hal yang perlu didorong dalam mencapai hal itu ialah dengan cara mendorong peningkatan ekonomi rakyat secara baik di kota maupun di desa.

Ekonomi rakyat sesungguhnya bertumbuh pada berbagai sektor usaha yang dijalani oleh rakyat dengan pengetahuan, keterampilan, semangat serta modal yang ada. Pada titik inilah ekonomi kreatif dan industri kreatif

lokasi temu silang barang yang diperlukan oleh para pedagang. Memang benar bahwa setiap transaksi jual beli tidak selalu harus dilakukan di pasar. Namun, dalam menentukan standar harga, baik pembeli maupun penjual tetap tidak dapat dilepaskan dari jaringan institusi pasar. Ketiga, ada hubungan yang signifikan antara fluktuasi kesempatan kerja sektor agraris di pedesaan dengan arus urbanisasi. Banyak studi telah menunjukkan bahwa stagnasi pertanian dan semakin menyempitnya kesempatan kerja di pedesaan merupakan *triggering factors* bagi arus urbanisasi. Kota dianggap lebih banyak menawarkan kesempatan kerja dan lebih mampu menyediakan ajang berwiraswasta, Sunyoto Usman, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, 2012 hal 16-17.

memainkan peran yang sangat strategis dalam menopang ekonomi rakyat. Pola-pola perilaku ekonomi kreatif dan industri kreatif yang dikembangkan masyarakat sesungguhnya bergantung pada beberapa hal yang dapat dirincikan antara lain; budaya, sumber daya alam, geografis. Dalam realitas yang dialami saat ini kondisi ekonomi rakyat mengungkap berbagai fakta masalah-masalah yang dihadapi dalam mengembangkan ekonomi rakyat antara lain; keterbatasan akses terhadap sumber-sumber pembiayaan dan permodalan, keterbatasan penguasaan teknologi informasi, keterbatasan akses pasar serta keterbatasan organisasi dan pengelolaan. Masalah-masalah ini kemudian dengan sendirinya mematikan pola-pola kehidupan yang bercirikan ekonomi kreatif dan industri kreatif yang merupakan tumpuan kehidupan ekonomi rakyat. Fenomena ini seringkali muncul pada wilayah-wilayah pinggiran (pedesaan) yang pada akhirnya menimbulkan suatu stereotip bahwa daerah perkotaan merupakan tempat yang tepat untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Pada titik ini akan terjadi urbanisasi pada pusat-pusat modernisasi yang dianggap dapat menjawab berbagai masalah pengangguran yang ada di pedesaan.

Untuk menjawab problematika kehidupan ekonomi rakyat yang bertumpu pada ekonomi kreatif dan industri kreatif memerlukan suatu kata kunci yang merupakan solusi untuk semuanya itu ialah pemberdayaan ekonomi rakyat. Upaya pemberdayaan tersebut dapat mengatasi kendala-kendala

yang dihadapi pelaku-pelaku ekonomi atau dengan kata lain pengusaha disektor ekonomi berskala kecil dan menengah dan lain sebagainya. Untuk pemberdayaan itu sendiri diperlukan suatu pemahaman yang sangat mendasar serta tuntas dengan memahami kondisi yang dihadapi oleh pelaku-pelaku ekonomi kreatif dan industri kreatif. Pemberdayaan sesungguhnya tidak hanya bertumpu pada bantuan modal usaha, melainkan upaya-upaya untuk mengembangkan (menghidupkan) ekonomi kreatif dan industri kreatif yang ada dalam masyarakat. Salah satu hal yang sangat mendasar ialah dengan memberikan pemahaman yang luas mengenai bentuk-bentuk usaha dan kerja yang dilakoni dalam kehidupan masyarakat⁴⁴.

Pada titik ini peran serta pemerintah merupakan hal yang paling penting, tanpa mengabaikan keterlibatan pihak-pihak terkait dalam mendorong peningkatan ekonomi rakyat yang bertumpu pada ekonomi kreatif dan industri kreatif. Dalam merealisasikan berbagai program pemberdayaan yang dicanangkan oleh pemerintah seringkali terjadi kekeliruan dan bahkan tidak pada sasaran yang pada akhirnya menimbulkan

⁴⁴ Hal ini sebagaimana yang diungkap oleh Sallatu dan Suhab Pemberdayaan Ekonomi Rakyat: Pergulatan Menuju Keadilan Sosial di Era Destoda 2003 hal 34 menyatakan bahwa, upaya perbaikan dan pengembangan kemampuan pelaku usaha sehingga menjadi sumberdaya yang lebih profesional, dapat dilakukan dengan menyelenggarakan pendidikan kewirausahaan dan manajemen usaha. Sedangkan disisi lain, diperlukan pula upaya untuk meningkatkan produktifitas dan penguasaan pasar melalui penyediaan sarana dan prasarana usaha yang menunjang kegiatan produksi dan pemasaran, serta pembentukan lembaga yang beranggotakan pengusaha/pelaku usahadi sektor ekonomi rakyat untuk menjalankan program kemitraan usaha yang saling menguntungkan.

keresahan dan masalah. Selain pengawasan dan monitoring terhadap berbagai program pemberdayaan masih terlalu lemah sehingga menimbulkan kepincangan dalam merealisasikan program tersebut, hal ini berbanding terbalik dengan program-program pemberdayaan yang dikelola oleh lembaga-lembaga teknis yang dibentuk oleh pemerintah maupun LSM dan NJO yang turut menyatakan keberpihakannya dalam upaya pemberdayaan kepada masyarakat. Untuk itu orientasi dan strategi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan mesti didasarkan pada kajian-kajian yang mendalam sehingga dapat menumukan akar masalah yang dihadapi dalam masyarakat, sehingga tercipta suatu program pemberdayaan yang terukur dan akuntabel.

F. Papalele Dalam Prespektif Sejarah dan Budaya Orang Saparua

Berbicara mengenai papalele tidak terlepas dari beberapa aspek yang turut memberikan pengaruh secara langsung terhadap aktifitas papalele yang sejak dulu telah diperankan oleh perempuan Maluku dan secara khusus perempuan papalele di Kecamatan Saparua. Aspek-aspek yang mempengaruhi aktifitas papalele itu sendiri dipengaruhi oleh kondisi ekonomi keluarga, budaya masyarakat dan potensi alam yang dimiliki. Panggilan untuk melakoni profesi sebagai seoran papalele sesungguhnya didasarkan oleh latar belakang ekonomi keluarga. Kesadaran untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga merupakan alasan kuat yang mendorong

perempuan papalele di Saparua untuk turut terlibat dan bergulat dengan suatu profesi yang menjadikan perempuan sebagai salah satu sumber penghasilan dalam menopang kehidupan ekonomi keluarga. Dengan bermodalkan sedikit uang sebagai modal utama, semangat, tanggung jawab dan kemampuan dagang yang terbilang terbatas perempuan papalele di Saparua tampil sebagai orang yang turut memberikan kontribusi positif dalam menopang ekonomi keluarga. Alasan ekonomi keluarga merupakan fakta yang cukup nyata bagi seorang perempuan untuk memainkan peran sebagai salah satu profesi yang memberikan penghasilan yang baik (cukup) bagi keluarga.

Potret perempuan Saparua yang berprofesi sebagai seorang papalele sesungguhnya memiliki latar belakang historis dan bertumbuh dalam akar budaya yang cukup kuat. Secara historis aktifitas papalele tidak dapat dilepas-pisahkan dengan kehadiran bangsa Belanda di Kepulauan Lease dan menjadikan Pulau Saparua sebagai basis pertahanan, pusat pemerintahan dan pusat perdagangan rempah-rempah yang membawahi Kepulauan Lease dan sebagian dari Pulau Seram. Dengan menjadikan Saparua sebagai pusat perdagangan rempah-rempah untuk membawahi wilayah Lease dan sebagian negeri-negeri di Pulau Seram yang berdekatan, dengan sendirinya Belanda menjadikan Saparua sebagai suatu kota dagang yang memiliki pengaruh pada masa itu. Seluruh proses penyerahan wajib (pajak) yang harus diserahkan

kepada pemerintah Belanda dan aktifitas perdagangan rempah-rempah berupa cengkih dan pala hail perkebunan milik rakyat semuanya dipusatkan di Saparua.

Proses pengaturan pasar dan waktu untuk melaksanakan aktifitas perdagangan diatur oleh Belanda dan mendapat pengawasan secara langsung oleh petugas yang diangkat oleh Belanda dengan tujuan mendatangkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi badan dagang milik pemerintah Belanda (VOC). Dalam melaksanakan seluruh kegiatan perdagangan rempah-rempah yang diawasi oleh Belanda, maka rakyat diwajibkan untuk melakukan transaksi jual beli rempah-rempah dua kali dalam satu minggu yakni pada hari Rabu dan hari Sabtu. Kebijakan ini bertujuan untuk menghindari penampungan hasil perkebunan rempah-rempah ditampung oleh rakyat dan dijual kepada para pedagang-pedagang nusantara dan pedagang-pedagang timur Asia lainnya yang datang ke Maluku dengan tujuan mencari rempah-rempah (cengkih dan pala). Bermula dari kebiasaan untuk mengatarkan rempah-rempah untuk dijual kepada VOC, pasar Saparua mulai dijadikan sebagai pusat perdagangan rakyat untuk menjembatani berbagai kebutuhan rumah tangga maupun ekonomi. Pasar dalam konteks ini kemudian dikenal sebagai pasar pulau (pulu)⁴⁵. Istilah pasar pulau (pulu) sesungguhnya merujuk pada aktifitas pasar tersebut yang

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Tjia Pattinasarany dan Bapak Mone Loupatty tanggal 16 Juli 2012

melibatkan masyarakat dari Kepulauan Lease dan sebagian dari negeri-negeri di Pulau Seram yang berdekatan serta masuk dalam wilayah Residen Van Saparua.

Ketika harga rempah-rempah mulai mengalami penurunan nilai jual dalam perdagangan internasional, perhatian Belanda tidak lagi tertuju pada cengkih dan pala melainkan lebih difokuskan pada bagaimana mendapatkan keuntungan melalui berbagai potensi-potensi alam yang lainnya di nusantara seperti perkebunan kopi dan teh yang mulai dilirik dan dikembangkan pada wilayah Jawa dan daerah-daerah lain oleh VOC. Hal ini kemudian memberikan dampak bagi petani cengkih dan pala di Kepulauan Lease serta masyarakat secara umum yang sesungguhnya bergantung pada hasil perkebunan rempah-rempah tersebut.

Kondisi ekonomi masyarakat kian hari kian terpuruk akibat penurunan nilai jual rempah-rempah dalam perdagangan dunia pada masa itu⁴⁶. Hal ini kemudian membuka babakan baru dalam kehidupan masyarakat dengan mengembangkan berbagai upaya dalam pengembangan dan pemenuhan kebutuhan hidup tiap-tiap hari. Pasar Saparua yang pada awalnya merupakan pusat perdagangan rempah-rempah untuk kepentingan monopoli Belanda mulai mengalami peralihan fungsi sebagai pasar tempat aktifitas perdagangan dalam upaya untuk memenuhi dan

⁴⁶ Untuk itu lihat Stenli Loupatty dalam Saparua Dalam Dimensi Masa Lalu dan Konteks Masa Kini 2012 hal 39

menjembatani berbagai kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Dalam proses peralihan fungsi pasar pulau (pulu) inilah muncul berbagai aktifitas dagang yang dilakukan oleh masyarakat. Proses perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat pada mulanya masih mendapat pengawasan pihak Belanda, namun praktek ini kemudian mulai berkurang hingga bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Sejak kondisi perekonomian rakyat mulai terpuruk semenjak rempah-rempah kurang dilirik pasar perdagangan internasional dan dimulai dikembangkannya perkebunan cengkih ditempat-tempat lain di nusantara muncul pilihan-pilihan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Diperkirakan sejak itulah aktifitas papalele mulai dilakoni oleh perempuan-perempuan Saparua demi mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Menjajakan hasil-hasil pertanian (kebun), hasil laut, dan potensi alam lainnya profesi ini mulai dikembangkan oleh kaum perempuan sebagai upaya ekonomi rakyat Saparua tanpa dibekali dengan pengetahuan dagang yang cukup. Namun dari data yang diperoleh terdapat sejumlah perempuan-perempuan papalele yang telah melakoni profesi ini kurang lebih lima puluh tahun lebih, bahkan hingga sampai sekarang ini. Profesi ini (papalele) yang hingga kini dilakoni

oleh sebagian perempuan Saparua merupakan suatu profesi yang juga dimiliki oleh orang tua mereka⁴⁷.

Dalam sudut pandang yang lain kebudayaan orang Maluku dibangun atas akar budaya patriaki yang begitu kuat, namun pada sisi yang lain perempuan turut memberikan kontribusi yang cukup besar dalam menopang perekonomian keluarga. Fakta kehidupan masyarakat Maluku dan Saparua khususnya membuktikan seberapa besar masyarakat yang

⁴⁷ Wawancara dengan Ibu Opat. Sahanaya dan Ibu Cici Loupatty tanggal 17 Juli 2012 perempuan-perempuan papalele di Saparua yang telah melakoni profesi ini bertahun-tahun dan merupakan profesi yang telah diwariskan oleh orang tua (ibu) mereka. Profesi yang digelar ini menurut mereka tidak dikerjakan melalui suatu proses pendidikan formal melainkan bermodalkan pengalaman dan semangat yang diambil ketika profesi ini masih dilakukan oleh orang tua mereka. Bahkan panggilan untuk melakoni profesi sebagai seorang perempuan papalele dilakukan ketika mereka merasa peduli terhadap tanggung jawab untuk turut terlibat dalam membantu orang tua untuk menafkai kebutuhan keluarga (pendidikan saudara-saudaranya). Biasanya keputusan untuk menjadi seorang perempuan papalele didasarkan pada rasa kepedulian terhadap apa yang dialami oleh orang tua (untuk meringankan beban) dan rasa tanggung jawab untuk turut menopang perekonomian keluarga dan kelanjutan pendidikan saudara-saudara mereka. biasanya keputusan untuk menjadi seorang perempuan papalele dilakukan oleh anak perempuan yang tertua (sulung) atau salah satu dari anak perempuan dalam keluarga tersebut. Diawali dengan kebiasaan mengikuti orang tua mereka untuk menjajakan (menjual) barang-barang yang di papalelekan, sehingga dengan sendirinya mereka terbiasa melakukan profesi ini dan menjadikan papalele sebagai profesi yang tepat untuk menyambung hidup. Dalam melakoni profesi sebagai perempuan papalele tak jarang mereka (perempuan papalele) harus berjalan berkeliling bahkan ada diantara mereka yang harus melakoni profesi ini di luar pulau Saparua seperti Kota Ambon, Pulau Seram, MTB, Dobo bahkan sampai ke luar provinsi (Papua). Tempat-tempat yang dituju sesungguhnya merupakan tempat-tempat yang bahan-bahan jajakannya (papalele) tidak diproduksi dan merupakan tempat-tempat yang mobilitas penduduknya tinggi (pusat-pusat modernisasi).

memiliki profesi sebagai petani dan nelayan bertanggung jawab untuk menafkai kehidupan keluarga, namun sesungguhnya aktifitas untuk menafkai kebutuhan keluarga tersebut hanya terbatas pada bagaimana seorang laki-laki yang berprofesi sebagai petani atau nelayan melakukan pencaharian di kebun (hutan) maupun pencaharian di laut (mengelola alam). Hasil yang diperoleh inilah yang kemudian dijual (papalele) ke pasar oleh istri atau anak sehingga menghasilkan uang yang dapat dijadikan sebagai alat untuk membelanjakan berbagai kebutuhan rumah tangga. Aktifitas yang dilakoni oleh kaum perempuan inilah yang dapat dikatakan sebagai ekonomi kretif.

Jika dipahami lebih mendalam ekonomi kretif sesungguhnya bertumpu pada tradisi (kebudayaan) masyarakat setempat dengan memanfaatkan berbagai potensi alam yang ada disekitarnya⁴⁸. Dengan demikian bangunan kebudayaan

⁴⁸ Keterkaitan antara ekonomi kreatif dengan budaya masyarakat tertentu merupakan suatu fakta dalam kehidupan masyarakat sebagaimana yang dijelaskan oleh Hanafi & Maswita Membangun Infrastruktur Kebudayaan Sebagai Industri Strategi (Jawaban Untuk Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2008 hal 10, menjelaskan bahwa ekonomi kretif sebagai sumber daya kreatif masyarakat yang merupakan warisan budaya. Disini terlihat bahwa sektor ekonomi rakyat yang tumbuh dari kretifitas masyarakat dalam merespons lingkungan dan potensi-potensi ekonomi yang ada disekitarnya diberi ruang untuk mengembangkan diri dalam lingkup ekonomi kretif, khususnya yang berakar dari budaya (pengetahuan dan teknologi tradisional). Lebih lanjut Hanafi dan Maswita menawarkan sebuah konsep manajemen budaya berbasis industri (MBBI) sebagai sebuah sistem yang bertujuan untuk mengelola sumberdaya alam dan sumberdaya kreatifitas masyarakat, sekaligus untuk memberikan perlindungan terhadap warisan budaya. Sistem ini juga bertujuan untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan, sehingga dapat mempresentasikan manajemen dan teknologi dalam perspektif budaya.

lokal turut mengkonstruksikan berbagai aktifitas yang berkaitan langsung dengan pola ekonomi kreatif yang sesungguhnya memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia yang membentuk kebudayaan itu sendiri.

Salah satu fakta yang hingga kini masih dijumpai yaitu ketika kita mengamatinya dalam tradisi papalele yang dilakukan oleh sebagian kaum perempuan papalele di Saparua. Bagi masyarakat Maluku dan Saparua aktifitas berdagang (Papalele) sesungguhnya merupakan suatu aktifitas (profesi) yang cenderung dilakukan oleh kaum perempuan. Walau dalam dunia moderen dewasa ini muncul peran kaum laki-laki yang mulai melirik profesi sebagai papalele (pedagang). Partisipasi kaum laki-laki sesungguhnya lebih terbatas pada hal tertentu misalnya papalele ikan, sedangkan untuk bahan-bahan yang lain lebih banyak dilakukan oleh kaum perempuan. Satu hal yang menarik dalam potret perempuan papalele di Saparua ialah kebiasaan menggunakan busana tradisional yang mencerminkan kearifan lokal dengan menggunakan kain dan kabaya, ikat pinggang/tali kaeng (tempat menyimpan uang) serta menggunakan alas kepala yang digulung (anyiong). Ciri inilah yang sesungguhnya mendekatkan papalele dalam konstruksi budaya lokal yang melekat dengan begitu kuat dalam perilaku perempuan papalele di Saparua.

Eksistensi budaya lokal yang nampak dalam aktifitas papalele yang hingga kini masih dijumpai dalam kehidupan perempuan Saparua sesungguhnya merupakan suatu konten

kelokalan yang melekat begitu kuat. Walau disadari sungguh bahwa saat ini profesi sebagai seorang perempuan papalele mulai dilakoni oleh banyak orang walaupun tanpa menggunakan busana tradisional sebagai gambaran identitas yang melekat dalam profesi sebagai seorang papalele. Apapun bentuk dan dinamika yang dijalani oleh seseorang perempuan papalele namun nilai yang sesungguhnya melekat dalam profesi ini merupakan suatu panggilan jiwa seorang perempuan Saparua yang berakar dalam konstruksi budaya yang sesungguhnya lebih didominasi oleh kaum laki-laki. Potret perempuan papalele sesungguhnya memberikan koreksi dan kritik terhadap konstruksi budaya itu sendiri dalam memahami hakekat hidup kaum perempuan ditengah-tengah pusaran zaman.

G. Papalele Dalam Prespektif Ekonomi Rakyat

Seperti yang telah dijelaskan awal bahwa sesungguhnya profesi sebagai seorang perempuan papalele merupakan panggilan jiwa seorang perempuan Saparua untuk turut menopang ekonomi keluarga, dengan kata lain papalele bertujuan ahir untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga tiap-tiap hari. Kesadarn untuk menunjang ekonomi keluarga menjadi alasan utama setiap perempuan papalele di Saparua untuk bergulat dalam profesi ini. Hal ini sesungguhnya merujuk pada suatu kesadarn terhadap kebutuhan ekonomi keluarga yang ahirnya mendorong lahirnya pemikiran dan tindakan ekonomi untuk menjembatani kebutuhan itu sendiri.

Pemikiran dan tindakan ekonomi tersebut terefleksi dalam realitas sosial dan ekonomi seseorang untuk melakoni suatu pekerjaan (profesi) dengan tujuan memperoleh keuntungan (penghidupan yang lebih baik).

Sebagai salah satu bentuk ekonomi kreatif yang berbasis akar budaya, papalele telah menghentar sebagian para pempuan di Saparua untuk memberikan penghidupan yang lebih baik bagi keluarga, dimana profesi ini merupakan salah satu sumber yang menjadi sumber pendapatan ekonomi keluarga, bahkan menjadi satu-satunya sumber pendapat tetap dalam kehidupan keluarga bagi masyarakat di Saparua. Profesi yang dijalani oleh kaum perempuan ini mampu memberikann kontribusi yang signifikan bagi keluarga khususnya dalam menunjang pendidikan anak-anak mereka. dari data yang diperoleh dilapangan membuktikan bahwa melalui profesi sebagai seorang perempuan papalele mereka mampu menyekolahkan saudara (adik atau kakaknya) dan anak-anak hingga jenjang pendidikan di bangku perguruan tinggi dan memperoleh pekerjaan yang lebih baik pada sektor pemerintah (formal), suasta maupun wirasuasta.

Ditengah-tengah terpaan krisis ekonomi yang melanda perekonomi dunia saat ini eksistensi perempuan papalele tidak mendapat pengaruh yang begitu berarti, mereka terus berjuang ditengah berbagai dinamika perkembangan zaman, walaupun hanya dengan bermodalkan seadanya dan pengalaman (pengetahuan) yang terbatas mereka terus

berkarya dan mengabdikan untuk kepentingan keluarga. Walau dipandang sebagai suatu profesi yang sederhana dan membutuhkan keuletan seorang perempuan papalele terus memberikan harapan bagi setiap pribadi yang menggantungkan harapan dan masa depan diatas pundaknya.

H. Papalele Sebagai Suatu Aktifitas

Profesi sebagai seorang perempuan papalele di Pulau Saparua mungkin merupakan salah satu profesi yang hampir dapat dijumpai di setiap negeri, namun potret sebagai seorang perempuan papalele tidak semuanya dilakukan setiap hari, melainkan bervariasi. Untuk itu lebih jelasnya dalam penulisan ini, penulis mencoba untuk menguraikan lebih mendalam intensitas dari aktifitas papalele itu sendiri berdasarkan waktu (hari pasar), jenis barang dan musiman (tergantung hasil alam).

1. Aktifitas Papalele pada Hari Pasar

Profesi sebagai seorang perempuan papalele tidak dilakoni secara rutin setiap hari oleh kaum perempuan yang menggeluti profesi ini, melainkan dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis berdasarkan waktu melaksanakan aktifitas papalele itu sendiri. Sebagaimana telah dijelaskan awal bahwa sesungguhnya tingkat aktifitas transaksi antara penjual dan pembeli pada pasar Saparua memiliki perbedaan dengan hakekat pasar yang sesungguhnya. Pada pasar Saparua tingkat aktifitas yang tinggi akan terjadi pada saat hari pasar (haru

Rabu dan hari Sabtu), dimana pada hari pasar hampir semua barang yang diperlukan dapat ditemui dalam transaksi jual beli antara pedagang (papalele) dengan pembeli. tingkat aktifitas yang tinggi pada saat berlangsungnya pasar pulu (hari pasar) dibandingkan dengan aktifitas pasar pada hari biasaya (tiap hari) sesungguhnya telah berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama berdasarkan konstruksi budaya dan sejarah yang dijalani masyarakat Saparua dan Lease secara umum.

Realitas inilah yang sesungguhnya memberikan keunikan tersendiri bagi pasar tradisional Saparua, dibandingkan dengan realitas pasar tradisional lainnya. Keunikan ini sesungguhnya terkonstruksi dalam suatu perjalanan panjang sejarah dan tradisi masa lalu masyarakat Lease pada umumnya yang dimulai dalam babakan sejarah pendudukan kaum Kolonial yang mendorong lahirnya suatu peradaban yang dibangun dalam kesadaran sebagai makhluk sosial untuk saling melengkapi dengan berbagai tujuan-tujuan ekonomis yang ingin dicapai dalam setiap interaksi sosial. Pada titik inilah pasar menjadi tempat yang tepat untuk menjangkau berbagai kepentingan dan kebutuhan sebagaimana yang dijelaskan. Dengan kata lain kehadiran kaum Kolonial di Saparu turut memberikan kontribusi yang positif dalam membentuk peradaban masyarakat Lease khususnya dalam bidang ekonomi. Kehidupan dalam tradisi yang sangat sederhana (barter) sebagai upaya pemenuhan kebutuhann hidup berubah menjadi sesuatu yang lebih baik dengann

dijadikannya uang sebagai alat tukar yang sah. Hal lain yang lahir dalam konstruksi ini terbentuknya suatu tradisi untuk berusaha lewat tindakan-tindakan perekonomian (dagang/papalele) dalam waktu-waktu yang telah ditentukan untuk melaksanakan aktifitas tertentu. Proses dan dinamika inilah yang dalam istilah masyarakat setempat (Lesae) menyebutnya dengan istilah pasar pulu (hari pasar).

Keunikan pasar Saparua sesungguhnya terletak pada pemberlakuan pasar pulu (hari pasar) dimana muncul suatu aktifitas perdagangan (perekonomian) jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pelaksanaan aktifitas pasar pada hari biasanya. Hal ini menunjukkan suatu kekhususan tersendiri dibandingkan dengan aktifitas pasar pada hari biasanya. Kondisi ini juga dijumpai dalam konteks kehidupan sebagian perempuan papalele yang biasanya memilih untuk melakoni profesi ini pada saat pelaksanaan hari pasar. Intensitas yang cukup tinggi menjadi suatu fenomena yang dijumpai dalam potret kehidupan perekonomian di Pulau Saparua yang diramaikan dengan berbagai aktifitas berdagang hasil-hasil alam maupun barang-barang kebutuhan rumah tangga lainnya. Barang-barang yang dijual (papalele) merupakan barang-barang yang diperoleh melalui sektor pertanian rakyat, hasil produksi sendiri maupun barang-barang yang diperoleh dengan cara membeli ditempat lain (orang lain). Namun pada dasarnya barang-barang yang diperjualbelikan pada hari pasar tidak terlalu berbeda dengan aktifitas pasar yang dilakukan

tiap hari, antara lain; umbi-umbian, kelapa, sagu lempeng, sagu manta, bagia, sarut, kue-kue, gula merah, atap, sayur-sayuran, ikan, cuka, buah-buahan, kasbi gepe, bibir sagu dan berbagai potensi alam yang dihasilkan lewat pencaharian yang dilakukan oleh kaum laki-laki. Perbedaan mencolok yang dapat dijumpai pada aktifitas hari pasar dan aktifitas pasar biasanya hanya pada jumlah pedagang dan pembeli yang ada dalam jumlah yang banyak.

Profesi sebagai papalele dengan sendirinya merupakan suatu fakta pemenuhan pangan lokal sebagai suatu kebutuhan dasar dalam kehidupan masyarakat Saparua serta upaya pemenuhan kebutuhan keluarga yang teraktualisasi dalam suatu aktifitas perempuan papalele di Saparua. Untuk melakukan aktifitas papalele pada hari pasar biasanya mereka (ibu-ibu papalele) memulainya pada saat pagi hari sekitar pukul lima (5). Biasanya barang-barang dagangan mereka telah dikemas (dipersiapkan) sejak sore hari dan dibantu oleh suami atau anggota keluarga yang lain. Disini terlihat bentuk kerja sama antar anggota keluarga dalam menunjang kebutuhan hidup keluarga. Seluruh aktifitas bersama ini bermuara pada kepentingan bersama dalam keluarga. Menurut penuturan beberapa informan⁴⁹ yang ditemui aktifitas untuk berdagang sebagai papalele mulanya dilakukan dengan cara menempuh perjalanan dengan berjalan kaki dari

⁴⁹ Wawancara dengan Ibu Opat Sahanaya, Bpk Cia Pattinasarany dan Ibu Leonora Loupatty tanggal 17 Juli 2012

negeri mereka menuju pasar Saparua tempat dimana mereka melakoni aktifitas papalele, sehingga untuk melakoni aktifitas ini perempuan papalele biasanya dibantu oleh suami atau salah satu dari anggota keluarga mereka untuk sama-sama membawa barang dengan untuk dijual di pasar seperti sagu manta, atap umbi-umbian dan bahan-bahan pangangan lainnya, sehingga waktu dan tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan aktifitas papalele jauh lebih banyak dibandingkan dengan aktifitas saat ini. Namun untuk waktu sekarang ini ibu-ibu papalele lebih mendapat kemudahan dengan menggunakan transportasi darat (mobil) sehingga waktu dan tenaga yang digunakan semakin sedikit.

Dengan beraktifitas sebagai seorang papalele yang beraktifitas pada hari pasar ibu-ibu papalele berjuang untuk mendapatkan untung (laba) dari berbagai aktifitas yang dilakoninya dengan tujuan mampu mencukupi berbagai kebutuhan hidup dan pendidikan anak-anak. Memulai aktifitas dipagi hari seorang ibu papalele berjuang untuk menjajakan barang dagangannya. Bermotivasi semangat yang tinggi seorang perempuan papalele bergelut dalam dunia ekonomi sebagaimana yang digambarkan dalam potret perempuan papalele di Saparua berdasarkan hasil dagangannya. Untuk melakukan aktifitas papalele, biasanya didasarkan pada potensi alam yang ada di negerinya sehingga nampak bahwa bahan-bahan makanan yang dijual menggambarkan komoditi yang dapat dijumpai pada negeri tertentu serta

menggambarkan kretifitas masyarakat tertentu. Misalnya perempuan papalele yang menjajakan gula aren (gula merah) dan cuka biasanya berasal dari negeri Tuhaha, sagu lempeng dari negeri Nolothe, Iha Mahu, Pia dan Itawaka, bagia, sarut, sagu tumbu, berasal dari negeri Iha Mahu. Bahkan ada yang menjajakan bahan-bahan makanan lebih dari satu jenis bahan dagangan.

Dalam melakoni profesi sebagai seorang perempuan papalele yang beraktifitas pada saat berlangsungnya hari pasar keuntungan yang diperoleh sangatlah bervariasi antara seratus lima puluh ribu rupiah hingga lima ratus ribu rupiah, tergantung jumlah dan harga barang yang dibawa untuk dijual, dan biasanya semua barang dagangan yang dibawa laris terjual. Untuk lebih jelasnya penulis dapat menjelaskan sedikit menyangkut keuntungan yang dapat diperoleh para perempuan papalele pada saat berlangsungnya hari pasar berdasarkan jenis barang yang dijual antarlain; untuk jenis gula aren yang biasa dibawa jumlahnya antara seratus sampai seratus lima puluh buah, untuk harga jual biasanya disesuaikan dengan harga yang dibeli dari penghasil gula (produsen), jika dibeli dengan harga yang murah maka barang yang dijualpun murah misalnya dibeli dengan harga lima ribu rupiah maka dijual dengan harga tujuh ribu hingga delapan ribu rupiah sedangkan jika dibeli dengan harga sembilan ribu rupiah maka akan dijual dengan harga tiga belas ribu rupiah perbuah. Harga jual ini ditentukan oleh kondisi

alam, jika air mayang(aren) yang diperoleh petani banyak maka harga gula aren akan murah sedangkan jika air mayang sedikit harga gula aren akan mahal.

Untuk jenis bahan yang lain seperti bibir sagu (sagu halus) biasanya dibeli dengan harga tiga cupa dijual dengan harga lima ribu rupiah. Untuk keperluan penjualan pada hari pasar mereka harus mengumpulkan selama satu minggu sehingga pada saat hari pasar dapat dijual dengan jumlah antara seratus sampai dua ratus cupa, dari penjualan ini mereka memperoleh keuntungan antara lima puluh sampai seratus ribu rupiah. Keuntungan akan semakin besar jika barang yang dipapalelekan adalah hasil produksi atau bahan yang didapat dari berbagai usaha dalam keluarga sendiri dan tidak mengeluarkan modal awal, sehingga keuntungan yang diperoleh mencapai lima ratus ribu hingga satu juta rupiah. Biasanya untuk melakukan aktifitas papalele pada saat hari pasar, para ibu-ibu papalele memulainya dipagi hari antara pukul lima hingga pukul empat belas (jam dua siang). Dengan perjuangan yang dijalani sebagai seorang papalele mampu mencukupi berbagai kebutuhan keluarga, selain untuk keperluan keluarga dan biaya-biaya pendidikan anak-anak sebagian dari hasil (keuntungan) dapat disimpan. Dengan dibukanya tiga buah bank pemerintah dan suwasta turut memberikan kontribusi bagi kehidupan masyarakat Saparua dan khususnya ibu-ibu papalele untuk menyimpan uang. Hampir semua mereka (ibu-ibu papalele) memiliki tabungan

sebagai cadangan modal dan kebutuhan yang bersifat urgen (tiba-tiba).

Melakoni aktifitas sebagai seorang perempuan papalele tidak semata-merta meniadakan tanggung jawab mereka sebagai seorang ibu rumah tangga. Sebagian besar di antara mereka yang hanya memilih hari pasar (rabu dan sabtu) untuk melakoni aktifitas papalele sebagai suatu tindakan ekonomi kreatif dalam upaya pemenuhan kebutuhan keluarga, maka sebagian waktu yang lain dipakai untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan keperluan rumah tangga. Profesi sebagai seorang ibu rumah tangga tetap dilaksanakan oleh mereka (ibu-ibu papalele), setelah melaksanakan aktifitas papalele. Tugas-tugas primer sebagai seorang perempuan (ibu rumah tangga) yang dikonstruksikan oleh budaya patriki menjadi suatu rutinitas dalam kehidupan seorang perempuan papalele. Selain itu mereka turut terlibat dalam berbagai aktifitas lainnya dalam keluarga baik membantu suami untuk berkebun, mengumpulkan kayu maupun melaksanakan aktifitas lainnya yang bersifat tindakan ekonomi kreatif. Dengan kata lain papalele tidak menjadi aktifitas rutin yang dijalani oleh perempuan papalele yang dilakoni setiap hari melainkan juga kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tugas domestik yang biasanya dijalani oleh kaum perempuan dalam tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga, sehingga aktifitas untuk menghasilkan pundi-pundi keuangan keluarga juga dilakukan dalam pekerjaan yang lain.

2. Aktifitas Papalele Tiap Hari

Dalam dinamika yang dijalani oleh perempuan papalele di Saparua muncul beragam aktifitas yang dijalani sebagai suatu tindakan pemenuhan kebutuhan keluarga. Jika sebagian diantara mereka yang hanya memilih untuk beraktifitas pada hari pasar saja, maka ada pula sebagaian yang memilih untuk menjalani aktifitas papalele sebagai satu-satunya pundi-pundi pendapatan keluarga sehingga aktifitas ini dijalani setiap hari yang dimulai pada pagi hari sekitar pukul 06.00 WIT hingga jam 16.00 WIT, bahkan ada yang beraktifitas hingga malam. Aktifitas papalele yang dijalani setiap hari lebih cenderung untuk menjajakan bahan-bahan pangan lokal untuk keperluan kebutuhan pangan masyarakat seperti sayur-sayuran, ikan, umbi-umbian, kue-kue serta berbagai bahan makanan pokok lainnya. Bahan-bahan yang dijajakan merupakan hasil alam dan hasil produksi dalam rumah tangga yang dapat diperoleh dari hasil alam yang ada maupun hasil alam dari wilayah-wilayah sekitar Pulau Saparua misalnya pulau Seram dengan cara membeli dan mendatangkannya. Hal ini kemudian turut berpengaruh pada harga jual di pasar, dimana jika barang diperoleh dengan harga yang mahal maka harga jualnya pun akan semakin mahal dan sebaliknya jika harga barang yang diperoleh murah maka harga jual dipasarpun semakin murah.

Untuk jenis sayur-sayuran hampir sebagian besar pasokannya berasal dari pulau seram, dimana sebagian papalele yang mengambilnya pada beberapa tempat yang

berbeda, ada yang mengambil barang pada pasar di Ibu Kota Kabupaten (Masohi) dari para pedagang sayur dan ada yang mengambil langsung dari para petani yang ada di daerah Namal Tutuni (Seram Bagian Barat). Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian awal bahwa harga jual bahan-bahan makanan tersebut tergantung dari harga beli dan transportasi, sehingga harga beli barang sangat mempengaruhi harga jual di pasar. Misalnya sayur-sayuran diambil dengan harga Rp. 2000 sampai Rp. 3000 dapat dijual dengan harga Rp. 5000, begitu juga dengan bahan-bahan yang lain seperti tomat, cili, bawang. Biasanya untuk keperluan penjualan dipasar para ibu-ibu papalele dapat mengambil barang (membeli barang dagangan) dua hingga tiga kali dalam satu minggu tergantung daya beli masyarakat. Sehingga sebelum barang dagangannya habis mereka terlebih dahulu telah membelanjakannya ke tempat-tempat penghasil barang-barang tersebut.

Dengan pengetahuan dagang yang seadanya, kaum perempuan papalele di Saparua telah mampu menunjukkan kemampuannya dalam mengelola suatu pola sistem perdagangan yang bersifat lokal, dimana kaum perempuan papalele menjadi penggerak perekonomian ekonomi lokal yang berbasis ketahanan pangan lokal. Dengan modal diantara Rp.500.000 hingga Rp.1.000.000 mereka mulai merintis suatu bidang pekerjaan yang baru sebagai upaya penciptaan kemandirian ekonomi. Pada titik ini sektor nonformal menjadi sandaran kehidupan ekonomi masyarakat karena dianggap

dapat memecahkan kebuntuan ekonomi keluarga. Upaya pencerahan dengan tindakan yang bersifat ekonomi menunjukan betapa kuat dan besarnya kontribusi kaum perempuan papalele dalam pemberdayaan ekonomi keluarga. Dengan tujuan ahir memberikan kesejahteraan dalam kehidupan keluarga kaum perempuan papalele bergulat dengan putaran waktu dan berbagai tantangan untuk memperoleh keuntungan. Dalam menjalani aktifitasnya sebagai seorang papalele dapat meraut keuntungan perharinya antara Rp.100.000 hingga Rp.300.000. keuntungan yang diperoleh ini kemudian dijadikan sebagai modal tambahan serta pemenuha kebutuhan hidup hari-hari serta pendidikan anak-anak mereka. selain itu sebagai keuntungan yang disisihkan dalam bentuk simpanan (tabungan).

Dengan profesi sebagai seorang papalele, mereka mampu menyekolahkan anak-anaknya hingga mencapai keberhasilan. Dari data yang diperoleh hampir sebagian besar dari anak-anak mereke telah mengecap pendidikan pada bangku perguruan tinggi, bahkan sebagian besar dari mereka telah memiliki pekerjaan tetap sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil), POLRI, TNI dan sektor suasta maupun wira suasta. Kelebihan-kelebihan dari hasil papalele yang diperoleh dimanfaatkan untuk membangaun rumah. Dari data yang di peroleh dilapangan hampir sebagian besar keluarga perempuan papalele memiliki rumah yang permanen (rumah batu). Dengan menjalani profesi sebagai seorang papalele

tingkat kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga dapat dijangkau. Untuk mencapai semuanya itu pendapatan keluarga tidak semata-mata hanya pada aktifitas papalele semata, melainkan juga tambahan-tambahan pemasukan yang diperoleh dari berbagai aktifitas yang dijalani oleh suami. Hampir sebagian besar perempuan papalele memiliki suami yang berprofesi sebagai petani, nelayan, tukang, maupun pekerjaan-pekerjaan yang lebih cenderung bergerak pada sektor nonformal dengan tingkat pendapatan yang tidak menentu (tidak tetap). Sebagian besar diantara mereka menyatakan bahwa profesi sebagai seorang papalele cukup memberikan kontribusi bagi kehidupan keluarga.

Pilihan sebagai seorang perempuan papalele sesungguhnya didasarkan pada konteks kebutuhan masyarakat maupun keinginan untuk melakoni profesi tersebut. Dengan beragam bahan yang diajakan kaum perempuan papalele di Saparua mencoba untuk membentuk suatu ruang sosial yang baru hingga terhindar dari apa yang disebut dengan kemiskinan, keterbelakangan maupun bentuk-bentuk bentuk deskriminasi yang selama ini telah dikonstruksikan dalam dinamika masyarakat. Dengan potensi kelautan yang cukup besar, turut mempengaruhi tingkat konsumsi serta pola hidup masyarakat di Maluku dan Saparua pada khususnya. Kebiasaan mengkonsumsi ikan laut menjadi suatu tradisi dalam kehidupan orang Maluku dan Saparua pada khususnya. Pola hidup ini kemudian menjadikan ikan sebagai bahan dasar

(protein hewani) yang sangat digemari serta memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Hal ini kemudian mendorong lahirnya suatu aktifitas dan tindakan ekonomi dengan menjadikan ikan sebagai suatu bahan dasar untuk diujakan (papalele).

Papalele ikan adalah suatu potret sosial yang juga dijumpai dalam aktifitas pasar Saparua yang diperankan oleh kaum perempuan papalele. aktifitas ini dilakoni setiap hari sama halnya dengan aktifitas papalele lainnya, namun ada juga yang hanya pada waktu-waktu tertentu ketika hasil tangkapan suami (keluarga yang berprofesi sebagai nelayan) memberikan hasil yang baik, ketika hasil tangkapannya sedikit (kurang berhasil) mereka tidak melakoni aktifitas papalele. Hal yang berbeda akan dilakoni oleh papalele yang beraktifitas setiap hari untuk menjajakan ikan di pasar, dimana tidak hanya terbatas pada bagaimana menjual ikan semata melainkan juga bagaimana cara untuk memperoleh ikan untuk diujakan tiap hari. Ikan yang diujakan pun berbeda-beda, ada yang menjajakan ikan asap (ikan asar), maupun ikan mentah (ikan segar). Untuk memperoleh bahan dagangan berupa ikan seorang perempuan papalele harus berusaha mencari dan membeli secara langsung pada para nelayan.

Untuk kebutuhan penjualan ikan di pasar Saparua para papalele tidak hanya mengharapkan hasil tangkapan dari para nelayan yang ada di Pulau Saparua, melainkan juga mengharapkan pasokan ikan dari nelayan-nelayan dari Pulau Nusalaut yang menggunakan alat tangkap jaring bobo. Ikan

yang diperoleh langsung di jual ke pasar. Ketika ikan yang dijual tidak semuanya habis terjual maka ada beberapa pilihan yang dapat dilakukan oleh para papalele yaitu dengan mengawetkan ikan tersebut dengan cara diasar (asapkan) atau diberi es (didinginkan dalam boks/tempat penyimpanan ikan). Ikan yang dibeli dari para nelayan dapat diperoleh dalam harga yang bervariasi tergantung hasil tangkapan para nelayan. Jika ikan yang dibeli dengan harga yang murah maka akan dijual pula dengan harga yang murah. Biasanya untuk jenis ikan momar dan kawalnya diperoleh dengan harga antara Rp.100.000 (ikan murah) maka ikan yang akan dijual ke pasaranpun mura hingga Rp.250.000 (ikan mahal) maka ikan yang akan dijualpun mahal. Menurut para papalele yang telah melakoni profesi ini bertahun-tahun lamanya, keuntungan akan semakin besar pada saat harga ikan dipasar melonjak (mahal) maka keuntungan yang diperoleh semakin berlipat antara Rp.50.000 hingga Rp.100.000 bahkan ada yang keuntungannya mencapai 100% dari jumlah modal yang dikeluarkan. Jika haraga ikan dipasar murah maka keuntungan yang diperoleh punsedikit antara Rp.30.000 hingga Rp.50.000 perloyang. Sedangkan untuk jenis ikan yang besar seperti komu, cakalang dan tuna dibeli dalam harga yang bervariasi antara Rp.10000 hingga Rp.50.000 tergantung ukuran (besarnya ikan) dan dijual kepasar dengan keuntungan perekornya antara Rp.2500 hingga Rp.20.000 tergantung harga ikan dipasaran. Dari semua perempuan papalele yang dijumpai

rata-rata memiliki penghasilan perbulannya diatas Rp.1.000.000, penghasilan inilah yang kemudian dimanfaatkan untuk keperluan pendidikan dan kebutuhan rumah tangga lainnya dan sebagian lagi dapat di simppan.

Dalam menjalani profesi sebagai seorang papalele banyak sudah pengalaman yang diperoleh kaum perempuan papalele di Saparua, banyak suka duka yang dilewati seiring dengan berjalannya waktu. Tidak selamanya aktifitas sebagai seorang papalele ikan menghasilkan keuntungan, kadang juga mereka akan mendapatkan kerugian jika ikan dibeli pada saat susah dengan harga yang mahal namun saat akan dijual ikan dipasaran banyak sehingga harus dijual dengan harga yang murah. Hal inilah yang kadang menyebabkan seorang papalele mengalami kerugian. Untuk itu dalam menjalani aktifitas papalele ikan seseorang dituntut untuk memiliki perhitungan dan kematangan dalam mengelola modal serta memahami kondisi pasaran sehingga tidak mengalami kerugian.

3. Aktiitas Papalele Musiman (Tergantung Hasil Alam)

Aktifitas papalele yang satu ini lebih cenderung dipengaruhi situasi dan kondisi yang dihasilkan oleh alam. Dimana kaum perempuan yang malakoni aktifitas ini hanya bergantung pada hasil alam yang dihasilkan sehingga dengan kata lain aktifitas papalele seperti hanya akan dilakukan khususnya pada saat musim buah-buahan. Biasanya perempuan papalele yang melakukan aktifitas ini membeli hasil alam berupa buah-buahan dari para petani seperti

gandaria, durian, rambutan, langsa, manggis dan buah-buahan sejenisnya. Aktivitas papalele yang dilakukan tiap musiman ini tidak hanya dilakukan di Pulau Saparua saja tetapi juga sering dilakukan didaerah-daerah lain diluar pulau Saparua seperti di Ambon, Masohi bahkan ada yang melakukan aktivitas ini hingga ke luar Provinsi (Papua). Biasanya buah-buahan dibeli dari petenai dengan harga yang murah kemudian dijual lagi dengan harga yang sedikit tinggi sehingga mendapat keuntungan, misalnya durian dibeli dengan harga Rp.5000 hingga Rp. 10000 tergantung ukuran buahnya dan dijual dengan harga Rp.10000 hingga Rp.20000. sedangkan untuk jenis manggis biasanya dibeli dengan harga sepuluh buah Rp.10.000 dijual dengan harga lima buah Rp.10000. sama halnya dengan buah-buahan yang lain. Harga jual yang ditetapkan oleh para papalele musiman inipun tergantung lokasi yang akan dijajakan, jika hanya di pasar Saparua harga yang ditetapkan tidak terlampaui tinggi dengan harga beli, namun jika buah-buahan tersebut dipasarkan diluar Pulau Saparua maka harga jualnya akan semakin meningkat sesuai dengan kondisi dan biaya transportnya.

Untuk aktivitas ini keuntungan yang diperoleh bisa berlipat ganda dari modal yang dikeluarkan. Untuk kaum perempuan yang melakukan aktivitas ini diluar Pulau Saparua khususnya di Ambon dan Masohi mereka dapat melakukan aktivitas pulang pergi sebanyak dua hingga tiga kali dalam seminggu setelah seluruh barang dagangan habis terjual.

Aktifitas papalele seperti ini hanya dapat dilakukan dalam kurun waktu tertentu saja (pada saat musim buah-buahan) biasanya setahun sekali, setelah itu mereka melakoni aktifitas sebagai ibu rumah tangga maupun aktifitas lainnya dalam membantu suami untuk mencari nafka.

4. Aktifitas Papalele di Luar Pulau Saparua

Aktifitas sebagai seorang perempuan papalele tidak hanya dilakoni di Pulau Saparua saja, melainkann aktifitas perekonomian rakyat ini telah dilakukan oleh sebagaian perempuan Saparua ke wilayah-wilayah yang ada di luar Pulau Saparua dengan memakan waktu yang begitu lama, kurang lebih tiga hingga empat bulan. Pada mulanya mereka telah melakukan aktifitas papalele di Pulau Saparua. Untuk melakukan aktifitas papalele di luar Pulau Saparua memerlukan modal awal yang lebih besar dibandingkan dengan dengan aktifitas papalele biasanya. Dengan modal keberanian serta keinginan untuk mencoba aktifitas papalele di luar Pulau Saparua maka mereka mampu melaksanakannya hingga sekaran ini. Bermodalkan sagu empat karton, salah seorang perempuan papalele di Saparua memulai aktifitas papalele di Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Somlaki)⁵⁰. Sagu dibeli dengan harga lima lempeng Rp.2000 kemudian dimasukan kedalam kartun untuk didistribusikan. Setiap kartunya berjumlah seribu lempeng, namun tidak seluruh sagu

⁵⁰ Wawancara dengan Ibu Lusia Patty/Poseratu tanggal 18 Juli 2012

yang dijual dibeli dari produsen, melainkan di produksi sendiri dengan membeli bahan baku berupa sagu tumang (sagu manta) dari para petani.

Melaksanakan aktifitas papalele merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan oleh kaum perempuan, namun aktifitas ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan keluarga sebagai basis dan tujuan akhir dari tindakan ekonomi tersebut. Untuk itulah keluarga merupakan suatu tim kerja yang turut memberikan kontribusi dalam aktifitas papalele. Hal ini akan nampak dalam kebiasaan untuk mempersiapkan barang-barang yang akan dijual (dijual). Sagu yang telah dimasukan kedalam karton diangkut dengan menggunakan transportasi laut, hingga sampai di tempat yang dituju memerlukan ongkos yang cukup besar serta melewati beberapa kali transportasi baik laut maupun darat. Selain itu untuk melaksanakan aktifitas ini mereka (perempuan papalele harus tinggal dalam kurun waktu yang cukup lama antara satu sampai dua bulan. Kondisi inilah yang menyebabkan sagu di jual ke pasaran dengan harga yang lebih mahal (tinggi). Dengan cara berjalan dari rumah ke rumah atau menjajaknya di pasar para perempuan papalele melaksanakan aktifitas ini.

Kurang lebih empat tahun lamanya ia telah menjalani aktifitas papalele ini di luar Pulau Saparua dimulai dari tahun 2008, dengan papalele di luar daerah ia mampu memperoleh keuntungan yang cukup fantastis (besar). Hingga sekarang ini

ia mampu membawa sagu ke luar daerah kurang lebih tiga puluh kartun, dengan keuntungan perkartun Rp.600.000 jika dibeli dari produsen dan Rp.1.000.000 jika diproduksi sendiri oleh kaum perempuan papalele, sehingga untuk satu kali penjualan ia dapat memperoleh keuntungan rata-rata antara Rp.20.000.000 hingga Rp. 25.000.000 juta. Dalam satu tahun ia dapat melakukan aktifitas ini dua kali biasanya pada bulan Januari dan bulan Juni. Untuk melaksanakan aktifitas ini terlebih dahulu ia menyiapkan barang dagangan berupa sagu kurang lebih dua sampai tiga bulan. Dari hasil inilah ia mampu menyanggupi kebutuhan-kebutuhan rumah tangganya bahkan ia telah mampu mempekerjakan salah seorang anggota keluarga sebagai karyawan. Disinilah karakter keuletan dan kejeniusan seorang perempuan papalele dalam melakoni suatu pekerjaan yang dapat memberikan manfaat bagi banyak orang terlebih bagi pertumbuhan keluarga.

Kenyataan bahwa sektor informal khususnya aktifitas papalele yang dilakoni oleh kaum perempuan yang telah ada sejak dulu telah menjadi suatu tradisi atau identitas diri pada masyarakat Saparua. Munculnya perempuan papalele ini disamping didorong oleh faktor ekonomi rumah tangga yang membuat ibu-ibu atau perempuan harus melakukan pekerjaan diluar rumah untuk membantu suami mencari pendapatan tambahan bahkan sumber pendapata utama untuk membiayai kebutuhan rumah terutama untuk membiayai anak masih sekolah, di samping itu juga perempuan ini telah menjadi

suatu budaya kerja, karena ia tumbuh dari dalam masyarakat sendiri. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa perempuan papalele ini adalah wiraswasta murni yang asli dari tradisi dagang masyarakat Saparua. Dimana anggota keluarga merupakan bentuk asli aktifitas ekonomi dimana ayah/suami atau laki-laki sebagai produsen (mencari atau memancing ikan dilaut atau berkebun dan hasilnya dijual oleh istri atau perempuan dalam rumah tangga atau keluarga nelayan/petani).

Pembagian peran dalam keluarga menggambarkan suatu sistem kerja yang tersistematis dimana perempuan merupakan distributor utama (papalele) dari hasil-hasil produksi para petani maupun nelayan maupun barang-barang produksi rumah tangga dalam struktur perekonomian rakyat Maluku khususnya di Saparua. Namun dalam perkembangan hasil produksi yang dijual sebagian tidak lagi secara langsung dari keluarga, tetapi dibeli dari produsen dengan modal sendiri kemudian dijual kembali dengan harga keuntungan yang bervariasi. Fakta lapangan membuktikan bahwa aktivitas ini lebih banyak dilakukan oleh kaum perempuan atau wanita. Hal ini dapat diasumsikan bahwa sebagian besar perempuan adalah pelaku sektor informal dan mereka adalah masyarakat ekonomi lemah yang kurang berdaya⁵¹. Dari fakta

⁵¹ Hal ini senada dengan apa yang diungkap oleh Hans Dieter Evers yang dikutip oleh Loekman Soetrisno dimana hasil studinya mengungkap bahwa 72,92 % penduduk Jawa Tengah yang bekerja sektor perdagangan masuk sektor informal

tersebut sebenarnya telah memberikan alasan yang kuat bahwa sektor informal yang didominasi oleh kaum perempuan ini perlu mendapat perhatian yang serius oleh Pemerintah melalui kebijakan-kebijakan pembangunan serta program-program pemberdayaan. Hal ini dikarenakan sektor informal ini mampu bertahan ditengah terpaan krisis ekonomi dunia yang melanda negara-negara di dunia dan juga memberikan kontribusi yang positif dalam pemecahan masalah pengangguran (tenaga kerja) dan penanggulangan kemiskinan.

Fakta pembangunan dan kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah yang sangat disayangkan selama ini ialah masih kurangnya perhatian dan keseriusan pemerintah dalam mendorong peningkatan sektor nonformal, Hal ini tergambar dalam berbagai program kerja dan kebijakann-kebijakan yang ditempuh sering merugikan sektor informal yang merupakan basis ekonomi keluarga lemah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Evers dalam Loekman Soetrisno⁵². Apa

(self-employed) dan 81,6 % penduduk yang bekerja disektor informal adalah perempuan. Lebih lanjut menurut evers sektor informal ini memiliki potensi untuk memecahkan masalah kesempatan kerja, sehingga diperlukan intervensi kebijaksanaan yang mampu memberikan kelestarian dan pengembangan usaha mereka, Loekman Soetrisno 1997 hal 46-47.

⁵² Ada beberapa kebijakan yang sering merugikan sektor informal yakni, pertama adanya persepsi dikalangan Pemerintah Daerah di Indonesia bahwa sektor Informal ini merupakan salah satu sumber PAD (Pendapatan Asli Daerah) melalui penarikan retribusi. Retribusi pada dasarnya merupakan pajak yang adalah kewajiban setiap warga negara untuk membayarnya. Akan tetapi apa yang sering terjadi adalah bahwa Pemda demi mencapai target pencapaian PAD, Pemda menaikkan retribusi yang dikenakan kepada para pedagang kecil yang ada di pasar maupun yang

yang dikemukakan ini memberikan gambaran bahwa sesungguhnya masih banyak kebijakan Pemerintah Daerah di Indonesia belum seutuhnya mengakomodir kepentingan orang-orang yang bergerak pada sektor informal. Lebih dari pada itu sektor informal dipandang sebagai sektor yang tidak penting dan potensial dalam rangka pemecahan masalah pengangguran dan kemiskinan (pemberdayaan ekonomi rakyat). Namun pada sisi yang lain sektor informal jika ditata dan dikelola secara optimal maka tidak mungkin akan memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan masyarakat. Hal ini sesungguhnya terpulang pada pandangan Pemerintah dalam memahami dan mengelola sektor informal, sebagai salah satu sektor usaha yang turut memberikan peran dalam peningkatan ekonomi rakyat.

Pembangunan tidak semestinya dimaknai dalam pandangan sebagai sesuatu yang bersifat moderen (ekonomi semata), melainkan pembangunan mesti dipahami secara

berjualan disepanjang kaki lima diatas pendapatan riel sipedagang kecil. Kedua, deregulasi masalah ekonomi menimbulkan masalah timbulnya masalah persaingan antara modal kuat dengan modal kecil. Munculnya pasar sualayan misalnya telah mendesak pedagang kecil yang banyak menyingir kedaerah pinggiran kota yang kurang strategis letaknya demikian menurunkan pendapatan mereka. ketiga, masih adanya persepsi dkalangan pejabat pemerintah Daerah yang melihat bahwa sektor informal merupakan kelompok yang tidak tertip dan karenanya perlu ditertipkan agar mudah dibina. Maka keluarlah berbagai persyaratan baru dari pihak pemerintah daerah seperti Surat Izin Usaha Perdagangan(SIUP), Tanda Izin Tempat Usaha, atau kartu tanda perdagangan. Bagi pedagang besar hal-hal seperti ini tidak masalah tetapi bagi pedagang kecil atau sektor informal adanya berbagai surat izin itu selain mengarah pada pelipatgandaan prosedur admistrasi juga melan biaya dan menyita waktu, ibid hal,47-48.

konprehensif (utuh) dengan tidak mengabaikan aspek-aspek yang lain seperti aspek Sosiologis, kultural, historis dan ekologi sehingga tidak menimbulkan ketimpangan dalam kebijakan-kebijakan yang ditempuh. Kecendrungan untuk memprioritaskan ekonomi makro lebih mendapat prioritas, hal ini dapat dibuktikan dengan munculnya berbagai regulasi yang memberikan dukungan politis maupun subsidi secara langsung pada perusahaan-perusahaan besar padat modal melalui investasi modal asing yang besar namun tidak efisien menjadi fakta yang sering nampak, sementara ekonomi mikro (kecil) kurang mendapat perhatian malah terkesan diabaikan. Kondisi inilah yang selama ini dialami oleh perempuan papalele di Saparua yang hingga kini terus berjuang untuk mempertahankan eksistensi demi kebutuhan rumah tangga.

Eksistensinya sebagai salah satu bidang usaha yang bergerak di sektor informal dengan menampilkan kreatifitas yang berbasis simbol-simbol kultural orang Maluku seakan tidak pernah dihiraukan. Hal ini terbukti, hingga kini dari sejumlah perempuan papalele yang telah melakoni profesi ini berpuluh-puluh tahun lamanya hingga saat ini belum pernah mendapat bantuan modal maupun penyuluhan-penyuluhan kewirausahaan yang mampu memberikan motivasi dan dorongan untuk mengembangkan diri. Perempuan papalele cenderung mengembangkan diri dengan kemampuan modal sendiri tanpa ada partisipasi pemerintah sebagai penggerak perekonomian masyarakat dalam upaya peningkatan ekonomi bangsa.

BAB IV

PAPALELE DALAM PRESPEKTIF GENDER

A. Apa Itu Gender

Konsep penting yang perlu dipaami dalam rangka membahas masalah kaum perempuan ialah kepekaan untuk membedakan antara konsep seks (jenis kelamin) dan konsep gender. Pemahaman dan perbedaan terhadap kedua konsep ini sangat penting dalam upaya untuk menganalisis persoalan-persoalan ketidakadilan sosial yang selama ini dialami oleh kaum perempuan. Hal ini dikarenakan ada kaitan erat antara gender dan ketidakadilan gender dengan struktur ketidakadilan masyarakat secara lebih luas. Dengan demikian pemahaman dan perbedaan yang jelas antara konsep gender dan seks sangat diperlukan dalam membahas masalah-masalah ketidakadilan sosial. Maka dapat dipahami secara sungguh bahwa gender dan ketidakadilan lainnya sosial memiliki keterkaitan. Analisis gender merupakan salah satu analisis sosial yang baru dan terlahir dari berbagai realitas ketimpangan sosial yang terjadi dalam masyarakat terhadap kaum perempuan⁵³.

⁵³ Semabagiman yang diungkap oleh Mansour Fakaih dalam Analisis Gender & Transformasi Sosial 2012 hal 4 Analisis gender dalam sejarah pemikiran manusia tentang ketidakadilan sosial dianggap suatu analisis baru dan mendapat sambutan hangat akhir-akhir ini. Dibanding dengan analisis sosial lainnya sesungguhnya analisis gender tidak kalah mendasar. Analisis gender justru ikut mempertajam analisis kritis yang sudah ada. misalnya analisis kritis yang dikemukakan oleh Karl Marx ketika melakukan kritik terhadap sistem kapitalisme, akan lebih tajam jika

Pengungkapan masalah kaum perempuan dengan menggunakan analisis gender sering mendapat perlawanan baik dikangan laki-laki maupun perempuan sendiri, tidak hanya itu analisis gender justru sering ditolak oleh mereka yang melakukan kritik terhadap sistem sosial yang dominan seperti kapitalisme. Membicarakan persoalan perempuan pada dasarnya merupakan suatu upaya untuk melakukan kritik terhadap sistem dan struktur budaya yang telah mapan serta status quo yang telah lama terbentuk dalam konstruksi budaya yang telah lama didominasi oleh kaum laki-laki. Hal inilah yang kemudian menimbulkan suatu kesulitan dalam membicarakan atau membahas gender dalam realitas masyarakat yang menganut sistem budaya patriaki. Kesulitan lain yang dalam mendiskusikan gender pada dasarnya berarti membahas hubungan kuasa yang sifatnya sangat pribadi, yakni menyangkut dan melibatkan individu dan pribadi masing-masing yang hidup dalam suatu sistem dengan kekuatan emosional yang kuat serta saling menghargai wilayah pribadi masing-masing. Pada posisi inilah perempuan yang seringkali mendapat perlakuan yang tidak adil dan sering didominasi oleh kaum laki-laki yang cenderung dianggap superior (berkuasa). Oleh karenanya itu pemahaman tentang konsep gender sesungguhnya merupakan sesuatu

pertanyaan tentang gender juga dikemukakan. Demikian juga analisis kritis lain seperti analisis hegemoni ideologi dan kultural yang dikembangkan oleh Antonio Gramsci, merupakan kritik terhadap analisis kelas yang dianggap sangat sempit. Dalam analisis apapun, tanpa mempertanyakan gender terasa kurang mendalam.

yang sangat mendasar dalam rangka menjelaskan masalah hubungan laki-laki dan perempuan yang sering kali berkaitan dengan hal kemanusiaan masing-masing.

Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir istilah atau kata gender mulai hangat diperbincangkan dan didiskusikan dalam berbagai ruang-ruang ilmiah maupun tulisan-tulisan ilmiah. Semuanya itu bermuara pada suatu tujuan akhir yang menghendaki adanya perubahan sosial dalam tatanan kehidupan masyarakat yang selama ini masih membedakan kedudukan laki-laki dan perempuan. Proses inilah yang kemudian memberikan dampak sosial bagi kaum perempuan yang selama ini tergilas dalam konstruksi budaya maupun agama. Untuk itu diperlukannya suatu pemahaman yang sangat mendasar mengenai konsep atau istilah gender itu sendiri⁵⁴. Sehingga dapat dipahami oleh kita, bahwa

⁵⁴ Menurut Mansour Fakih dalam Analisis Gender dan Transformasi Sosial 2012 hal, 7-8 menjelaskan bahwa untuk memahami konsep gender harus dibedakan kata gender dengan kata seks (jenis kelamin). Pengertian jenis kelamin merupakan pensipatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. misalnya bahwa manusia jenis laki-laki adalah manusia yang memiliki atau bersifat seperti daftar berikut ini: laki-laki adalah manusia yang memiliki penis, memiliki jengkal (kaki menjing) dan memproduksi sperma. Sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi seperti rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, memiliki vagina, dan mempunyai alat menyusui. Alat-alat tersebut secara biologis melekat pada manusia jenis perempuan dan laki-laki selamanya. Artinya secara biologis alat-alat tersebut tidak bisa dipertukarkan antara alat biologis yang melekat pada manusia laki-laki dan perempuan. Secara permanen tidak berubah dan merupakan ketentuan biologis atau sering dikatakan sebagai ketentuan gender. Sedangkan konsep lainnya adalah konsep gender, yakni suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun kaum perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural.

sesungguhnya konsep gender bukanlah sesuatu yang bersumber pada kodrati dan melekat secara mutlak pada diri laki-laki atau perempuan melainkan sesuatu yang ada dalam diri manusia berdasarkan suatu konstruksi sosial maupun kultural dan dapat dipertukarkan antar manusia yang berjenis laki-laki maupun perempuan.

Identitas perempuan sepanjang masa lebih dibentuk dan ditentukan oleh berbagai pihak. Identitas tersebut sering kali dikonstruksikan melalui relasi-relasi kekuasaan yang timpang, sehingga melahirkan bentuk-bentuk ketidakadilan terhadap kaum perempuan pula⁵⁵. Konsep gender sesungguhnya

Misalnya bahwa perempuan dikenal lemah lembut, cantik, emosional atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa. Ciri dari sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Artinya ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, keibuan, sementara juga ada perempuan yang kuat, rasional, perkasa. Perubahan-perubahan ciri dari sifat tersebut dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat yang lain. Misalnya saja zaman dahulu disuatu suku tertentu perempuan lebih kuat dari pada laki-laki, tetapi pada zaman yang lain dan ditempat yang berbeda laki-laki lebih kuat. Juga perubahan bisa terjadi dari kelas ke kelas masyarakat yang berbeda. Di suku tertentu, perempuan kelas bawah di pedesaan lebih kuat dari pada laki-laki. Semua hal dapat dipertukarkan antara sifat perempuan dan laki-laki yang bisa berubah dari waktu ke waktu serta berbeda dari tempat ke tempat lainnya, maupun berbeda dari satu kelas ke kelas lainnya itulah yang dikenal dengan konsep gender.

⁵⁵ Hal ini senada dengan apa yang di ungkap oleh Arivia dalam Filsafat Berprespektif Feminis 2003 hal, 5-9 menjelaskan bahwa karya-karya filsafat filsuf laki-laki sering memberikan pernyataan yang bersifat misogini. Pernyataan seperti dapat ditemukan antara lain dalam konsep tentang manusia dari Aristoteles. Ia mengatakan bahwa laki-laki secara alamiah superior dan pemimpin, sedangkan perempuan inferior dan objek. Sementara itu Schopenhauer mengatakan bahwa perempuan lebih cocok untuk menjadi perawat dan mengajar anak-anak, karena pada dasarnya mereka adalah anak-anak. Mereka mempunyai pandangan sempit. Singkat kata mereka selama hidupnya adalah anak-anak yang berbadan besar.

megacu pada hak-hak kemanusiaan seseorang tanpa memandang berbagai bentuk ketimpangan-ketimpangan sosial yang telah dibentuk dalam pola hidup dan perilaku masyarakat. Menghendaki adanya kesetaraan atau kesejajaran manusia antara perempuan dan laki-laki dalam peran-peran sosialnya menjadi sesuatu yang sangat esensial dalam berbagai percakapan yang mengusung gender sebagai tema sentral diskusi, debat maupun penulisan-penulisan ilmiah. Percakapan mengenai gender tidak sedikit mendapat pertentangan dikalangan masyarakat mulai dari tokoh-tokoh agama, kaum laki-laki maupun dari kalangan perempuan yang selama ini hidup dalam bentukan budaya patriaki. Membicarakan gender sama artinya dengan menggugat sistem kekuasaan yang selama ini hidup dan berkembang dalam masyarakat maupun keluarga sebagai basis dari ketimpangan sosial yang selama ini terjadi.

Ketimpangan sosial dan bias gender merupakan suatu realitas sosial yang sering kali nampak dalam berbagai bentuk kehidupan masyarakat dan tidak hanya pada satu komunitas, bangsa melainkan mencakup benua. Hal ini nampak dalam praktek-praktek hidup masyarakat itu sendiri baik pada masa lalu maupun dalam kehidupan masyarakat moderen saat ini yang cenderung memberikan kerugian terhadap kaum perempuan⁵⁶. Konstruksi sosial yang menyampingkan aspek

⁵⁶ Hal ini senada dengan apa yang diungkap oleh Lim Sing Meij dalam bukunya yang berjudul Ruang Sosial baru perempuan Tionghoa *Sebuah Kajian Pascakolonial* 2009

kesetaraan laki-laki dan perempuan menimbulkan berbagai fenomena kehidupan sosial yang sangat timpang serta menimbulkan kerugian dan penderitaan bagi kaum perempuan. Prilaku menyimpang serta kekerasan terhadap perempuan merupakan fakta kekinian yang sering kali muncul diberbagai aspek kehidupan masyarakat negara-negara yang sedang berkembang saat ini. Hal inilah yang kemudian mendorong para ilmuwan untuk melakukan penelitian dan kajian sosial diseputar kemarjinalan kaum perempuan sebagai suatu upaya untuk melepaskan kaum yang dianggap lemah ini dari berbagai kungkungan bbudaya, agama serta berbagai

hal 2-3 menyatakan bahwa sampai dengan abad ke 20-an pendapat para filsuf tentang perempuan masih menempatkan perempuan sebagai liyan. Istilah lian adalah pembakuan dari kata dalam bahasa Inggris the other, Lyan dalam teori pascakolonial merupakan istilah yang sangat penting dalam mendefinisikan identitas subjek. Lyan mengacu pada subjek Kolonial yang posisinya sebagai mausia marjinal dalam diskursus imperial. Lyan dapat dikenali atara lain dari oposisinya dengan pusat : yang beradap dengan oposisinya yang biadab. Lihat Ascraft dan Griffiths (2004). Pendapat Freud tentang perempuan bahwa *anatomy is destiny*, telah banyak digunakan orang sebagai justifikasi untuk merendahkan perempuan. Teori freud yang lainnya, yaitu teori tentang *Oidipus Komplex*, memberikan pemahaman bahwa perempuan adalah makluk inferior yang tidak sempurna. Hal yang sama juga di ungkap oleh Levy 1991 hal 42-43 yang menyatakan bahwa di Tiongkok, mekanisme kontrol laki-laki terhadap seksualitas perempuan dilakukan dengan mengikat kaki perempuan sejak dini. Pengikat kaki tersebut dikenal dengan *foot binding*. Fort Binding ialah tradisi yang pengikatan kaki perempuan sejak mereka berusia tujuh tahun. Pengikatan kaki ini ini pada mulanya adalah simbol dan status bagi perempuan kalangan kerajaan. Tradisi ini kemudian menjadi simbol dan status bagi perempuan dari kalangan keluarga kaya. Foot binding ini dapat bertahan hingga 1000 tahun. Awal dari foot biding itdak diketahui secara pasti.

konstruksi sosial yang cenderung memposisikan kaum perempuan sebagai kaum yang lemah dan tidak berdaya.

Kritik inilah yang kemudian melahirkan berbagai pikiran dan teori feminis dalam pendekatan akademis sebagai suatu upaya untuk membela hak-hak kaum perempuan. Pemikiran feminis merupakan gagasan yang telah lama di perbincangkan oleh masyarakat di barat, namun percakapan mengenai gerakan feminisme yang dipercakapkan cenderung mengakomodir kaum perempuan di dunia barat (moderen) dan mengabaikan realitas sosial kaum perempuan di dunia ketiga (Asia). Barualah saat ini teori feminisme ramai diperbincangkan pada berbagai lapisan masyarakat. Gerakan feminisme yang dipelopori kaum intelektual ini sesungguhnya merupakan suatu bentuk kritik dan guagatan terhadap realitas kehidupan manusia yang cenderung meemanfaatkan dan mengorbankan kaum perempuan. Perjuangan perempuan untuk mengejar kesejajarannya dengan laki-laki dalam konteks kehidupan bangsa Indonesia sesungguhnya telah dimuali sejak perlawanan bangsa ini terhadap kaum penjajah.

Munculnya tokoh-tokoh pejuang perempuan dari beberapa daerah di Nusantara yang turut berjuang kemerdekaan menjadi bukti perjuangan emansipasi kaum perempuan untuk mensejajarkan kedudukannya dengan kaum laki-laki telah ada sejak munculnya revolusi fisik yang masih bersifat kedaerahan. Perempuan Indonesia memiliki sejarah keterlibatan yang panjang dalam pergerakan

memperjuangkan emansipasi perempuan ataupun emansipasi bangsa. Di abad ke-19 sejumlah perempuan antara lain Cut Nyak dien, Cut Mutia keduanya dari Aceh, Martha Christina Tiahahu dari Maluku, serta Nyai Ageng Serang dari Jawa mengangkat senjata melawan kolonialisme Belanda. Kemudian, pada awal abad ke-20 para pendekar perempuan memfokuskan perjuangannya agar tersedia pendidikan bagi perempuan⁵⁷. Dalam dekade berikutnya, semakin perempuan secara aktif terlibat dalam perjuangan panjang memperoleh kemerdekaan dan untuk memperoleh kesetaraan. Pada tahun 1912 untuk pertama kalinya berdiri sebuah organisasi resmi perempuan yang kemudian segera disusul oleh organisasi perempuan lainnya. Pergerakan perempuan Indonesia segera berkiprah dan mengambil peran penting dalam perjuangan merebut kemerdekaan dan perbaikan situasi perempuan Indonesia selama periode 1928-1965. Ketika pada tahun 1966 pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Jenderal Soeharto mengambil alih kekuasaan, rakyat Indonesia mulai memasuki kehidupan baru di bawah pemerintahan otoriter. Segera setelah itu, keberadaan organisasi masa dibawah dibatasi termasuk organisasi perempuan. Betuk kritik merupakan suatu refleksi kaum perempuan terhadap diri dan lingkungannya yang selama ini dikuasai kaum laki-laki sebagai kaum yang kuat (superior).

⁵⁷ Lihat Tita Marlita dan E. Kristi Poewandari, *Pergerakan Perempuan Indonesia: 1928-1965* hal, 81-82 *Perempuan Indonesia Dalam Masyarakat Indonesia yang Tengah Berubah*.

B. Feminisme Suatu Refleksi dan Kritik Sosial

Reaksi penolakan yang selalu muncul ketika membahas feminisme adalah sesuatu yang datang dari barat, anti laki-laki pendukung seks bebas dan lesbianisme. Hal ini kemudian menjadikan orang untuk tidak berfikir rasional dan menyimpang dari kaidah-kaidah hidup sebagai makhluk sosial yang merdeka serta memiliki kebebasan yang sama dengan orang lain. Dan karena itu pemahaman yang mendasar mengenai apa itu feminisme merupakan sesuatu yang sangat penting sebagai upaya kritik sosial terhadap berbagai realitas yang selama ini mengalai ketimpangan sosial melalui relasi-relasi yang timpang. Berbicara mengenai feminisme berarti berbicara soal paham yang tidak berdiri sendiri. Feminisme diwarnai latar belakang buday, etnis, ras, ekonomi, pendidikan, agama. Feminisme tidak hanya berakar (tumbuh) dari kebudayaan barat melainkan juga bertumbuh dalam kebudayaan timur. Hal ini kemudian bukan menjadi suatu masalah yang penting untuk diperdebatkan, namun yang paling esensial dari semuanya itu ialah apa yang menjadi perjuangan dari feminisme itu sendiri untuk memperjuangkan penghapusan (penghilangan) ketidakseimbangan relasi antara perempuan dan laki-laki.

Kerancuan dalam memahami konsep feminisme seringkali membuat orang sering mendefinisikan feminitas sebagai suatu kodrat dan bukan sebagai suatu konstruksi

sosial dan budaya. Menurut Moi, dalam esainya *Feminist, Female and Feminine*, feminin adalah posisi politis perempuan dalam wacana untuk menentang budaya patriarki, *female* berkenaan dengan realitas biologis. Dalam kerangka itu, jangan juga lupa bahwa seks dan jender adalah dua hal berbeda. Seks adalah realitas biologis. *Femaleness* dan seks adalah kodrati, tetapi jender ditentukan Tuhan, bersifat tetap, tak dapat diubah. Buatan manusia adalah berbeda bergantung pada siapa manusianya, di mana lokasinya, dan apa yang mempengaruhi hidupnya. Karena itu, feminitas dan jender bersifat *fluid*, subjektivitas dan identitas menjadi sesuatu yang tidak pernah dapat dipatok. Karena sifatnya itu pula, konstruksi jender dan feminitas dapat berubah atau diubah. Paham yang ingin mengubah konstruksi jender yang tidak adil disebut feminisme⁵⁸.

Kritik lain yang selalu muncul terhadap feminisme adalah bahwa feminisme anti laki-laki dan bahwa feminisme menganggap laki-laki sebagai penyebab dari semua masalah. Feminisme sesungguhnya merupakan suatu refleksi dan kritik terhadap realitas sosial yang cenderung memperlemah posisi kaum perempuan dalam relasi-relasi sosial yang selama ini berlangsung secara timpang. Feminisme terlahir dalam suatu kesadaran berpikir yang kritis untuk menggugat bentuk-bentuk ketidakadilan, diskriminasi dan perilaku menyimpang

⁵⁸ Lihat Nori Andriyani dan Aquarini Priyatna Prabasmoro, *Perempuan Indonesia Dalam Masyarakat Yang Tengah Berubah: 2000 hal, 144.*

yang merugikan kaum perempuan. Munculnya berbagai bentuk-bentuk ketidakadilan terhadap kaum perempuan menjadi objek yang menarik untuk membuka ruang kritik terhadap realitas sosial yang selama ini mengorbankan kaum perempuan. Namun tidak selamanya pemikiran feminisme dapat diterima oleh masyarakat baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini dikarenakan konstruksi sosial dan budaya yang dibangun dalam kurun waktu yang cukup lama sehingga menimbulkan resistensi budaya maupun kedudukan laki-laki sebagai kaum yang selama ini dianggap superior (kuat).

Gerakan untuk memperjuangkan kesetaraan antara kaum perempuan dengan kaum laki-laki pada hakekatnya adalah gerakan transformasi. Hakekat gerakan ini merupakan transformasi perempuan sebagai suatu proses untuk menciptakan hubungan antara sesama manusia (laki-laki dan perempuan) agar lebih menjadi erat serta eksis. Hubungan ini menyangkut aspek ekonomi, politik, kultural, pertanian, lingkungan dan sebagainya. Memperjuangkan keadilan gender merupakan tugas berat karena masalah gender adalah masalah yang sangat intens dan proses pencarian solusinya perlu dilakukan secara komprehensif. Sehubungan dengan itu perlu ada konsistensi dalam hubungan strategis jangka panjang dalam rangka memperkuat pencapaian tujuan seperti yang sulit diintimidasi ataupun dikalahkan dibandingkan perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh individu.

Berkaitan dengan hal tersebut muncullah aliran-aliran pemikiran yang dikenal dengan istilah feminisme. Feminisme tidak dapat melepaskan dirinya dari konteks politik. Feminisme adalah suatu gerakan politis yang menggugat struktur interaksi kekuasaan di antara perempuan dan laki-laki. Dibalik kemajemukan aliran-aliran pemikiran tentang feminis itu, ternyata ada kesamaan pemikiran antara pemikiran-pemikiran dan biasanya mereka selalu mempertanyakan hubungan dominasi dan subordinasi antara laki-laki dan perempuan. Dalam konteks ini ke-“laki-laki”-an dan ke-“perempuan”-an tidak boleh dipahami secara biologis, yakni sebagai jenis kelamin (seks) melainkan sebagai konstruksi sosial, yang biasanya disebut “gender”⁵⁹. Perempuan dengan kemampuan alamiahnya mampu menerjemahkan kebutuhan pangan keluarga lewat tindakan rasional dan pada gilirannya ketahanan pangan dapat tercapai. Kenyataan tersebut seirama dengan apa yang dikatakan Watloly (2005) bahwa membangun adalah sebuah proses kecerdasan diri yang makin memantapkan eksistensi serta sikap berbagi dan menyumbang (*share*) bagi sesama dalam proses diskursus budaya (*cultural discourse*) untuk membangun sebuah tata peradaban yang maju dan luas⁶⁰.

⁵⁹ Lihat Aphrodite Milana Sahusilawane & Esther Kembauw, dalam *Petani Perempuan Kisar Dalam Perspektif Gender Studi Kasus Di Pulau Kisar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku*: 2010, hal. 50.

⁶⁰ Lihat Watloly Aholiab, dalam *Maluku Baru, Bangkitnya Mesin Eksistensi Anak Negeri*: 2005, hal. 85.

Fenomena bias gender merupakan suatu fakta yang seringkali nampak dalam kehidupan keluarga yang kondisi sosial ekonominya kurang terlalu mapan. Dalam kondisi ini perempuan cenderung menjadi korban berbagai tindakan-tindakan yang menimbulkan kerugian bagi kaum perempuan. Karena itu diperlukan suatu pemikiran yang kritis serta motivasi yang kuat untuk menstimulasi kaum perempuan yang selama ini ada di tengah-tengah berbagai fenomena sosial yang memprihatinkan. Fenomena bias gender yang sering terjadi di tengah masyarakat menjadi motivasi dan stimulasi utama untuk berkembang pahamnya feminisme di dunia masyarakat modern. Feminisme tumbuh sebagai suatu gerakan sekaligus pendekatan yang berusaha merombak struktur yang ada karena dianggap telah mengakibatkan ketidakadilan terhadap kaum perempuan. Beberapa penjelasan tentang aliran feminis yang berkembang seiring dengan dinamika budaya modern ⁶¹. Berikut ini beberapa pemikiran feminis yang coba dikutip dari Nugroho R, 2008 hal. 88, antara lain:

a. Feminisme Liberal

Aliran pemikiran feminisme ini relatif lebih sering diungkapkan dalam literatur-literatur tentang perempuan, selain teori feminisme Marxis dan Sosialis. Ketiga teori ini sering ditelaah, karena ketiga teori ini lebih “*membumi*”.

⁶¹ Nugroho R, :2008

Pemikiran-pemikiran feminisme lain biasanya dibahas dengan keterbatasan, bahkan jarang sekali. Feminisme liberal berkembang di Barat pada abad ke-18, bersamaan dengan semakin populernya arus pemikiran baru “aman pencerahan” (*enlightment* atau *age of reason*).

b. Feminisme Radikal

Pemikiran lain tentang feminisme juga berkembang yaitu feminisme radikal. Pendekatan ini menekankan perbedaan struktural antara perempuan dan laki-laki dengan memberikan penilaian yang lebih positif terhadap ciri-ciri feminisme dari ciri-ciri maskulin. Feminisme radikal melihat bahwa akar permasalahannya adalah sistem sex dan gender. Sistem ini berbicara tentang laki-laki sebagai salah satu elemennya. Dalam feminisme radikal ada dua kelompok yang mempunyai pandangan berbeda tentang gender, seksualitas, dan reproduksi. Feminisme radikal ini terdiri dari feminisme radikal libertarian dan feminisme radikal kultural.

1. Feminisme Radikal Libertarian

Feminisme ini menganggap bahwa gender sangat “*merugikan*” karena mengharukan perempuan untuk bersifat feminis dan laki-laki maskulin. Solusinya yang ditawarkan adalah androgini. Mengenai seksualitas, paham ini menekankan agar perempuan dapat menikmati semua jenis kegiatan seksual: heteroseksual, lesbian, autoerotik, dan lain-lain. Mengenai reproduksi, kelompok ini menganggap

teknologi reproduksi sebagai suatu kebebasan perempuan karena dengan teknologi ini perempuan tidak lagi harus menjadi ibu biologis.

2. Feminisme Radikal Kultural

Menurut paham ini, masalah feminitas ada pada penilaian yang rendah atas sifat-sifat feminin. Solusi yang ditawarkan menurut paham ini, adalah menolak androgini dan mencoba memberi makna baru kepada feminitas. Mengenai seksualitas, kelompok ini menekankan bahaya seks heteroseksual dengan asumsi bahwa laki-laki mengontrol seksualitas perempuan. Feminisme radikal kultural berpendapat bahwa teknologi reproduksi dapat membahayakan perempuan karena menjadi ibu biologis adalah sumber kekuatan perempuan.

Pemikiran yang paling signifikan dari pemikiran feminisme radikal bagi pemikiran feminis secara keseluruhan adalah pemikiran Kate Millet dalam bukunya *Sexual Politics: "sex is political... male female relationship is the paradigm for all power relationship"* (Tong, 1998, hal. 49). Apa yang bersifat seksual bersifat politis. Hubungan perempuan dan laki-laki adalah paradigma dari keseluruhan hubungan kekuasaan. Paradigma itu terus berlaku untuk menilai keseimbangan kekuatan antara laki-laki dan perempuan baik di sektor domestik maupun di sektor publik. Kelemahan pendekatan itu terletak pada kecenderungan untuk memusatkan perhatian pada perbedaan karakteristik antara perempuan dan laki-laki.

Hal ini berbahaya karena sangat bersifat deterministic dan dapat menciptakan tidak ada peluang untuk mengubah pola hubungan gender yang selama ini ada.

c. Feminisme Marxis dan Sosialis

Pemikiran tentang feminis ini muncul dilatarbelakangi para pencetusnya (Karl Marx dan Friedrich Engels) yang melihat bahwa kaum perempuan kedudukannya identik dengan kaum proletar pada masyarakat kapitalis barat. mereka dalam teorinya mempermasalahkan konsep kepemilikan pribadi, dan menganalogikan perkawinan sebagai lembaga yang melegitimasi pria yang memiliki istri secara pribadi. Gejala inilah yang dipandang oleh kedua tokoh ini merupakan bentuk penindasan pada perempuan.

Perempuan hanya dapat dibebaskan dari penindasan ini, kalau sistem ekonomi kapitalistis diganti dengan masyarakat sosialis, yaitu masyarakat egaliter tanpa kelas-kelas. Untuk mencapai tujuan masyarakat sosialis ini harus dimulai juga dari keluarga, di mana para isteri harus dibebaskan dahulu agar dia dapat menjadi dirinya sendiri, bukan milik suaminya. Kalau sistem egaliter dalam keluarga dapat tercipta, maka ini akan tercermin pula pada kehidupan sosial. Perkembangan masyarakat selanjutnya adalah menjadi agraris, yaitu masyarakat yang mulai menetap karena bercocok tanam. Berhubung masyarakat sudah mulai merasa perlu memiliki tanah baik untuk bercocok tanam dan tempat tinggal, konsep kepemilikan pribadi mulai timbul.

Tanah dan alat-alat produksi pangan pun menjadi harta pribadi. Selanjutnya karena hasil-hasil pertanian meningkat, maka materi melimpah selanjutnya dapat dijadikan alat untuk “jual beli”. Mencermati hal ini maka komoditas menjadi penting, dan menjadi milik suami untuk meningkatkan produksi pertanian. Hal ini terjadi karena dominan atau wilayah perempuan sebelumnya memang di rumah, dan sektor di luar rumah adalah domain para suami. Keadaan ini telah memberi peluang bagi para suami untuk merasa memiliki “materi” yang diperoleh dari wilayah di luar rumah. Berhubung nilai produksi ini berharga sebagai alat “jual beli”, maka keinginan keluarga (suami) untuk meningkatkan produksi pertanian dan ternak menjadi terus meningkat. Hal ini tentu memerlukan tenaga kerja, yang menurut Engels sebagai cikal bakal adanya perbudakan. Pekerjaan perempuan di wilayah domestik menjadi tidak bernilai dibandingkan materi yang dikumpulkan oleh suami. Menurut Engels perempuan menjadi *the head servant* (kepala pembantu). Hal ini bisa terjadi karena pria menguasai basis material yang lebih besar di mana ia diwajibkan untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Suami dengan sendirinya mempunyai posisi yang lebih kuat dan istri serta anak-anaknya menjadi pihak yang lemah karena ketergantungan ekonomi mereka pada kepala keluarga. Bahkan, istri dianggap sebagai “budak” seperti yang dikatakan Engels:

“...the wife became the head servant, excluded from all participation in social production. The individual family is founded on the open or concealed domestic slavery of the wife..... (... istri menjadi kepala pembantu, tidak di atas perbudakan domestik dari istri, terbuka atau tersembunyi)

Penerapan ideologi Marx-Engels telah dilakukan oleh para feminis yang berorientasi sosialisme. Feminisme sosialisme adalah gerakan untuk membebaskan para perempuan melalui perubahan struktur patriarkat. Perubahan struktur patriarkat bertujuan agar kesetaraan gender dapat terwujud. Menurut para feminis sosialis, perwujudan kesetaraan gender adalah salah satu syarat penting untuk terciptanya masyarakat tanpa kelas, egaliter, atau tanpa hierarki horisontal. Dalam kiprahnya, feminisme sosialis adalah gerakan feminisme yang mengadopsi teori Marxisme, yang teori penyadaran kelompok tertindas, agar para perempuan sadar bahwa mereka merupakan “kelas” yang tidak diuntungkan. Proses penyadaran ini adalah usaha untuk membangkitkan rasa emosi (emotional arousal) pada para perempuan agar mereka bangkit untuk mengubah keadaannya. Timbulnya kesadaran bahwa para perempuan adalah kaum tertindas, akan membuat para perempuan bangkit emosinya, dan secara kelompok domain (pria). Semakin tinggi tingkat konflik antara kelas perempuan dan kelas domain, diharap dapat meruntuhkan sistem patriarkat. Premis

ini berasal dari konsep dialektis yang dikembangkan oleh Hegel yang diacu oleh Marx: “kapitalisme terdiri dari konflik-konflik kelas yang akhirnya akan membuat sistem tersebut runtuh, sehingga tercipta masyarakat egaliter”

Secara substansi, feminisme marxis dan feminisme sosial agak berbeda dalam konteks cara pandang kedua kelompok penganut mengenai penyebab ‘tertindasnya’ perempuan. Feminisme marxis lebih melihat kepada klasisme daripada seksisme, sementara feminisme sosialis lebih melihat kepada kapitalisme dan patriarki. Akan tetapi pada akhirnya yang terlihat adalah bahwa pemikiran feminisme marxis dan sosialis percaya bahwa opresi perempuan bukanlah hasil dari tindakan individu, melainkan produk dari struktur politis, sosial, dan ekonomis tempat seorang individu hidup (Tong, 1998, hal. 2)

d. Feminisme Psikoanalisis dan Gender

Menurut feminisme psikoanalisis dan gender, keterangan tindakan perempuan berakar dari psiknya. Terutama dari cara berpikir perempuan. Dengan berlandaskan pada konsep-konsep Freud, kelompok feminis ini menyatakan bahwa ketimpangan gender dari pengalaman masa kecil yang membuat perempuan melihat dirinya sebagai feminine, dan laki-laki sebagai maskulin dan pada saat yang sama menganggap bahwa feminitas lebih rendah daripada maskulinitas.

e. Feminisme Eksistensialis

Berbicara tentang feminisme eksistensialis, kita harus membicarakan Simone de Beauvoir. Bukunya yang berjudul *The Second Sex* sangat berharga bagi pemikiran feminis. Pemikiran Beauvoir sering dianggap sebagai pinjaman dari pemikiran Sartre. Kedekatan Beauvoir dengan Sartre bukan hanya dalam kerangka sebagai murid dengan mentor, atau antara sepasang kekasih, melainkan lebih dari itu. Beauvoir adalah partner intelektual dan terkadang guru bagi Sartre (Tong, 1998, hal. 174).

Diskusi tentang perempuan lebih banyak berpusat di *Being for others*, yang berarti keberadaan bersama orang lain, atau secara negatif berarti konflik untuk menjadikan diri sendiri sebagai Subjek (Self) dan menjadikan orang lain Objek (Other) (Tong, 1998, hal. 174-175). Dalam bagian "Introduction" dari *The Second Sex*, Beauvoir dengan menggunakan konsep Hegel mengatakan bahwa suatu subjek baru dapat dikenal ketika diperhadapkan dengan being yang lain - subjek akan mematok dirinya sebagai sesuatu yang essensial terhadap apa yang dihadapinya dan menghayatinya sebagai objek yang tidak essensial.

Feminisme eksistensialis melihat bahwa untuk menjadi 'exist', perempuan harus hidup dengan melakukan pilihan-pilihan sulit, dan menjalaninya dengan tanggung jawab, baik atas diri sendiri maupun atas orang lain. Itulah kebebasan.

f. Feminisme Postmodern

Feminisme posmodern banyak meminjam pemikiran eksistensialisme dari *Beauvoir*; Dekonstruksionisme dari *Derrida*, dan Pschoanalisis dari *Lacan*. Feminisme postmodern sering juga disebut feminisme Perancis karena motornya adalah orang-orang Perancis. Yang paling menonjol dari pemikiran ini adalah cara pandangnya yang memutarbalikkan ide-ide yang selama ini dianggap negatif, buruk, kurang, atau tidak ada. Adanya perempuan sebagai *Other* dalam konsep Beauvoir oleh feminisme posmodern tidak dianggap sebagai sesuatu yang kurang dan karena itu harus diatasi dengan transendensi, melainkan sebagai posisi yang sangat menguntungkan untuk dapat mengatasi situasi, menilai norma-norma, nilai-nilai, dan praktek-praktek yang dipaksa oleh ideologi patriarki kepada semua orang.

g. Feminisme Multikultural dan Global

Salah satu kritik yang paling keras dilancarkan kepada feminisme adalah bahwa ia bias, dalam arti tidak mencerminkan keseluruhan realitas perempuan. Bias yang sering ditunjukan kepada feminisme misalnya bias ras kulit putih/dunia kesatu (seperti ditunjukkan kepada feminisme liberal), bias keras menengah (seperti ditujukan kepada feminisme radikal), bias pendidikan (seperti ditujukan kepada feminisme eksstensialis dan feminisme postmodern) dan

bahkan bias orientasi seksual. Dalam kerangka itulah kerangka feminisme multikultural dan global lahir.

Feminisme multikultural lahir karena pemikiran feminisme yang sudah ada tidak mengakomodasi seluruh realitas perempuan. Dalam negara yang sama, perempuan tidak dikonstruksikan secara sama. Ada *blue-print* berkenaan dengan aspek-aspek lain dalam kehidupan masing-masing yang membentuk konsisi dan situasi perempuan. Feminisme seharusnya dapat mengakui dan mewadahi keberagaman ini, dengan tidak menempatkan satu standar untuk keseluruhan, karena opresi terhadap perempuan tidak hanya dalam relasi seks, dan gender saja tetapi merupakan hubungan berkaitan antara sistem seks/gender, ras, kelas, latar belakang pendidikan, orientasi seksual, agama (praktek penafsiran agama) yang juga stereotip yang berlaku.

h. Blak Feminism (Feminisme Kulit Hitam)

Aliran pemikiran feminisme ini merujuk kepada teori perjuangan kulit hitam. Aliran ini berkembang dalam suatu tradisi aktivisme kalangan *kiri* yang mengadopsi model-model feminisme sosialis. Bagi perempuan kulit hitam, yang merupakan minoritas di negeri Barat seperti Inggris dan Amerika, teori feminis arus utama tidak memberi ruang bahasa yang cukup tentang diskriminasi rasial. Sehubungan dengan itu, mereka mengembangkan ‘feminisme kulit hitam’ untuk menolong perempuan yang menghadapi dua permasalahan krusial sekaligus yaitu rasisme dan seksisme.

i. Feminisme Islam

Selain respon dari perempuan kulit hitam juga muncul respon dari kalangan Islam. Salah satu kritik utama feminis Islam terhadap feminis Barat adalah kecenderungannya kepada sekulerisme. Menurut teologi feminisme Islam, konsep hak-hak asasi manusia yang tidak berlandaskan visi transendental merupakan hal yang tragis. Sehubungan dengan itu mereka berpandangan bahwa gerakan perempuan Islam harus berpegang pada paradigma agama Islam agar tidak menjadi sekuler. Fatima Merniss (1988) dan Issa J. Boullata (1989) secara terpisah menegaskan bahwa perempuan Islam harus mengembangkan program-program feminisnya dengan menggunakan kerangka acuan yang Islami.

Setiap agama tidak diturunkan dalam masyarakat yang tidak memiliki budaya, melainkan agama lahir dan berkembang dalam konteks masyarakat yang berbudaya serta realitas sosial yang dikonstruksikan oleh budaya masyarakat itu sendiri. Misalnya agama-agama samit (Yahudi, Nasrani, Islam) turun dalam masyarakat yang androsentris, dimana relasi gender lebih didominasi oleh kaum laki-laki. Konteks kesucian dan kemurnian ajaran agama tersebut ditulis dalam bahasa lokal kitab suci atau agama itu lahir. Pada titik inilah budaya dan bahasa tidak dapat dilepas pisahkan karena bahasa merupakan bagian dari kebudayaan yang dikonstruksikan lewat relasi-relasi sosial dalam masyarakat. Lahirnya ajaran-

ajaran agama samit dalam realitas budaya patriaki turut memberikan dampak dalam melahirkan relasi-relasi sosial yang timpang dalam kehidupann manusia antara kaum laki-laki dan perempuan.

Agama turut memberikan andil dalam memberikan pemahaman-pemahaman yang melahirkan stikmaisasi terhadap perempuan dalam berbagai bentuk diskriminasi. Kurangnya peran-peran perempuan menjadi fakta yang begitu nyata betapa perempuan terabaikan dalam cerita-cerita dalam kitap suci. Hal ini kemudian melahirkan tafsir yang keluri terhadap berbagai ajaran agama oleh para tokoh-tokoh agama. Disinilah peran-peran perempuandan laki-laki selalu dikonstruksikan sebagai kodrat yang bersumber dari Tuhan yang Maha Kuasa.

Kondisi ekoloogis Timur Tengah sebagian besar terdiri dari gurun pasir, penduduknya banyak tergantung pada oasis. Debet air ditentukan oleh besar kecilnya oasis tersebut. Karena itu besar kecilnya oasis juga menentukan besar kecilnya anggota kabilah, dan besar kecilnya suatu kaibah biasanya turut menentukan status sosial anggota masyarakat. Dalam kondisi seperti ini kaum laki-laki sangat diuntungkan, sebaliknya kaumperempuan mendapatkan perlakuan diskriminatif seperti pembunuhan anak-anak perempuan di kawasan padang pasir (tandus) yang cenderung dikaitkan dengan tiga hal pokok;

1. kekawatiran akan kemiskinan dan dalam hal ini anak perempuan menjadi alternati utama untuk dikorbankan mengingat posisinya dalam masyarakat kabilah, ia tidak dianggap makhluk yang tidak produktif sebagaimana halnya laki-laki
2. sebagai persembahan kepada dan atas nama Tuhan, sebagaimana hanya Nabi Ibrahim mengurbankan anaknya Ismail.
3. Untuk mempertahankan status sosial dan mencegah terjadinya aib dalam keluarga, mak untuk pengorbanan atau pembunuhan anak dipilih anak perempuan karena anak perempuan lebih berpotensi untuk mendatangkan aib dalam keluarga. Karena itu kehadiran anak perempuan dalam masyarakat kabilah merupakan sesuatu yang tidak menggembiirakan⁶².

j. Feminisme Kristen

Inti dari Teologi feminis adalah dekonstruksi terhadap idiologi patriaki yang mewarnai rumusan Teologi yang dikembangkan Gereja bertahun-tahun dalam upaya membangun suatu teologi yang lebih mempromosikan persaudaran dan keadilan bagi semua manusia⁶³. Dalam analisa para teolog feminis idiologi patriaki merupakan

⁶² Untuk itu lihat Nasarudin Umar, Penafsiran Kitap Suci Berwawasan Jender; Tinjauan Terhadap Ragam dan Bias Interpretasi Teks Al-Quran dalam Perempuan Indonesia Dalam Masyarakat Yang Tengah Berubah 2000 hal 170.

⁶³ Margaretha M Hendriks dalam Makalah *Teologi Feminis* yang disampaikan dalam pelatihan jurnalistik perempuan Teolog GPM, Ambon 6 Agustus 2007 hal, 1.

penyebab utama dari seluruh praktek deskriminasi, ketidakadilan dan peminggiran yang dialami oleh kaum perempuan dalam hidup bermasyarakat dan beragama dan karena itu harus dibongkar. kesalahan dari teologi patriaki ini adalah dimana ia membagi bagian realitas dunia pada tataran tinggi rendah dan kuat lemah dan mengkontradiksikan mereka satu dengan yang lainnya. Jadi dalam paradigma seperti ini, ada realitas-reallitas yang dianggap kuat dan karena itu bisa diposisikan pada kedudukan superior dan ada realitas yang dianggap lemah dan karena itu harus diposisikan pada kedudukan inferior.

Dalam kaitan dengan relasi gender, sudut pandang ini mendudukan laki-laki pada kedudukan superior dan perempuan pada kedudukan inferior. Sudut pandang ini cenderung menimbulkan praktek-praktek ketidak adilan dalam hidup bersama karena mereka yang dianggap kuat cenderung memperoleh hak-hak istimewa dan karena itu cenderung pula menyalagunakan kuasa itu untuk mengorbankan mereka yang dianggap tidak memiliki kuasa. Inilah cikal bakal dari seluruh bentuk ketidakadilan, deskriminasi dan kekerasan disemua tataran hidup masyarakat, juga berbagai pelebelan dan sterotip (perempuan terlalu perasa, cengeng, lemah dan pelebelan lain yang selalu memposisikan perempuan dalam posisi lemah dalam hidup bermasyarakat dan beragama.

Iniilah potret keseharian perempuan yang sangat nyata dan dapat dijumpai dalam kehidupan tiap hari, yang kemudian

melahirkan berbagai gejala ketidakpuasan dalam diri kaum perempuan itu sendiri. Rasa tidak adil dan deskriminasi serta termarginalisasi inilah yang mendorong kaum perempuan mulai dari dunia barat sampai seluruh dunia untuk menganalisa seluruh kenyataan hidup bermasyarakat yang tidak adil itu dalam rangka mengatasi masalah-masalah dimaksud dengan mendasar pada keyakinan iman Kristiani. Pada titik inilah teologi pemikiran teologi feminis dibangun.

Kalau kita simpulkan maka bisa dikatakan bahwa para teolog feminis menjadikan pengalaman penderitaan kaum perempuan akibat ketidakadilan dan diskriminasi yang dilakukan oleh masyarakat patriakal sebagai titik tolak dari bangunan teologinya. Pertanyaan-pertanyaan teologis utama yang dikemukakan oleh para teolog feminis dalam rangka mendekonstruksi sistem nilai patriaki dan merekonstruksi suatu budaya yang lebih adil dan setara adalah, apakah Allah merestui penindasan dan keadilan terhadap kaum perempuan?. Apakah Allah sungguh-sungguh menciptakan manusia perempuan lebih rendah dari manusia laki-laki? Bagaimana akibat dan tradisi kristiani memberi dasar dan arah bagi pembongkaran sistem nilai patriaki yang bias gender? Pertanyaan-pertanyaan tersebut memberi arah bagi para teolog feminis untuk mengadakan study kritis terhadap alkitab dan tradisi kekristenan dalam rangka mengkritik ketidakadilan dimaksud dan demi mempromosikan pembebasan bagi kaum perempuan pada semua tataran hidup bermasyarakat dan

beragama. Sudut pandang yang digunakan oleh para teolog perempuan dalam melakukan study dimaksud adalah sudut pandang yang berfokus pada keadilan dan kesetaraan bagi seluruh umat manusia. Kita akan melihat bagaimana para teolog perempuan menjawab pertanyaan-pertanyaan pokok di atas⁶⁴,

1. Visi Tentang Allah dan manusia. Dalam teologi feminis, wajah Allah Yang ditampilkan adalah wajah yang penuh cinta kasih dan keadilan kepada semua makhluk ciptaanNya tanpa batas gender, ras ataupun agama. Ini jelas berbeda dengan teologi tradisional yang mempresentasikan Allah sebagai Allah yang lebih memihak kepada kaum laki-laki dan menciptakan mereka lebih unggul dari perempuan. Cinta kasih dan keadilanNya terlihat dalam akta penciptaan yang dilakukan khusus ketika Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan dalam gambar dan rupaNya dan diberi tugas untuk bersama-sama berkuasa atas seluruh ciptaan Allah (kej 1:26-28). Walaupun dalam Kej 2 dikatakan bahwa Hawa diciptakan dari rusuk Adam maka ini tidak bisa dipahami sebagai cara Allah merendahkan perempuan di bawah laki-laki. Sebab dengan menggunakan sudut pandang keadilan dan kesetaraan maka para teolog feminis menafsirkannya sebagai ayat yang menekankan

⁶⁴ Margaretha M Hendriks dalam Makalah *Teologi Feminis* yang disampaikan dalam pelatihan jurnalistik perempuan Teolog GPM, Ambon 6 Agustus 2007 hal, 4-5.

pada kesetaraan dan kesepadanan karena Hawa diciptakan sebagai penolong yang sepadan bagi Adam. Dan kata sepadan adalah kata yang sama sekali tidak mengandung konotasi inferioritas. Dengan begitu, diskriminasi dan perendahan perempuan dalam masyarakat patriakal secara teologis dilihat sebagai suatu akta dosa atau pemberontakan terhadap Allah sendiri. Relasi superior inferior antara laki-laki dan perempuan adalah relasi penuh dosa dan karena itu dan karena itu relasi tersebut harus dibenarkan. Tegasnya budaya patriakal yang mengunggulkan laki-laki saja dan menempatkan perempuan pada posisi lemah adalah budaya yang tidak melayani kehendak Allah dan karena itu harus dibongkar. Kembali kepada visi mengenai Allah, iman kristen sering menyebut Allah sebagai Bapa. Namun kata bapa oleh para teolog feminis dilihat sebagai sebuah metafor, sama seperti metafor gembala, pokok anggur tersebut. Oleh karena itu sebuah Allah sebagai Bapa tidak bisa dipahami secara harafiah seolah-olah Allah berkelamin laki-laki. Selain itu kata bapa adalah kata yang dimaksudkan untuk melambangkan cinta kasih dan perlindungan yang biasa diberikan oleh seorang bapa yang baik bagi anak-anaknya (Mark 14:36). Bagi para teolog feminis, penamaan Allah sebagai Bapa tidak menutup kemungkinan untuk juga menyebut Nya sebagai Ibu. Sebab kalau alkitab di baca dengan teliti maka kita

bisa menemukan banyak sekali teks yang menggambarkan Allah dalam sifat-sifat seorang ibu (Yes 49). Baik metafor bapa maupun metafor ibu bisa digunakan untuk menggambarkan cinta kasih dan perlindungan dari Allah kepada umatNya sama seperti orang tua yang mengasahi dan melindungi anak-anak mereka. Visi tentang Yesus, teologi feminis memang mengakui kelaki-lakian Yesus. Namun Yesus adalah Tuhan yang dekat dengan kaum perempuan. Dia tidak menggunakan kelaki-lakianNya untuk mendominasi orang lain terutama kaum perempuan seperti halnya yang dibuat oleh kaum laki-laki pada umumnya dalam budaya patriakal. Sebaliknya justru Dia mengkritik budaya patriakal yang sangat kuat di zamanNya dengan cara menjadi teman dari kaum perempuan. Dia adalah sahabat dari semua orang yang lemah dan dia menyatakan solidaritas dan keberpihakanNya kepada mereka yang terpinggirkan dalam masyarakat termasuk kaum perempuan. Lihat cerita perempuan Samaria (Yoh:4), cerita Martha dan Maria (Luk 10) dst. Kalaupun ada saat ketika dia jatuh kembali ke dalam kecenderungan patriaki namun dia segera kembali setelah menerima kritik dari perempuan Syro Fenisia (Mark 8). Menurut Elisabet S Fiorenza komunitas Yesus justru merupakan komunitas yang sangat menarik minat kaum perempuan, karena sikap Yesus yang sangat berbeda dengan sikap laki-laki lain yang

menjadi pemimpin agama di waktu itu. Dia terbuka dan penuh solidaritas kepada kaum perempuan. Banyak kaum perempuan terlibat di dalam komunitasnya. Sayangnya ketika injil-injil ditulis nama-nama perempuan hampir tidak disebutkan karena dilupakan. Oleh karena itulah Fiorenza ingin agar supaya kita merekonstruksi lagi cerita-cerita injil atau paling kurang membacanya dengan penuh kecurigaan agar kita bisa menemukan kembali di balik cerita-cerita itu peran perempuan di dalamnya. Umpamanya kalau kita membaca cerita pemanggilan 12 murid Yesus, kita perlu bertanya apakah betul Cuma 12 laki-laki yang dipanggil? Dimana mana Maria Magdalena, dimana nama Martha, dimana nama perempuan lainnya yang begitu dekat dengan Tuhan Yesus?

2. Visi tentang alkitab. Di dalam teologi feminis, alkitab dipahami sebagai kumpulan tulisan-tulisan yang berisi rumusan-rumusan iman dari orang percaya pada waktu dan tempat yang berbeda-beda. Kesaksian-kesaksian dimaksud adalah kesaksian tentang Allah yang penuh cinta kasih dan pengampunan, Allah yang membebaskan, Allah yang berpihak pada orang kecil dan mereka yang diperlakukan secara tidak adil. Maka inilah yang harus digunakan untuk membaca alkitab, supaya berita-berita alkitab bisa menjadi sumber berita injil dan berita pengharapan bagi manusia, khususnya bagi mereka yang

tertindas dan terpinggirkan. Para teolog feminis sangat sadar bahwa ada banyak teks dalam alkitab yang sangat bias gender. Ini disebabkan karena kitab-kitab dalam alkitab ditulis juga dalam pengaruh budaya manusia yang patriakal itu. Oleh karena itu teks-teks tersebut harus selalu direinterpretasi dalam rangka untuk menjadikannya sumber pemberdayaan yang diperlukan tidak adil dalam masyarakat dan gereja.

3. Visi tentang Gereja. Para teolog Feminis sangat kritis terhadap gereja yang menjadikan dirinya sebagai suatu badan yang berorientasi pada kuasa. Mereka pada umumnya mengkritik kenyataan bahwa dalam proses melembaga, gereja telah banyak mengadopsi struktur kerajaan yang sangat hierarkis dan menjadikan hanya laki-laki semata sebagai para pemimpin gereja. Gereja harus lebih berorientasi pada membangun persekutuan dan persaudaraan antar para warganya. Gereja juga harus mempraktekkan budaya berbagi kepemimpinan dan kuasa, karena bukan hanya laki-laki yang diciptakan untuk memimpin. Dalam kaitan itu kaum perempuan juga menekankan bahwa kuasa yang diberikan kepada para pemimpin itu adalah kuasa untuk melayani dan memberdayakan, bukan kuasa demi dominasi (Letty Russel, Ranjini Rebera dst). Jadi paradigma kuasa dalam teologi perempuan juga bergeser dari paradigma "Power Over" kepada paradigma "Power to" serve and to

empower. Jadi gereja harus menjadi rumah dan keluarga bagi semua warganya dimana rasa persaudaraan dan saling mengasihi dikembangkan di antara semua warganya agar supaya semua merasa dirinya sebagai bagian utuh dari persekutuan itu.

4. Visi tentang alam semesta. Para teolog feminis juga mengembangkan ekofeminisme, yaitu visi teologi feminis tentang alam semesta. Dalam teologi feminis, kerusakan lingkungan dilihat sebagai salah satu wujud dari budaya patriakal yang diberlakukan oleh manusia terhadap alam semesta. Dalam hal ini manusia merasa dirinya lebih penting dan lebih superior dari kebutuhan manusia. Ekofeminisme dikembangkan sebagai akibat dari kerusakan lingkungan akibat keserakahan manusia, dan ini sangat membahayakan hidup dunia secara menyeluruh. Oleh karena itu para teolog feminis menekankan pentingnya melakukan reorientasi visi teologis terhadap alam. Alam tidak boleh lagi dilihat sebagai obyek tetapi sebagai mitra. Manusia adalah bagian dari alam dan sama-sama merupakan ciptaan Allah untuk saling memberi hidup. Manusia harus sadar bahwa alam bisa hidup tanpa manusia, tetapi manusia tidak bisa hidup tanpa alam (band umur manusia dan umur alam yang jauh lebih tua dari manusia). Justru terlihat bahwa hidup manusia sangatlah bergantung pada alam itu. Jadi kalau alam rusak maka manusia itu sendirilah yang aka

sangat menderita dan ikut mati. Oleh karena itu manusia harus menghargai alam dan memeliharanya sebab kerusakan alam adalah kerusakan manusia dan yang lebih penting lagi kerusakan alam dilihat sebagai sebuah perbuatan dosa terhadap Allah sendiri yang telah menciptakan alam. Jadi tanggungjawab manusia adalah bekerja memulihkan kerusakan alam dan mencegah kerusakan yang lebih parah.

B. Gender dan Subordinasi

Pandangan gender ternyata bisa menimbulkan subordinasi terhadap perempuan. Anggapan bahwa perempuan itu irrasional atau emosional sehingga perempuan tidak bisa tampil memimpin, berakibat munculnya sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting. Subordinasi karena gender tersebut terjadi dalam segala macam bentuk yang berbeda dari tempat ke tempat dan dari waktu ke waktu. Di Jawa, dulu ada anggapan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, toh akhirnya akan ke dapur juga. Bahkan, pemerintah pernah memiliki peraturan bahwa jika suami akan pergi belajar (jauh dari keluarga) dia bisa mengambil keputusan sendiri. Sedangkan bagi istri yang hendak tugas belajar ke luar negeri harus seizin suami. Dalam rumah tangga masih sering terdengar jika keuangan keluarga sangat terbatas, dan harus mengambil keputusan untuk menyekolahkan anak-anaknya maka anak laki-laki akan mendapatkan prioritas utama. Praktik seperti itu

sesungguhnya berangkat dari kesadaran gender yang tidak adil.

C. Gender dan Stereotype

Secara umum stereotype adalah pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu. Celaknya stereotype selalu merugikan dan menimbulkan ketidakadilan. Stereotype yang diberikan kepada suku bangsa tertentu, misalnya Yahudi di Barat, Cina di Asia Tenggara, telah merugikan suku bangsa tersebut. Salah satu jenis stereotype itu adalah yang bersumber dari pandangan gender. Banyak sekali ketidakadilan terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya perempuan, yang bersumber dari penandaan (stereotype) yang dilekatkan kepada mereka. Misalnya, penandaan yang berawal dari asumsi bahwa perempuan bersolek adalah dalam rangka memancing perhatian lawan jenisnya, maka setiap ada kasus kekerasan atau pelecehan seksual selalu dikaitkan dengan stereotype ini. Bahkan jika ada pemerkosaan yang dialami oleh perempuan, masyarakat berkecenderungan menyalahkan korbannya. Masyarakat memiliki anggapan bahwa tugas utama kaum perempuan adalah melayani suami. Stereotype ini berakibat wajar sekali jika pendidikan kaum perempuan dinomorduakan. Stereotype terhadap kaum perempuan ini terjadi di mana-mana. Banyak peraturan pemerintah, aturan keagamaan, kultur dan kebiasaan masyarakat yang dikembangkan karena stereotype tersebut.

D. Gender dan Kekerasan

Kekerasan (*violence*) adalah serangan atau invasi (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan terhadap sesama manusia pada dasarnya berasal dari berbagai sumber, namun salah satu kekerasan terhadap satu jenis kelamin tertentu yang disebabkan oleh anggapan gender. Kekerasan yang disebabkan oleh bias gender ini disebut *gender-related violence*. Pada dasarnya, kekerasan gender disebabkan oleh ketidaksetaraan kekuasaan yang ada dalam masyarakat. Banyak macam dan bentuk kejahatan yang bisa dikategorikan sebagai kekerasan gender, diantaranya:

1. bentuk pemerkosaan terhadap perempuan, termasuk perkosaan dalam perkawinan. Perkosaan terjadi jika seseorang melakukan paksaan untuk mendapatkan pelayanan seksual tanpa kerelaan yang bersangkutan. Ketidakrelaan ini seringkali tidak bisa terekspresikan disebabkan oleh pelbagai faktor, misalnya ketakutan, malu, keterpaksaan baik ekonomi, sosial maupun kultural, tidak ada pilihan lain.
2. tindakan pemukulan dan serangan fisik yang terjadi dalam rumah tangga (*domestic violence*). Termasuk tindak kekerasan dalam bentuk penyiksaan terhadap anak-anak (*child abuse*).
3. bentuk penyiksaan yang mengarah kepada organ alat kelamin (*genital mutilation*), misalnya penyunatan terhadap anak perempuan. Berbagai alasan diajukan

oleh suatu masyarakat untuk melakukan penyunatan ini. Namun salah satu alasan terkuat adalah, adanya anggapan dan bias gender di masyarakat, yakni untuk mengontrol kaum perempuan. Saat ini, penyunatan perempuan sudah mulai jarang kita dengar.

4. kekerasan dalam bentuk pelacuran (*prostitution*). Pelacuran merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan yang diselenggarakan oleh suatu mekanisme ekonomi yang merugikan kaum perempuan. Setiap masyarakat dan Negara selalu menggunakan standar ganda terhadap pekerja seksual ini. Di satu sisi pemerintah melarang dan menangkapi mereka, tetapi di lain pihak negara juga menarik pajak dari mereka. Sementara seorang pelacur dianggap rendah oleh masyarakat, namun tempat pusat kegiatan mereka selalu saja ramai dikunjungi orang.
5. kekerasan dalam bentuk pornografi. Pornografi adalah jenis kekerasan lain terhadap perempuan. Jenis kekerasan ini termasuk kekerasan nonfisi, yakni pelecehan terhadap kaum perempuan di mana tubuh perempuan dijadikan objek demi keuntungan seseorang.
6. kekerasan dalam bentuk pemaksaan sterilisasi dalam Keluarga Berencana (*enforced sterilization*). Keluarga Berencana di banyak tempat ternyata telah menjadi sumber kekerasan terhadap perempuan. Dalam rangka

memenuhi target mengontrol pertumbuhan penduduk, perempuan seringkali dijadikan korban demi program tersebut, meskipun semua orang tahu bahwa persoalannya tidak saja pada perempuan melainkan berasal dari kaum laki-laki juga. Namun, lantaran bias gender, perempuan dipaksa sterilisasi yang sering kali membahayakan baik fisik ataupun jiwa mereka.

7. adalah jenis kekerasan terselubung (*molestation*), yakni memegang atau menyentuh bagian tertentu dari tubuh perempuan dengan pelbagai cara dan kesempatan tanpa kerelaan si pemilik tubuh. Jenis kekerasan ini sering terjadi di tempat pekerjaan ataupun di tempat umum, seperti dalam bis.
8. tindakan kejahatan terhadap perempuan yang paling umum dilakukan di masyarakat yakni yang dikenal dengan pelecehan seksual atau *sexual and emotional harassment*. Ada banyak bentuk pelecehan, dan yang umum terjadi adalah *unwanted attention from men*. Banyak orang membela bahwa pelecehan seksual itu sangat relative karena sering terjadi tindakan itu merupakan usaha untuk bersahabat⁶⁵.

Tetapi sesungguhnya pelecehan seksual bukanlah usaha untuk bersahabat, karena tindakan tersebut merupakan sesuatu

⁶⁵ Untuk itu lihat Mansour Fakih dalam Analisis Gender & Transformasi Sosial tahun 2012 hal, 17-20

yang tidak menyenangkan bagi perempuan, Ada beberapa bentuk yang bisa dikategorikan pelecehan seksual, Di antaranya:

1. Menyampaikan lelucon jorok secara vulgar pada seseorang dengan cara yang dirasakan sangat ofensif.
2. Menyakiti atau membuat malu seseorang dengan omongan kotor.
3. Mengontrogasi seseorang tentang kehidupan atau kegiatan seksualnya atau kehidupan pribadinya.
4. Meminta imbalan seksual dalam rangka janji untuk mendapatkan kerja atau untuk mendapatkan promosi atau janji-janji lainnya.
5. Menyentuh atau menyenggol bagian tubuh tanpa ada minat atau tanpa izin dari yang bersangkutan.

E. Gender dan Beban Kerja

Adanya anggapan bahwa kaum perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin, serta tidak cocok untuk menjadi kepala rumah tangga, berakibat bahwa semua pekerjaan domesitk rumah tangga menjadi tanggung jawab kaum perempuan. Konsekuensinya, banyak kaum perempuan yang harus bekerja keras dan lama untuk menjaga kebersihan dan kerapian rumah tangganya, mulai dari memberseihkan dan mengepel lantai,m memasak, mencuci, mencari air untuk mandi hingga memelihara anak. Di kalangan keluarga miskin beban yang sangat berat ini harus ditanggung oleh perempuan

sendiri. Terlebih-lebih jika si perempuan tersebut harus bekerja, maka ia memikul beban kerja ganda.

Bias gender yang mengakibatkan beban kerja tersebut seringkali diperkuat dan disebabkan oleh adanya pandangan atau keyakinan di masyarakat bahwa pekerjaan yang dianggap masyarakat sebagai jenis “pekerjaan perempuan”, seperti semua pekerjaan domestik, dianggap dan dinilai lebih rendah dibandingkan dengan jenis pekerjaan yang dianggap sebagai “pekerjaan lelaki”, serta dikategorikan sebagai “bukan produktif” sehingga tidak diperhitungkan dalam statistik ekonomi Negara. Sementara itu kaum perempuan, karena anggapan gender ini, sejak dini telah disosialisasikan untuk menekuni peran gender mereka. Di lain pihak kaum lelaki tidak diwajibkan secara cultural untuk menekuni berbagai jenis pekerjaan domestik itu. Kesemuanya ini telah memperkuat pelanggaran secara cultural dan structural beban kerja kaum perempuan.

Bagi kelas menengah dan golongan kaya beban kerja itu kemudian dilimpahkan kepada pembantu rumah tangga (*domestic workers*). Sesungguhnya, mereka ini telah menjadi korban dari bias gender di masyarakat. Mereka bekerja lebih lama dan berat, tanpa perlindungan dan kejelasan kebijakan Negara. Selain belum adanya kemauan politik untuk melindungi mereka, hubungan feodalistik dan bahkan bersifat perbudakan tersebut memang belum bisa secara transparan dilihat oleh masyarakat luas.

Manifestasi ketidakadilan gender dalam bentuk marginalisasi ekonomi, subordinasi, kekerasan, stereotipe dan beban kerja tersebut terjadi di berbagai tingkatan⁶⁶. Pertama, manifestasi ketidakadilan gender tersebut terjadi di tingkat Negara, yang dimaksudkan di sini baik pada satu Negara maupun organisasi antar Negara seperti PBB. Banyak kebijakan dan hukum Negara, perundang-undangan serta program kegiatan yang masih mencerminkan sebagian dari manifestasi ketidakadilan gender. Demikian juga banyak kebijakan PBB dan pendekatan pembangunan yang dilakukan oleh PBB dianggap mencerminkan manifestasi ketidakadilan gender. Kedua, manifestasi tersebut juga terjadi di tempat kerja, organisasi maupun dunia pendidikan. Banyak aturan kerja, manajemen, kebijakan keorganisasian, serta kurikulum pendidikan yang masih melanggengkan ketidakadilan gender tersebut. Ketiga, manifestasi ketidakadilan gender juga terjadi dalam adat istiadat masyarakat di banyak kelompok etnik, dalam kultur suku-suku atau dalam tafsiran keagamaan. Bagaimanapun mekanisme interaksi dan pengambilan keputusan di masyarakat masih banyak mencerminkan ketidakadilan gender tersebut. Keempat, manifestasi ketidakadilan gender itu juga terjadi di lingkungan rumah tangga.

Bagaimana proses pengambilan keputusan, pembagian kerja dan interaksi antara anggota keluarga dalam banyak

⁶⁶ Untuk itu lihat Mansour Fakih dalam Analisis Gender & Transformasi Sosial tahun 2012 hal, 22

rumah tangga sehari-hari dilaksanakan dengan menggunakan asumsi bias gender. Oleh karenanya rumah tangga juga menjadi tempat kritis dalam mensosialisasikan ketidakadilan gender. Yang terakhir dan yang paling sulit diubah adalah ketidakadilan gender tersebut telah mengakar di dalam keyakinan dan menjadi ideology kaum perempuan maupun laki-laki. Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa manifestasi ketidakadilan gender ini telah mengakar mulai dalam keyakinan di masing-masing orang keluarga hingga ada tingkat Negara yang bersifat global.

F. Papalele Sebagai Suatu Tindakan Gender dan Ruang Sosial Baru Perempuan Papalele di Saparua

Asumsi mengenai perempuan adalah kelompok yang lemah dan memiliki ketergantungan dengan kaum laki-laki adalah sesuatu yang mesti mendapat koreksi dan pengujian secara faktual. Kaum perempuan sesungguhnya merupakan korban dari dinamika masyarakat yang memiliki latar belakang budaya patriaki. Peran-peran kaum perempuan selama ini sesungguhnya merupakan suatu langkah yang cukup memberikan kontribusi yang sangat besar dalam kehidupan keluarga serta suatu upaya untuk mensejajarkan dirinya dengan kaum laki-laki. Perempuan papalele di Saparua merupakan potret kehidupan perempuan yang sejak dulu merepresentasikan diri sebagai kelompok yang sejajar dengan

laki-laki dalam segala aspek kehidupan. Pekerjaan mencari nafka untuk menyanggupi kebutuhan hidup keluarga yang selama ini identik melekat pada sisi kehidupan seorang laki-laki dan menjadikan perempuan sebagai pribadi yang bergantung pada kaum laki-laki menjadi suatu fakta yang berbanding terbalik dalam kehidupan kaum perempuan papalele di Saparua.

Perempuan papalele di Saparua tampil sebagai suatu potret pembaharuan dalam kehidupannya keluarga dan masyarakat. Tindakan ini merujuk pada suatu kesadaran diri bahwa mereka (perempuan papalele) bukanlah pribadi yang lemah dan tidak berdaya. Aktifitas sebagai seorang perempuan papalele merupakan suatu kesadaran kaum perempuan papalele untuk turut bertanggung jawab dalam menafkai kebutuhan keluarga. Kesadaran ini kemudian melahirkan suatu tindakan yang menampilkan peran-peran strategis seorang perempuan. Dinamika yang dilakoni sebagai seorang perempuan papalele dalam berbagai kontribusi yang diberikan sesungguhnya, merupakan suatu bentuk klarifikasi terhadap realitas masyarakat yang selama ini cenderung mengagap kaum perempuan sebagai pribadi yang lemah, tidak berdaya dan yang selalu bergantung pada kaum laki-laki. Profesi sebagai perempuan papalele sesungguhnya merupakan tindakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, yang tanpa disadari hal ini merupakan suatu tindakan (upaya) gender yang terlahir dalam diri seorang perempuan papalele.

Profesi sebagai seorang perempuan papalele menunjukkan beberapa hal yang memiliki nilai positif dalam diri seorang perempuan papalele yakni, tanggung jawab, pekerja keras (ulet), kreatif. Profesi ini dengan sendirinya menghilangkan berbagai stereotip (pelebelan) yang negatif terhadap kaum perempuan. Pada sisi yang lain profesi ini memberikan suatu kemandirian secara ekonomis kepada kaum perempuan dalam keluarga dengan menghilangkan ketergantungan kepada suami (kaum laki-laki) sebagai satu-satunya pencari nafka dalam keluarga. Dalam kurun waktu yang cukup lama perempuan papalele di Saparua telah merepresentasikan dirinya sebagai kelompok yang sejajar dengan kaum laki-laki. Kontribusi sebagai kaum perempuan turut memberikan manfaat sosial maupun ekonomis terhadap dirinya maupun keluarga.

Eksistensi perempuan papalele telah melahirkan berbagai keberhasilan yang dicapai oleh pribadi maupun keluarganya dalam segala hal. Memiliki profesi sebagai seorang papalele dengan penghasilan yang relatif lebih baik mampu mengangkat harkat dan martabat seorang perempuan papalele dan menjauhkan dirinya dari berbagai perilaku-prilaku diskriminasi maupun kekerasan yang selama ini dialami oleh kaum perempuan. Mereka (perempuan papalele) mampu melakukan suatu pencitraan diri terhadap orang lain. Hal inilah yang kemudian melahirkan suatu ruang sosial baru bagi diri seorang perempuan papalele dalam berbagai relasi-relasi

sosial yang dilakukan baik dalam keluarga maupun masyarakat. Dengan kemandirian secara ekonomis mampu memperkuat posisi seorang perempuan papalele dalam jaringan relasi sosial yang dibangunnya dengan orang lain pada berbagai konteks kehidupan.

Ruang sosial baru merupakan upaya perempuan papalele untuk melepaskan diri dari berbagai jeratan budaya patriaki yang telah terbentuk dalam berbagai rekayasa sosial, yang selalu menskreditkan posisi kaum perempuan dalam masyarakat maupun keluarga. dalam konteks kehidupan masyarakat yang semakin terbuka dewasa ini potret perempuan papalele di Saparua menjadi suatu objek yang sangat menarik untuk diamati. Papalele menjadi cerminan tindakan gender kaum perempuan Saparua yang berupaya untuk mengangkat harkat dan martabatnya dalam kehidupan masyarakat. Berakar dalam suatu tradisi berdagang masyarakat Saparua dimasa lalu melahirkan suatu ide dan gagasan untuk melakukan perubahan yang hingga kini belum disadari oleh banyak orang termasuk mereka yang selama ini melakoni profesi sebagai seorang perempuan papale.

Papalele menjadi suatu cerminan kecerdasan kaum perempuan yang tanpa disadari selama ini telah mengajarkan banyak perempuan untuk berupaya merubah nasib dan ruang sosialnya dalam masyarakat sehingga tidak tergilas dalam realitas budaya patriaki yang cenderung mengkebiri harkat dan martabat kaum perempuan. Kemandirian secara

ekonomis yang dicapai oleh seorang perempuan papalele dan turut memperkuat posisinya dalam pusaran budaya patriaki. Potret perempuan papalele yang mampu mensejajarkan dirinya dengan kaum laki-laki dalam hal mencari nafka untuk kebutuhan keluarga serta mampu membuka ruang sosial baru dalam kehidupan masyarakat di Saparua menjadi bukti bahwa sesungguhnya kaum perempuan bukanlah pribadi yang lemah dan tidak berdaya, melainkan pribadi yang sama (sejajar) dengan laki-laki dalam berbagai realitas sosial.

Gender menjadi suatu hal yang sangat penting untuk dipercakapkan sebagai solusi untuk mencairkan berbagai bentuk diskriminasi dan berbagai bentuk ketidakadilan terhadap kaum perempuan. Laki-laki dan perempuan bukan untuk dibeda-bedakan atau dipertentangkan dalam posisi tinggi-rendah, kuat-lemah, superior-inferior melainkan sesuatu yang dijadikan untuk saling melengkapi. Laki-laki tak mungkin hidup tanpa perempuan pun sebaliknya, pada titik inilah apa yang disebut dengan gender (kesetaraan laki-laki dan perempuan) menjadi hal yang solusi untuk menghindari ketimpangan sosial diantara laki-laki dan perempuan. Potret perempuan papalele di Saparua merefleksikan betapa perempuan dan laki-laki itu sama dalam berbagai relasi sosial. Perempuan dan laki-laki hanya dapat dibedakan pada realitas biologis yang dimiliki dengan bentuk-bentuk fisik yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Masalah kemiskinan merupakan suatu masalah yang menjadi perhatian pemerintah dengan berbagai upaya dan program pemberdayaan dengan tujuan akhir mampu merangsang pertumbuhan ekonomi rakyat. Sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendorong peningkatan ekonomi rakyat itu, terdapat sejumlah upaya yang sejak dulu digalakan oleh masyarakat di Nusantara untuk mampu memenuhi berbagai kebutuhann hidupnya dengan potensi-potensi ekonomi kerakyatan yang berbasis kebudayaan lokal. Hal ini tidak semata-mata dilakoni oleh kaum laki-laki melainkan perempuan tampil sebagai orang yang memiliki peran dan andil yag sangat besar dalam kehidupan ekonomi keluarga.

Papalele merupakan suatu potret perempuan Saparua yang tampil sebagai orang yang memiliki adil dalam menjawab berbagai kebutuhan hidup dalam keluarga. menjajakan barang dagangan dipasar menjadi suatu rutinitas yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan seorang papalele. dengan modal yang seadannya serta pengetahuan dagang yang terbatas seorang perempuan papalele tampil untuk memperjuangkan kehidupan ekonomi keluarga. potret perempuan papalele menunjukan eksistensi diri seorang perempuan yang tidak hanya bergantung pada kaum laki-laki, melainkan suatu

bentuk refleksi diri yang teraktualisasi lewat aktifitas yang dijalani tiap hari maupun waktu-waktu tertentu.

Potret kehidupan perempuan papalele di Saparua menjadi suatu realitas sosial baru yang membuka ruang sosial baru bagi kehidupan mereka dengan tidak bergantung pada kaum laki-laki (suami). Pada titik inilah perempuan papalele menjadi contoh bagi kaum perempuan untuk keluar dari berbagai tekanan sosial dan budaya yang selama ini terkungkung dalam lingkaran budaya patriaki. Konstruksi budaya patriaki selama ini telah mendiskriminasi kaum perempuan pada posisi yang lemah, sehingga diperlukan upaya serta daya kritis untuk mampu mensejajarkan diri dengan kaum laki-laki.

B. Saran

Kontribusi yang selama ini diberikan oleh kaum perempuan papalele di Saparua membuktikan bahwa sesungguhnya kaum perempuan bukanlah pribadi yang tidak berdaya melainkan pribadi yang sejajar bahkan lebih dari laki-laki. Hal ini ditampilkan dalam potret perempuan papalele yang telah menunjukkan eksistensinya dalam memenuhi kebutuhannya hidup dan berbagai tuntutan pendidikan anak-anak. Tindakan ini merupakan refleksi diri yang sangat mendalam sebagaimana yang terungkap dalam penulisan ini. Bertolak dari berbagai realitas dan fakta sosial yang diungkap dalam

penulisan ini penulis mencoba untuk memberikan saran antara lain:

- a. Perlunya perhatian Pemerintah Daerah dan instansi terkait untuk dapat memberikan bantuan dan dukungan baik secara finansial maupun pengetahuan khusus bagi para ibu-ibu papalele yang selama ini tidak pernah mendapat sentuhan dan bantuan pemerintah
- b. Perlunya perhatian pemerintah dan instansi terkait terhadap berbagai masalah yang dihadapi oleh sektor-sektor informal yang selama ini turut menunjang perekonomian keluarga.
- c. Perlunya kesadaran diri secara kolektif kaum perempuan Maluku untuk keluar dari tekanan sosial dan kungkungan budaya patriaki yang selama ini dikonstruksikan dalam budaya orang Maluku.

DAFTAR PUSTAKA

- Sjafri Sairin dkk, *Pengantar Antropologi Ekonomi*, Pustaka Pelajar Yogyakarta 2002
- Suryo Agung, *Uroe Gantoe Pada Masyarakat Aceh* BPSNT Banda Aceh 2007
- Piort Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Prenada Media Group, Jakarta 2010
- Heddy Shri Ahimsa Putra, *Eksistensi dan Fungsi Pasar Tradisional di Tengah Globalisasi, Sketsa Pemikiran Antropologis* (makalah pada seminar pasar tradisional di Ambon September 2005).
- J. Pattikayhatu dkk, *Pasar Tradisional Masyarakat Pulau Seram di Kecamatan TNS*
- Benedikta Juliantri Widi Wulandari, *Penguatan Potensi Ekonomi Budaya Lokal Studi Terhadap Petani Madu di Desa Nanga Lebayon Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat*, BPSNT Pontianak, 2008
- Revrison Baswir, *Manifesto Ekonomi Kerakyatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2009
- Weinstein, Frank B, *Indoneisan Foreign Policy and the Dilemma Of Dependence*, Cornel University Press, Ithaca 1976.
- Sunyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2012

Humm Meggie, eds, *Ensinklopedia Feminis*, Fajar Pustaka Baru, Yogyakarta 2007

Revrisond Baswir, *Agenda Ekonomi Kerakyatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 1997

Loekman Soetrisno, *Kemiskinan Perempuan dan Pemberdayaan*, Kanisius Yogyakarta 1997

Bambang Ismawan, *Ekonomi Rakyat: Sebuah Pengantar*, dalam *Jurnal Ekonomi Rakyat*, Tahun I, No 1, P3R dan Yayasan Agroekonomika (YAE), Bogor, 2002.

Sallatu Abdul Majid & Sultan Sahab, *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat: Pergulatan Menuju Keadilan Sosial di Era Destoda*. Dalam Analisis, Volume 1, September 2003.

Hanafi Yusuf & Maswita, *Membangun Infrastruktur Kebudayaan Sebagai Industri Strategi (Jawaban Untuk Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia)*, dalam Majalah konstan, 10 Maret 2008.

Arivia, *Filsafat Berprespektif Feminis*, Yayasan Jurnal Perempuan 2003

Tita Marlita dan E. Kristi Poewandari, *Pergerakan Perempuan Indonesia (Perempuan Indonesia Dalam Masyarakat Indonesia yang Tengah Berubah)*. Prrog Studi Kajian Wanita Pasca Sarjana UI, Jakarta 2000

Nugroho R, *Gender dan Strategi Pengurus - Utamanya Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008.

Aphrodite Milana Sahusilawane & Esther Kembauw, *Petani Perempuan Kisar Dalam Perspektif Gender Studi Kasus Di Pulau Kisar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku*, BPSNT Ambon, 2010.

Hendriks M. Margaretha, *Teologi Feminis* makala yang disampaikan pada Pelatihan Jurnalis Perempuan Teolog GPM, Ambon 6 Agustus 2007

Fakih Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012

Lim Sing Meij, *Ruang Sosial Baru Perempuan Tionghoa "sebuah kajian pasca kolonial"* Yayasan Obor Indonesia Jakarta 2009

Mosse. C.L, *Gender dan Pembangunan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2007